



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perpustakaan Nasional merupakan dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Ketentuan mengenai Renstra Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Perpustakaan Nasional yang termuat dalam sistem informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini berlaku, Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN
NASIONAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia tengah memasuki fase penting dalam upayanya mewujudkan visi besar menjadi negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan peringatan satu abad kemerdekaan yang dikenal sebagai “Generasi Emas 2045”. Pembangunan manusia menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta produktivitas berbasis literasi masyarakat. Literasi yang kuat menjadi landasan penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berpikir kritis, ilmiah, kreatif, dan inovatif, sehingga mampu bersaing di tingkat global sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi bangsa menjadi sangat krusial di tengah upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan manusia. Perpustakaan sebagai institusi penyedia informasi dan pengetahuan berperan strategis dalam mendukung pencapaian peningkatan kapasitas SDM. Seiring dengan era Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan masyarakat terhadap informasi semakin meningkat dan bersifat multidimensi. Perpustakaan diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan ini, menjadi tempat transformasi sosial inklusif, serta menyediakan layanan yang mendukung literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas masyarakat. Peningkatan kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mencakup literasi informasi, literasi digital, literasi budaya, dan literasi lainnya yang diperlukan dalam kehidupan modern.

Dalam konteks pembangunan nasional, Perpustakaan Nasional memiliki posisi strategis sebagai institusi yang mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan budaya literasi, perluasan akses, dan pemerataan informasi, serta pengelolaan pengetahuan secara inklusif dan berkelanjutan. Peran ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem inovasi dan riset nasional. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Perpustakaan Nasional 2025-2029 diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan, serta memperkuat sinergi program dan kegiatan dengan prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN, sehingga dapat berperan lebih efektif dalam mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan digital berbasis literasi dan informasi.

1.1.1 Literasi Global

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan literasi, tantangan global seperti perubahan iklim menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Perubahan iklim berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, perpustakaan tidak hanya berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung keberlanjutan. *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)* menegaskan bahwa perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan melalui pendidikan, advokasi kebijakan, dan praktik operasional yang ramah lingkungan.

Sebagai pusat informasi dan literasi, perpustakaan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) dalam menyediakan akses terhadap sumber daya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keberlanjutan. Melalui penyebaran informasi berbasis bukti, perpustakaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

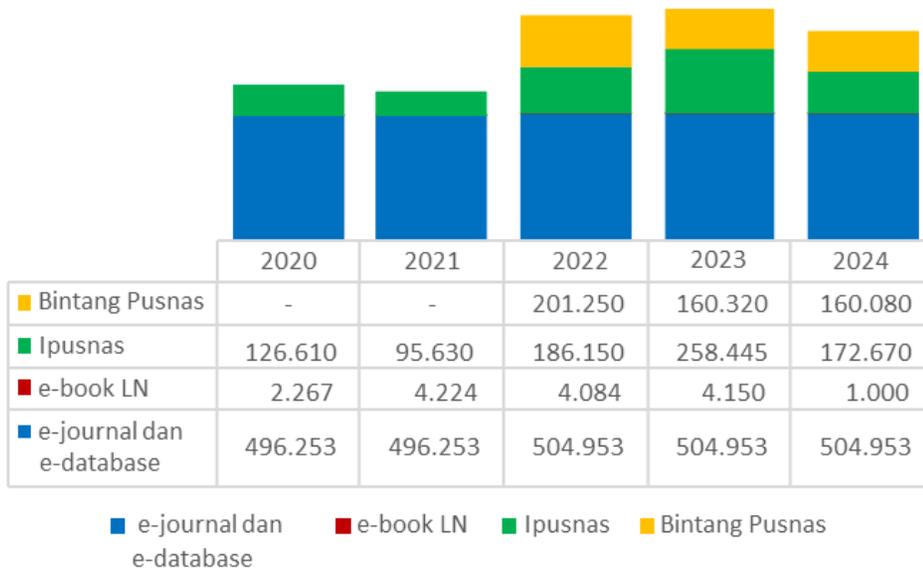
Untuk mengurangi dampak ekologis, perpustakaan di seluruh dunia mulai menerapkan berbagai strategi berkelanjutan. Langkah-langkah ini mencakup digitalisasi koleksi guna mengurangi konsumsi kertas, pemanfaatan teknologi hemat energi, serta perancangan bangunan yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Selain itu, perpustakaan juga dapat berkontribusi dengan menerapkan kebijakan penggunaan kertas daur ulang, membatasi pencetakan yang tidak perlu, serta bekerja sama dengan penerbit yang menerapkan prinsip keberlanjutan. Inisiatif seperti program donasi dan daur ulang buku menjadi solusi efektif untuk memperpanjang siklus hidup bahan cetak sekaligus mengurangi limbah dan jejak karbon.

Dalam skala global, IFLA bekerja sama dengan organisasi seperti *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* dan *United Nations Environment Programme (UNEP)* dalam mengembangkan berbagai program edukatif yang bertujuan meningkatkan literasi iklim. Lokakarya, pameran, serta diskusi publik yang melibatkan komunitas menjadi bagian dari upaya ini, menjadikan perpustakaan sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran akan keberlanjutan.

Peran perpustakaan sebagai agen perubahan semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk krisis yang muncul secara tiba-tiba, seperti pandemi COVID-19. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun 2020 hingga 2022 mempercepat transformasi perpustakaan menuju layanan digital. Perubahan besar yang terjadi pada masa itu salah satunya berdampak pada pola perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan mengakses informasi. Dengan keterbatasan aktivitas luar ruangan, teknologi digital menjadi andalan. Pembatasan fisik selama pandemi mendorong perpustakaan untuk memperluas akses digital, seperti koleksi buku elektronik dan jurnal daring. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi konsumsi sumber daya konvensional, termasuk kertas dan energi, sejalan dengan upaya keberlanjutan yang didukung oleh berbagai organisasi global.

Perpustakaan Nasional melakukan akuisisi koleksi buku dan jurnal digital untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang dapat diakses melalui aplikasi *Ipusnas*, *Bintang Pusnas*, dan *eResources*.

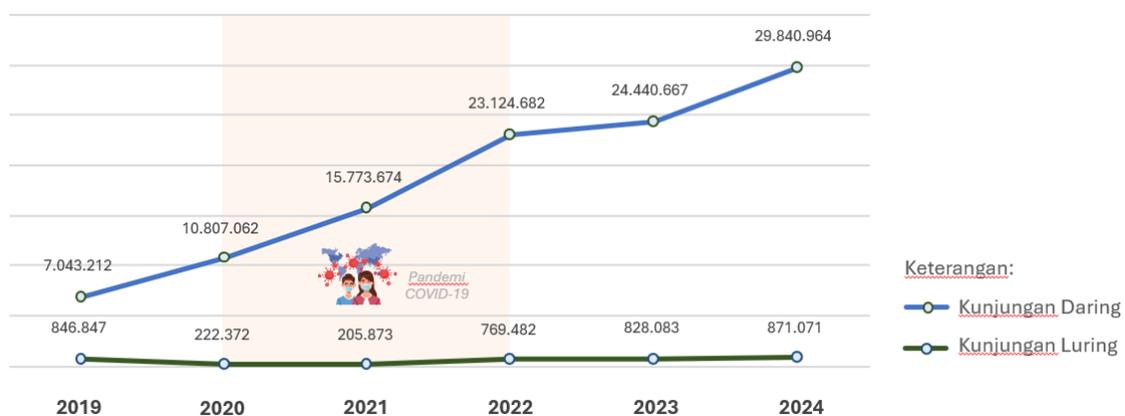
Grafik 1.1 Data Koleksi Digital Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, 2024

Dengan menerapkan kebijakan ramah lingkungan dan memperkuat literasi iklim, perpustakaan dapat berperan sebagai motor penggerak perubahan dalam menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan lestari. Pandemi juga turut mengakselerasi perpustakaan untuk menyesuaikan diri dengan meningkatkan layanan digital agar masyarakat tetap dapat mengakses informasi. Pergeseran penyediaan bahan bacaan ke dalam format digital dan layanan yang interaktif di masa pandemi terbukti dapat membantu pengguna menelusuri informasi secara lebih mudah di tengah pembatasan sosial.

Grafik 1.2 Jumlah Pemustaka yang Memanfaatkan Layanan Tahun 2019-2024



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

Data pemanfaatan layanan Perpustakaan Nasional Indonesia selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan, khususnya pada layanan berbasis digital. Total akses layanan daring meningkat tajam dari 7.043.212 pada tahun 2019 menjadi 29.840.964 pada tahun 2024. Kenaikan paling drastis terjadi pada masa pandemi COVID-19 (2020-2022) dan

terus meningkat hingga pasca-pandemi, menandakan adaptasi masyarakat terhadap platform layanan informasi digital.

Tabel 1.1 Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Nasional Tahun 2019-2024

No	Kunjungan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indonesia One Search	3.381.325	4.806.159	8.543.263	12.666.532	12.474.932	2.981.767
2	iPusnas	288.281	532.498	525.072	451.252	581.594	629.971
3	e-Resources	798.118	762.992	444.023	438.552	517.099	3.081.422
4	OPAC Perpusnas	879.595	3.021.454	4.316.780	7.702.614	10.258.390	9.703.551
5	Portal Web www.perpusnas.go.id	85.202	1.231.605	1.800.523	1.676.256	3.416.561	9.472.105
6	Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara)	7.850	49.684	104.905	153.115	176.678	943.820
7	Agenda		8.801	17.987	21.571	1.494	-
8	Livechat	-	-	17.827	12.839	10.971	10.165
9	Email	-	-	3.294	1.951	2.948	1.749
10	Deposit	20.228	70.361	-	-	-	-
11	Web Tematik	1.182.613	323.508	-	-	-	-
12	BintangPusnas Edu	-	-	-	-	-	3.016.414
	TOTAL DARING (ONLINE)	7.043.212	10.807.062	15.773.674	23.124.682	24.440.667	29.840.964
	TOTAL LURING (ONSITE)	846.847	222.372	205.873	769.482	828.083	871.071
	TOTAL ONLINE + ONSITE	7.890.059	11.029.434	15.979.547	23.894.164	25.268.750	30.712.035

Sumber: Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara, 2024

Layanan *Indonesia One Search* (IOS) mendominasi trafik akses selama lima tahun berturut-turut, dengan puncaknya pada tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing mencatat lebih dari 12 juta kunjungan, meskipun mengalami penurunan drastis pada 2024 menjadi hanya 2,98 juta. Penurunan ini sebagai imbas dari server IOS yang diletakkan PDN mengalami serangan sehingga IOS tidak dapat diakses. Faktor lain yang menyebabkan menurunnya jumlah masyarakat dalam memanfaatkan IOS untuk pencarian literatur dan sumber informasi karena infrastruktur (server) perlu penambahan kapasitas memori. Hal ini menyebabkan akses terhadap IOS lambat dan sering gagal akses yang menyebabkan masyarakat meninggalkan IOS sebagai salah satu *tools* pencarian sumber informasi. Terkait hal ini, Perpustakaan Nasional telah berupaya mengajukan peremajaan server dengan penambahan memori kepada pihak PDN. Dengan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses IOS diharapkan akan meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkannya. Namun, kehadiran layanan baru seperti BintangPusnas Edu pada tahun 2024 juga menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap media pembelajaran digital, terbukti dengan jumlah akses yang mencapai lebih dari 3 juta dalam tahun pertama.

Di sisi lain, layanan perpustakaan fisik (*onsite*) yang sempat turun di angka 200 ribuan pengunjung selama 2020 hingga 2021 mulai menunjukkan pemulihan signifikan pasca-pandemi, yaitu 769.482 pengunjung pada 2022 dan terus meningkat menjadi lebih dari 800 ribu pada 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun digitalisasi layanan mengalami lonjakan besar, peran perpustakaan sebagai ruang fisik tetap relevan dan diminati. Namun demikian, sejumlah layanan interaktif seperti *Livechat*, *Email*, dan *Agenda* masih menunjukkan angka pemanfaatan yang relatif rendah,

menandakan perlunya strategi promosi dan integrasi layanan yang lebih baik untuk meningkatkan *engagement* pengguna.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa transformasi digital perpustakaan telah berlangsung secara progresif dan berdampak positif terhadap peningkatan akses informasi publik. Namun, keberhasilan ini perlu diiringi dengan penguatan kualitas infrastruktur digital, pengembangan kompetensi pustakawan digital, serta penyempurnaan strategi komunikasi layanan agar pemanfaatan dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Salah satu kunci untuk menghadapi perubahan ini adalah dengan menyusun Renstra Perpustakaan Nasional 2025-2029, yang dapat memastikan perpustakaan tidak hanya beradaptasi dengan tuntutan saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga global, sebagaimana yang diidentifikasi oleh IFLA dalam *IFLA Trend Report 2024*. Laporan tersebut menggarisbawahi sejumlah tren global seperti perubahan dalam cara masyarakat mengakses informasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk memperkuat keterampilan digital dan inklusivitas sosial.

Gambar 1.1 *Trend Report 2024*



Sumber: IFLA, 2024

Perpustakaan Nasional perlu merumuskan strategi integratif untuk mengadopsi temuan *IFLA Trend Report 2024* ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, guna memperkuat peranannya dalam peningkatan literasi masyarakat dan mendorong pembangunan sosial yang inklusif. Melalui pemanfaatan inovasi teknologi, penguatan kapasitas pustakawan, dan pengembangan layanan berbasis kebutuhan masa depan, Perpustakaan Nasional dapat menjadi aktor utama dalam ekosistem informasi nasional serta membentuk tata kelola pengetahuan yang adaptif dan berkelanjutan.

1. Perubahan Praktik Pengetahuan

Saat ini, praktik pengetahuan tengah mengalami pergeseran besar, seiring dengan semakin tingginya perhatian terhadap penentuan dengan apa yang dapat diterima sebagai ‘pengetahuan’. Proses ini menciptakan peluang untuk mengintegrasikan beragam perspektif yang lebih luas, sekaligus memperkuat legitimasi pengetahuan yang lebih inklusif. Namun, tantangan besar juga muncul dengan semakin meluasnya misinformasi, yang memerlukan strategi baru dalam verifikasi dan penyaringan informasi agar kualitas pengetahuan tetap terjaga.

2. Transformasi oleh Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Baru

Kecerdasan Artifisial (KA) dan teknologi generatif lainnya tidak hanya merombak cara kita menciptakan dan berbagi informasi, tetapi juga membuka potensi untuk mempercepat inovasi di berbagai sektor. Sementara teknologi ini membawa peluang, seperti peningkatan efisiensi dan keterlibatan yang lebih tinggi, ada risiko terkait disinformasi yang harus dikelola dengan cermat. Teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengamanan dan kredibilitas informasi, menciptakan ekosistem informasi yang lebih aman dan transparan.

3. Renegosiasi Kepercayaan terhadap Institusi

Kepercayaan publik terhadap pemerintah, media, dan institusi sosial kini berada dalam titik kritis. Untuk memastikan kemajuan sosial, sangat penting untuk merancang strategi yang dapat memperbarui dan memperkuat kepercayaan ini, dengan fokus pada keterbukaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak privasi. Proses ini membutuhkan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk institusi pemerintahan, media, dan masyarakat sipil, untuk membangun kembali integritas publik yang tergerus.

4. Kompleksitas Keterampilan dan Kemampuan

Untuk menghadapi tantangan masa depan, diperlukan pengembangan keterampilan yang lebih komprehensif, meliputi keterampilan praktis, kemampuan berpikir kritis, serta literasi digital yang tinggi. Masyarakat yang dapat mengembangkan kemampuan ini akan memperoleh keuntungan strategis dalam beradaptasi dengan perubahan yang cepat, sementara mereka yang tidak mampu bersaing berisiko tertinggal. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi menjadi suatu kebutuhan mendesak.

5. Ketimpangan Distribusi Teknologi Digital

Ketidakmerataan dalam distribusi teknologi digital merupakan hambatan besar dalam mencapai kesetaraan sosial. Penyediaan akses yang lebih adil terhadap teknologi dan platform digital menjadi krusial dalam mengurangi ketimpangan yang ada. Di sisi lain, transisi ke layanan berbasis digital dapat mempercepat inklusi sosial jika didorong oleh kebijakan yang tepat. Pengembangan kebijakan inklusif yang memperhatikan keberagaman akses akan mendorong terciptanya sistem informasi yang lebih adil dan merata.

6. Penggunaan Sumber Daya dalam Sistem Informasi

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan informasi, muncul tekanan besar terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan ini, adopsi prinsip ekonomi hijau dalam pengelolaan sistem informasi akan menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pencapaian keadilan sosial. Pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan pengelolaan limbah elektronik yang lebih baik harus menjadi prioritas dalam kebijakan teknologi.

7. Membangun Koneksi Komunitas

Dalam era yang semakin terhubung, menciptakan ruang komunitas—baik fisik maupun digital—untuk berbagi sumber daya dan informasi akan memperkuat jaringan sosial yang inklusif dan kolaboratif. Inisiatif lokal dan platform komunitas daring memiliki potensi besar dalam mengurangi isolasi sosial dan memperkuat hubungan antar individu. Selain itu, pergeseran menuju pola kerja yang lebih fleksibel dapat memfasilitasi terciptanya koneksi

yang lebih erat dalam masyarakat, memberikan keuntungan strategis bagi pengembangan komunitas yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Perpustakaan Nasional dihadapkan pada tantangan besar yang menuntut langkah strategis untuk masa depan, sebagaimana diuraikan dalam IFLA *Trend Report 2024*. Melalui Renstra 2025-2029, Perpustakaan Nasional memiliki peluang besar untuk mengatasi isu kesenjangan akses, literasi informasi, dan keberlanjutan sumber daya. Fokus utamanya mencakup inovasi berkelanjutan, peningkatan akses digital yang inklusif, serta pemberdayaan tenaga perpustakaan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Kolaborasi di tingkat nasional dan global akan memperkuat posisi perpustakaan dalam menghadapi tantangan digital, sekaligus menjaga relevansi perpustakaan sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Renstra ini menjadi landasan penting dalam transformasi Perpustakaan Nasional menjadi lembaga yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi dan program literasi yang komprehensif, Perpustakaan Nasional dapat terus berkontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang lebih berpengetahuan, adil, dan siap menghadapi tantangan kompleks di era digital.

1.1.2 Literasi Indonesia

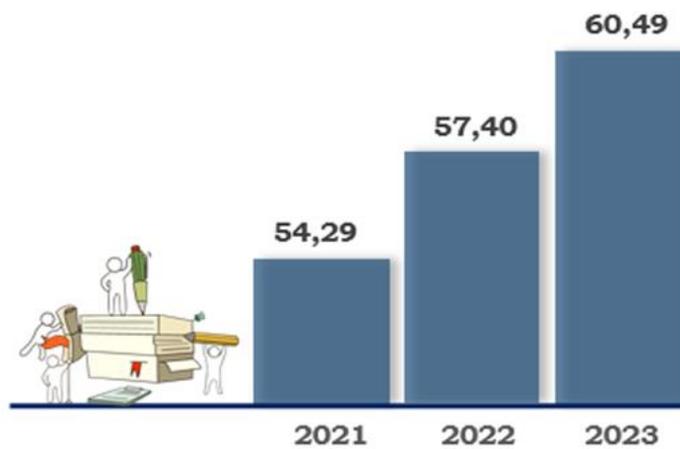
Budaya literasi memainkan peran penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup pemahaman, analisis, dan aplikasi informasi secara kritis. Dengan kata lain, budaya literasi yang kuat akan membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, mendorong inovasi, serta berkontribusi secara produktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Nilai budaya literasi mencerminkan kemampuan individu dan masyarakat dalam memahami, menganalisis, serta memanfaatkan berbagai bentuk teks dan media secara mendalam. Literasi ini mencakup aspek membaca, menulis, numerik, digital, dan kritis, yang memungkinkan seseorang mengolah informasi secara efektif serta membuat keputusan berbasis pengetahuan. Dengan tingkat literasi yang tinggi, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga berkontribusi pada kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Lebih dari sekadar meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi, literasi juga berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam hal ini, perpustakaan memainkan peran strategis sebagai lembaga yang menyediakan akses luas terhadap berbagai sumber daya pendidikan, baik dalam bentuk buku, media digital, maupun informasi lainnya. Melalui program literasi yang inovatif, perpustakaan tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga mendorong pemikiran kritis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan modern.

Berdasarkan laporan Kementerian Kebudayaan, budaya literasi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dengan nilai yang naik dari 54,29 poin pada tahun 2021 menjadi 60,49 poin pada tahun 2023, sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1.3.

Grafik 1.3 Nilai Budaya Literasi Nasional Tahun 2021-2023



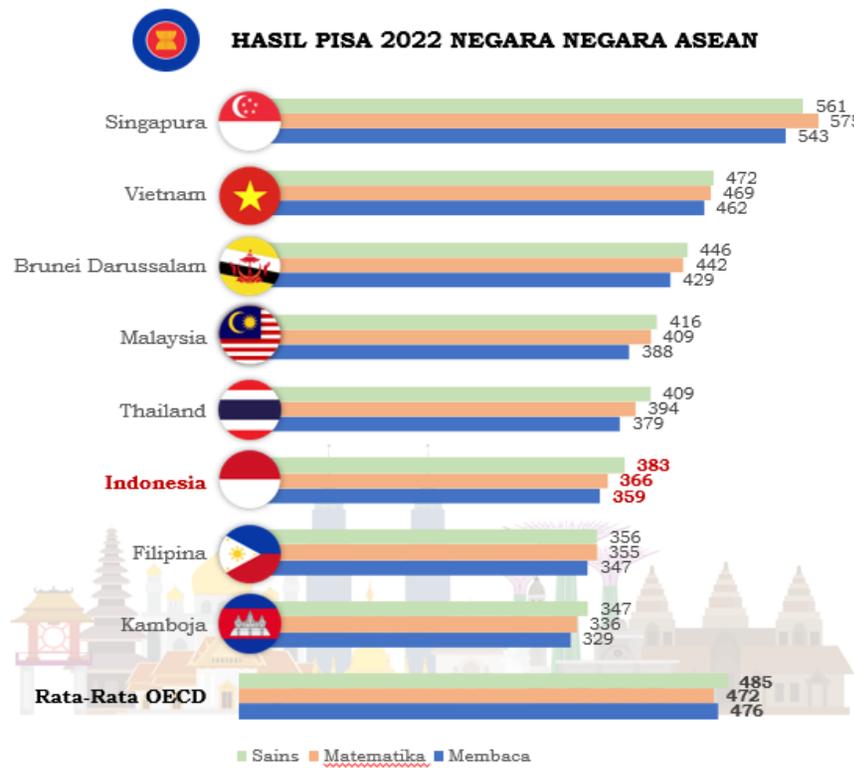
Sumber: Kementerian Kebudayaan

Peningkatan sebesar 6,2% ini menunjukkan adanya kemajuan dalam usaha meningkatkan kecakapan literasi masyarakat dan mencerminkan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

Kemajuan ini semakin menegaskan bahwa kemampuan literasi merupakan aspek fundamental dalam pendidikan, tidak hanya untuk kebutuhan akademis tetapi juga sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dan teknologi. Literasi tidak lagi sekadar kemampuan membaca, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis dan analitis yang esensial bagi perkembangan individu serta kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan literasi di Indonesia menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan kualitas pendidikan nasional. Namun, hasil *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022* yang dirilis oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menunjukkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Skor literasi membaca siswa Indonesia dalam PISA 2022 masih berada di bawah rata-rata negara-negara OECD, mencerminkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam aspek pemahaman bacaan dan keterampilan berpikir kritis.

Grafik 1.4 Perbandingan PISA di antara Negara ASEAN



Hasil ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam budaya literasi secara nasional, masih diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan literasi siswa, termasuk melalui inovasi dalam metode pembelajaran, peningkatan akses terhadap bahan bacaan bermutu, serta penguatan peran perpustakaan dan teknologi digital dalam mendukung pendidikan literasi. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, diharapkan kemampuan literasi siswa Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sehingga lebih siap menghadapi tantangan di era globalisasi dan teknologi.

Perpustakaan memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian literasi siswa yang optimal. Sebagai pusat sumber daya informasi, perpustakaan dapat menjadi mitra strategis bagi sekolah, guru, dan keluarga dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi perkembangan literasi.

1.1.3 Kegemaran Membaca

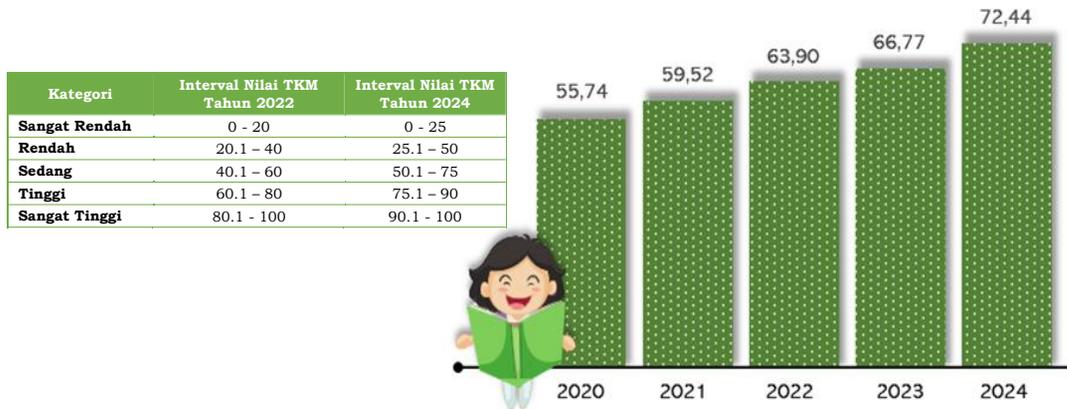
Kegemaran membaca berperan penting dalam membentuk individu yang berpengetahuan dan teredukasi. Kegemaran membaca bukan hanya sekadar kemampuan untuk membaca, tetapi juga mencakup ketertarikan yang mendalam terhadap buku dan bahan bacaan lainnya. Lingkungan yang mendukung, seperti perpustakaan, komunitas baca, dan dukungan keluarga, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan minat membaca.

Perpustakaan Nasional selama 5 tahun periode Renstra 2020-2024 mengukur Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) melalui survei yang bertujuan untuk mengidentifikasi minat dan kebiasaan membaca di masyarakat. Indikator dalam pengukuran tersebut meliputi frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Survei ini mencakup 514 Kabupaten/Kota dengan responden berusia 10-69 tahun dari

berbagai latar belakang sosial-ekonomi guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang budaya membaca di Indonesia.

Berdasarkan data laporan akhir kajian TKM masyarakat Indonesia tahun 2024, terdapat nilai TKM dengan tren positif, sebagaimana pada grafik 1.5 berikut:

Grafik 1.5 Capaian TKM tahun 2020-2024



Sumber: Kajian Tingkat Kegemaran Membaca 2020-2024 (diolah)

Grafik 1.5 di atas menggambarkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia dalam kategori sedang. Minimnya kegemaran membaca di Indonesia dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap buku, biaya yang tinggi, serta kurangnya motivasi dari lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi inovatif seperti perpustakaan keliling, taman bacaan, perpustakaan komunitas, dan program membaca bersama guna meningkatkan akses terhadap buku. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi efektif dalam memperluas jangkauan bacaan. Pemerintah, melalui Perpustakaan Nasional, memiliki peran strategis dalam membangun budaya membaca dengan meningkatkan aksesibilitas bahan bacaan, mengadakan program literasi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menarik minat masyarakat, terutama generasi muda.

1.1.4 Pembangunan Literasi Masyarakat

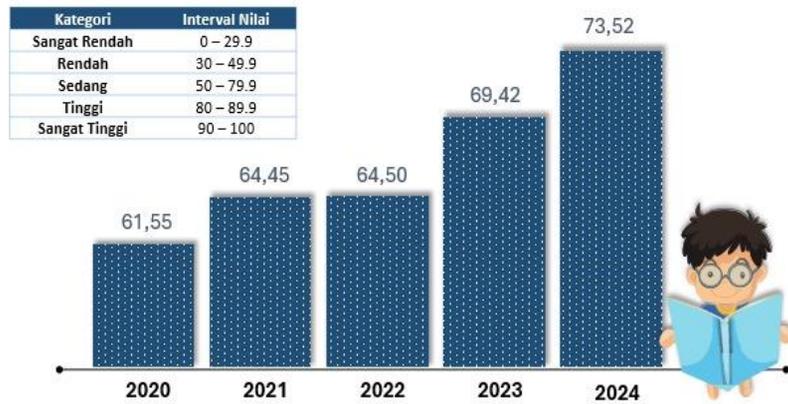
IFLA menegaskan bahwa akses yang memadai terhadap perpustakaan dan sumber daya informasi merupakan faktor kunci dalam mendukung literasi di berbagai komunitas. Namun keterbatasan akses ke sumber daya literasi saat ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pembangunan literasi di masyarakat.

Pada berbagai wilayah, terutama wilayah terpencil dan kurang berkembang, akses terhadap sumber daya literasi seperti ketersediaan perpustakaan, buku, dan teknologi informasi masih sangat minim. Selain itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah tidak menganggap bahwa literasi sebagai sebuah kebutuhan sehingga tidak berupaya untuk memenuhi kebutuhan literasi di dalam keluarganya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap sumber daya literasi agar masyarakat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidupnya.

Sejak periode Renstra 2020-2024, Perpustakaan Nasional telah mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang menunjukkan tren

peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan perkembangan positif dalam upaya peningkatan literasi masyarakat, sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1.6 berikut.

Grafik 1.6 Capaian IPLM tahun 2020-2024



Sumber: Kajian IPLM 2020-2024 (diolah)

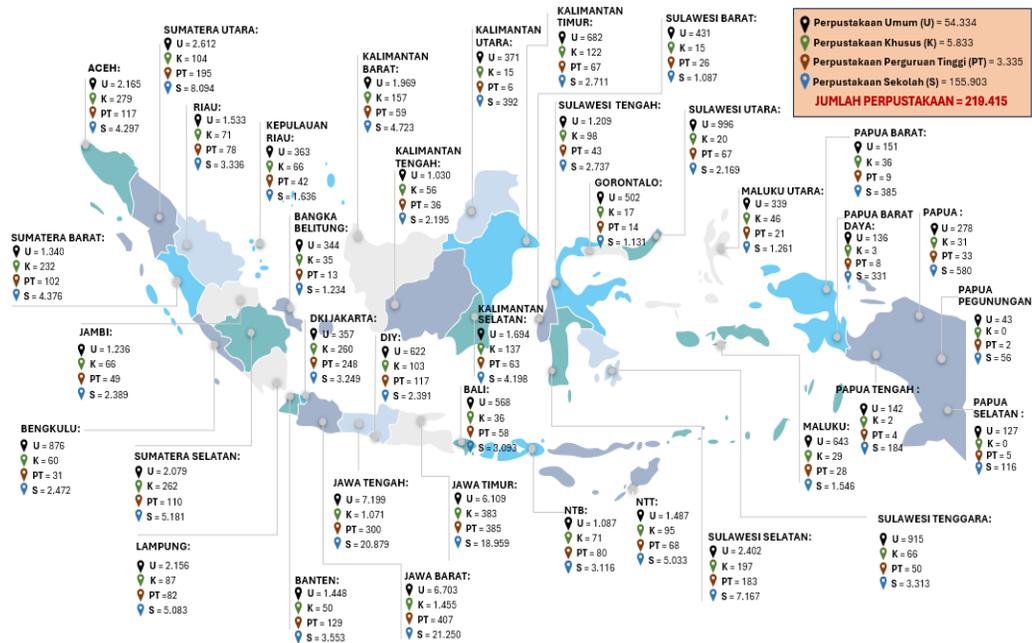
Pengukuran IPLM dilakukan untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan

Pemerataan layanan perpustakaan merupakan inisiatif untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang setara, adil, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti kemudahan akses fisik, ketersediaan bahan bacaan, penyelenggaraan program dan layanan, serta peningkatan keterlibatan komunitas dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi dan informasi.

Berdasarkan data.perpusnas.go.id per 31 Desember 2024 terdapat 219.415 perpustakaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Distribusi jumlah perpustakaan di setiap provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

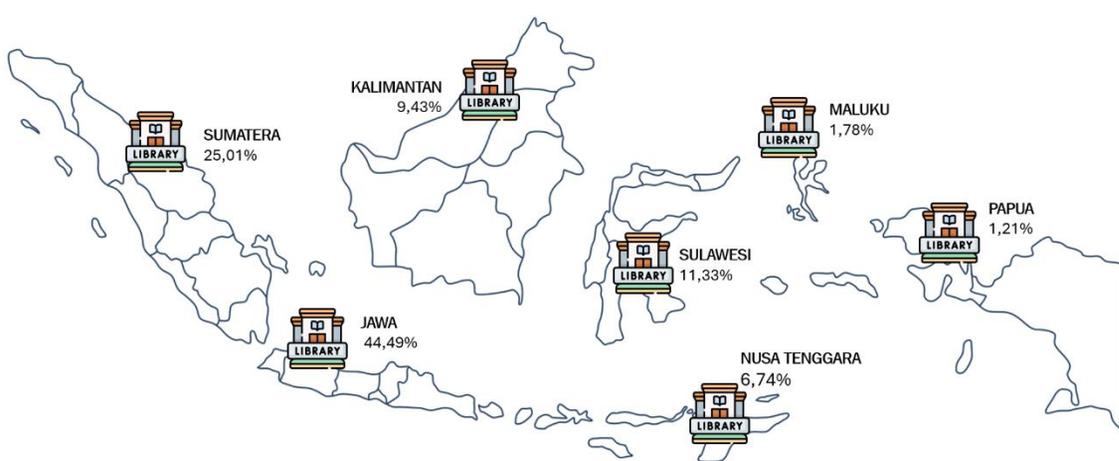
Gambar 1.2 Peta Jumlah Perpustakaan di Seluruh Wilayah Indonesia



Sumber: data.perpusnas.go.id, 31 Desember 2024

Berdasarkan data jumlah perpustakaan di setiap provinsi yang ditampilkan pada Gambar 1.2 di atas, diketahui bahwa distribusi persentase perpustakaan di berbagai wilayah kepulauan Indonesia sebagai berikut.

Gambar 1.3 Peta persebaran jumlah perpustakaan di wilayah kepulauan Indonesia



Sumber: data.perpusnas.go.id, 31 Desember 2024

Berdasarkan peta persebaran jumlah perpustakaan di Indonesia pada Gambar 1.3 di atas, dapat diketahui bahwa:

- Pulau Jawa memiliki perpustakaan dengan jumlah terbanyak yaitu 44,49% dari total perpustakaan di Indonesia. Hal ini menunjukkan konsentrasi perpustakaan yang tinggi di wilayah dengan populasi terbesar dan pusat-pusat pendidikan utama.
- Pulau Sumatera berada di peringkat kedua dengan 25,01%, yang menunjukkan sebaran perpustakaan cukup merata di wilayah ini, meskipun masih jauh di bawah Jawa.
- Pulau Sulawesi menyumbang 11,33%, yang menunjukkan distribusi perpustakaan lebih rendah dibanding Sumatera dan Jawa, tetapi masih cukup signifikan dibanding wilayah lainnya.
- Pulau Kalimantan memiliki 9,43% dari total perpustakaan di Indonesia. Angka ini menunjukkan akses terhadap perpustakaan masih terbatas, kemungkinan karena faktor geografis dan kepadatan penduduk yang lebih rendah.
- Wilayah Nusa Tenggara hanya memiliki 6,74% perpustakaan, menunjukkan jumlah fasilitas perpustakaan yang lebih sedikit dibandingkan wilayah lain yang lebih padat penduduknya.
- Wilayah Maluku dan Papua memiliki jumlah perpustakaan paling sedikit, dengan masing-masing 1,78% dan 1,21%. Hal ini dapat menunjukkan tantangan dalam penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah ini, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor geografis, infrastruktur, dan aksesibilitas.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa distribusi perpustakaan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia memiliki akses yang lebih terbatas. Hal ini dapat menjadi perhatian dalam upaya pemerataan layanan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia.

2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

IFLA/UNESCO menetapkan standar ideal rasio ketercukupan koleksi perpustakaan terhadap jumlah penduduk sebesar 2:1, yang berarti setiap satu penduduk idealnya memiliki akses terhadap dua koleksi. Berdasarkan laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga semester pertama tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 281.603.800 jiwa, sehingga untuk memenuhi standar IFLA/UNESCO, Indonesia seharusnya memiliki 563.207.600 eksemplar koleksi di seluruh perpustakaan. Namun, angka tersebut masih belum tercapai mengingat jumlah judul koleksi di seluruh perpustakaan Indonesia yang tersedia berdasarkan data.perpusnas.go.id dan data koleksi Perpustakaan Nasional sebanyak 254.089.925 eksemplar (tabel 1) dan jika dibandingkan dengan populasi penduduk, maka Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Indonesia terhadap jumlah penduduk adalah sekitar 0,9:1, yang berarti setiap satu penduduk rata-rata hanya memiliki akses ke kurang dari satu eksemplar koleksi, masih jauh dari standar ideal 2:1 yang ditetapkan IFLA/UNESCO. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup besar dalam memenuhi standar ketercukupan koleksi perpustakaan di Indonesia.

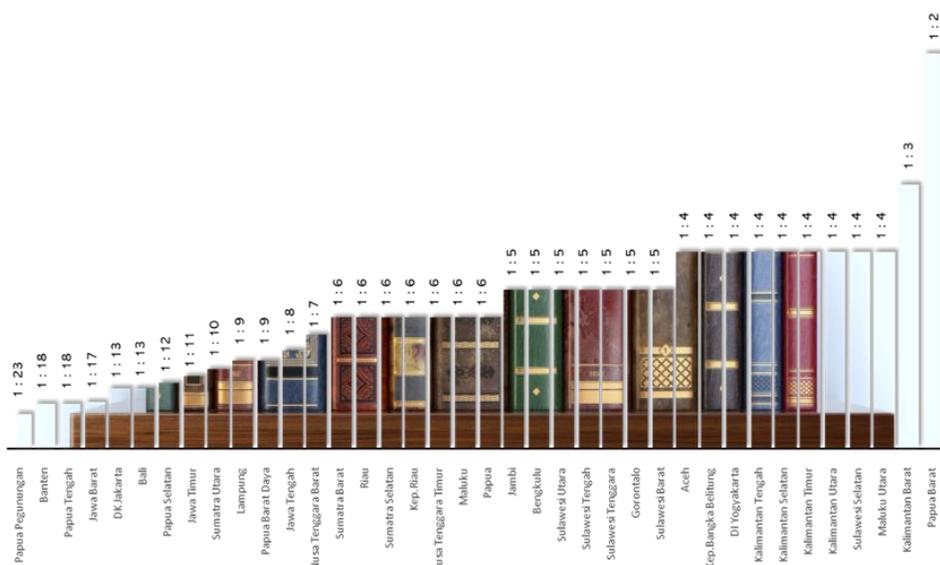
Tabel 1.2 Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan Seluruh Indonesia

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	Perpustakaan Umum	11.174.813	26.637.391
2	Perpustakaan Sekolah	32.649.953	181.455.093
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	10.456.582	29.062.638
4	Perpustakaan Khusus	1.776.912	7.103.077
5	Perpustakaan Nasional	3.530.521	9.831.726
Total		59.588.781	254.089.925

Sumber: data.perpusnas.go.id dan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan per tahun 2024

Berdasarkan data jumlah judul koleksi perpustakaan di setiap jenis perpustakaan yang ditampilkan pada tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa rasio ketercukupan koleksi perpustakaan di wilayah Indonesia sebagai berikut:

Grafik 1.7 Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan berdasarkan Populasi di setiap Provinsi Tahun 2024



Sumber: Kajian IPLM Tahun 2024

Berdasarkan grafik 1.7 di atas bahwa terdapat ketidakmerataan rasio koleksi di setiap provinsi di Indonesia, rasio paling rendah terdapat di Papua Pegunungan di mana ketercukupan koleksinya hanya 1 : 23, sedangkan tertinggi adalah di Papua Barat dengan ketercukupan koleksi sebesar 1 : 2.

3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

Tenaga perpustakaan mengacu pada tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan di perpustakaan. Mereka adalah individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam bidang perpustakaan dan informasi, serta memiliki peran penting dalam memastikan operasional perpustakaan yang efektif dan berkualitas (IFLA, 2018).

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional tahun 2024, jumlah tenaga perpustakaan di Indonesia dapat dilihat sebagaimana tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Perpustakaan di Seluruh Indonesia

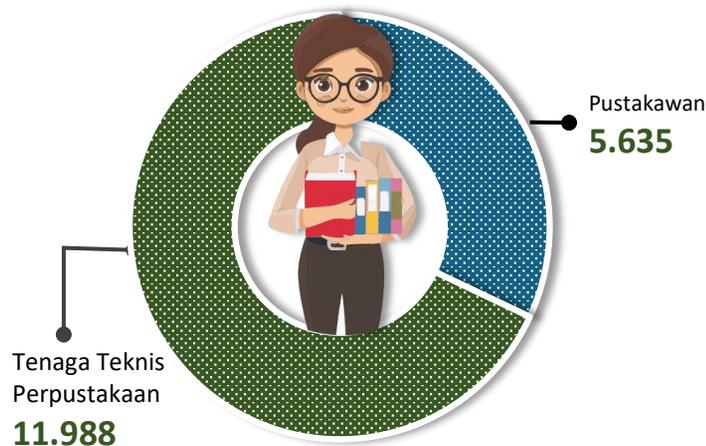
No	Jenis Perpustakaan	Pustakawan	Tenaga Teknis Perpustakaan	Total Tenaga Perpustakaan
1	Perpustakaan Umum			
	(a) Perpustakaan Umum Provinsi	584	876	1.460
	(b) Perpustakaan Umum Kab/Kota	1.906	3.753	5.659
	(c) Perpustakaan Umum Kecamatan	33	469	502
	(d) Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	803	21.977	22.780
	(e) Perpustakaan Komunitas/TBM/Lainnya	3.098	4.985	8.083
2	Perpustakaan Sekolah			
	(a) Perpustakaan PAUD/RA/TK	827	484	1.311
	(a) Perpustakaan SD/MI	13.193	17.794	30.987
	(b) Perpustakaan SMP/MTs	7.742	9.833	17.575
	(c) Perpustakaan SMA/K/MA	6.179	8.044	14.223
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	4.769	3.562	8.331
4	Perpustakaan Khusus	2.044	1.872	3.916
5	Perpustakaan Nasional	719	380	1.099
	Total	41.897	74.029	115.926

Sumber: data.perpusnas.go.id, 2024 (diolah)

Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh UNESCO, idealnya satu pustakawan melayani maksimal 2.500 penduduk. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 281.603.800 jiwa pada semester pertama tahun 2024, berdasarkan laporan *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050* yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka kebutuhan minimal tenaga pustakawan di Indonesia mencapai 112.642 orang. Secara kuantitatif, data menunjukkan bahwa jumlah tenaga perpustakaan yang

tersedia telah mencapai 115.926 orang, sehingga secara jumlah telah melampaui standar yang ditetapkan. Namun demikian, jika dilihat dari sisi kualitas dan kompetensi, permasalahan yang signifikan muncul. Berdasarkan data dari situs resmi Perpustakaan Nasional (pustakawan.perpusnas.go.id) tahun 2024, hanya 17.623 orang atau sekitar 15,2% dari total tenaga perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi pustakawan.

Grafik 1.8 Jumlah Tenaga Perpustakaan Memiliki Kompetensi Tahun 2024



Sumber: Pusat Pembinaan Pustakawan dan Pusat Pendidikan Pelatihan Perpusnas, 2024

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang serius antara jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan di Indonesia. Meskipun secara kuantitas terpenuhi, rendahnya proporsi pustakawan yang kompeten dapat berdampak langsung pada kualitas layanan perpustakaan, akses terhadap informasi yang akurat, serta efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan literasi masyarakat. Untuk itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah tenaga pustakawan, tetapi juga pada peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi profesi, serta reformasi sistem rekrutmen dan pengembangan karier pustakawan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya transformasi perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang inklusif dan berdaya saing di era digital.

4. Tingkat Kunjungan Masyarakat

Tingkat kunjungan masyarakat per hari dapat terlihat dari jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat ke perpustakaan dari berbagai jenis perpustakaan yaitu perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan nasional, jumlah kunjungan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Indonesia

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah Kunjungan/Hari Tahun 2024
1	Perpustakaan Umum	253.124
	Perpustakaan Umum Provinsi	34.409
	Perpustakaan Umum Kab./Kota	95.773
	Perpustakaan Umum Kecamatan	6.459
	Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	116.483
2	Perpustakaan Sekolah	2.264.579
	Perpustakaan Sekolah SD/MI	1.131.570
	Perpustakaan Sekolah SMP/MTs.	552.007
	Perpustakaan Sekolah SMA/K/MA	581.002
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	327.568
4	Perpustakaan Khusus	55.160
5	Perpustakaan Nasional	84.143
Total		2.984.574

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Pada tahun 2024, data jumlah kunjungan harian ke perpustakaan menunjukkan dominasi yang kuat dari perpustakaan sekolah, yang mencatat angka sebesar 2.264.579 kunjungan per hari atau sekitar 76,2% dari total kunjungan. Hal ini menegaskan pentingnya peran perpustakaan sekolah, khususnya dalam menunjang kecakapan literasi di kalangan siswa, terutama di tingkat SD/MI yang menjadi penyumbang tertinggi dengan 1.131.570 kunjungan per hari. Di sisi lain, perpustakaan umum hanya mencatat 253.124 kunjungan per hari (8,5%), dengan mayoritas berasal dari perpustakaan desa/kelurahan yang mencapai 116.483 kunjungan per hari. Ini menggarisbawahi pentingnya keberadaan perpustakaan di tingkat komunitas. Perpustakaan perguruan tinggi juga menunjukkan pemanfaatan yang tinggi, dengan 327.568 kunjungan per hari (11%), mencerminkan kebutuhan akses informasi di lingkungan akademik. Sementara kunjungan rata-rata per hari di Perpustakaan Nasional cukup signifikan yaitu sebanyak 84.143 kunjungan karena selain secara *onsite*, Perpustakaan Nasional juga memiliki layanan digital yang dapat diakses secara *online*.

5. Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan

Salah satu prioritas utama dalam program kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah mendorong peningkatan jumlah perpustakaan yang memenuhi ketentuan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menegaskan pentingnya standardisasi guna menjamin mutu layanan perpustakaan di seluruh Indonesia. Melalui pemenuhan SNP, diharapkan seluruh jenis perpustakaan (baik sekolah, umum, khusus, maupun perguruan tinggi) mampu menyelenggarakan layanan informasi yang berkualitas, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna serta perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjadi kerangka hukum utama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam regulasi

tersebut adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara perpustakaan untuk merujuk pada SNP. SNP berfungsi sebagai acuan normatif yang menetapkan persyaratan minimal guna memastikan mutu dan konsistensi layanan perpustakaan di seluruh Indonesia. Standar ini berlaku untuk seluruh jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus.

Ruang lingkup SNP mencakup berbagai komponen penting seperti koleksi bahan pustaka, layanan pengguna, manajemen kelembagaan, infrastruktur, serta kompetensi tenaga perpustakaan. Dengan penerapan SNP, diharapkan perpustakaan mampu bertransformasi dari sekadar tempat penyimpanan informasi menjadi pusat pembelajaran yang aktif, mendukung literasi, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hingga tahun 2024, data Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa terdapat 219.415 perpustakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, hasil kajian IPLM tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya 98.742 perpustakaan yang telah dibina. Rincian perpustakaan yang dibina sesuai standar ini dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut.

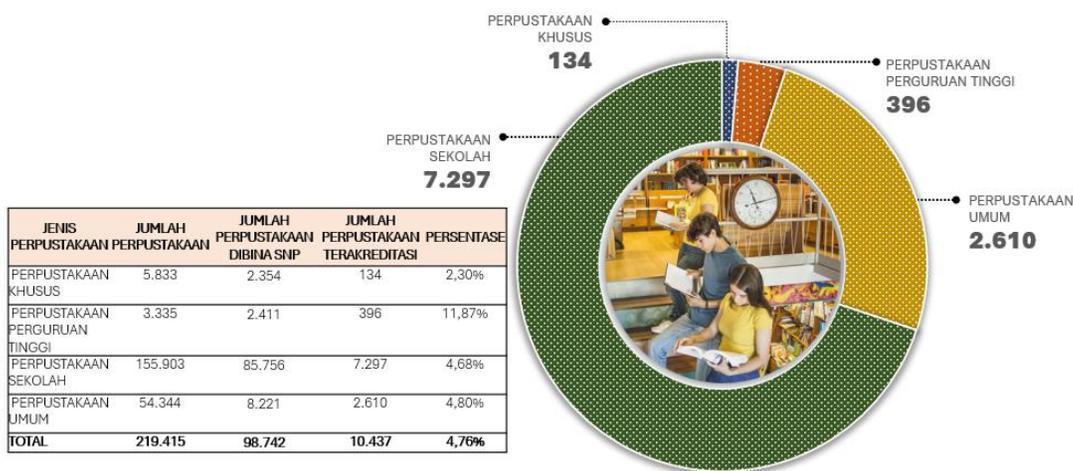
Tabel 1.5 Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah 2024
1	Perpustakaan Umum	
	(a) Perpustakaan Umum Provinsi	33
	(b) Perpustakaan Umum Kab/Kota	471
	(c) Perpustakaan Umum Kecamatan	287
	(d) Perpustakaan Umum Desa/Kel	7.430
2	Perpustakaan Sekolah	
	(a) Perpustakaan SD/MI	48.009
	(b) Perpustakaan SMP/MTs	21.444
	(c) Perpustakaan SMA/K/MA	16.303
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2.411
4	Perpustakaan Khusus	2.354
Total Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP		98.742

Sumber: Kajian IPLM Tahun 2024

Perpustakaan yang dibina sesuai standar ini telah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan, namun terbagi menjadi perpustakaan yang telah terakreditasi maupun belum terakreditasi. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, jumlah perpustakaan terakreditasi hingga Februari 2025 sebanyak 10.437 perpustakaan yang dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:

Grafik 1.9 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi



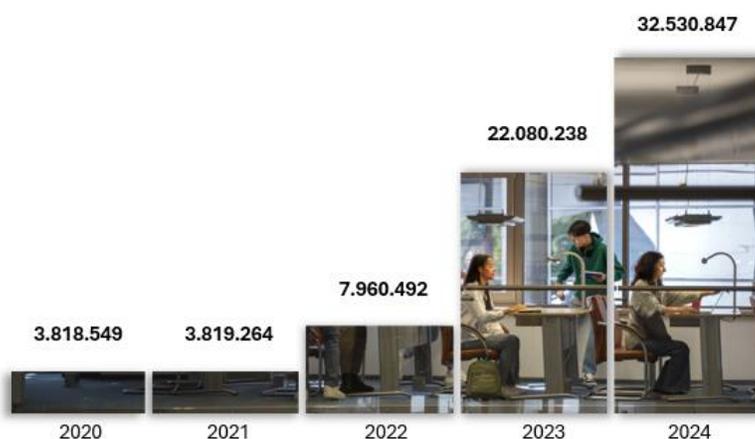
Sumber: Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, 2025 (diolah)

Disparitas yang tergambar pada jumlah perpustakaan baik yang dibina sesuai SNP maupun yang telah terakreditasi dari seluruh jumlah perpustakaan ini mencerminkan tantangan signifikan dalam peningkatan mutu perpustakaan nasional secara merata. Angka 10.437 ini setara 4,76% dari total perpustakaan yang ada di Indonesia. Fakta ini menggambarkan bahwa banyak perpustakaan di Indonesia yang masih belum memenuhi standar layanan yang diharapkan. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan rendahnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi, di antaranya adalah kurangnya sumber daya, baik dari segi pendanaan, fasilitas, maupun ketersediaan tenaga yang kompeten. Selain itu, faktor geografis juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi di Indonesia.

6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi/Promosi

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan promosi perpustakaan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam program perpustakaan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap peran perpustakaan dalam menyediakan informasi, pengetahuan, dan budaya. Kegiatan ini dapat meliputi diskusi, lokakarya, pertemuan, pameran, tur perpustakaan, penandatanganan kerja sama, dan program literasi lainnya. Program yang melibatkan masyarakat ini ditujukan dalam rangka meningkatkan kesadaran, mempererat hubungan antara perpustakaan dan masyarakat, serta mempromosikan manfaat perpustakaan sebagai pusat pendidikan dan informasi.

Grafik 1.10 Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi/Promosi Perpustakaan 2020-2024



Sumber: Kajian IPLM Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada tahun 2020 dan 2021, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan relatif stagnan, masing-masing mencatat total sekitar 3,8 juta partisipasi, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas publik. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan lebih dari dua kali lipat menjadi hampir 8 juta partisipasi, menandai kembalinya aktivitas masyarakat serta keberhasilan awal program sosialisasi pascapandemi. Tren ini semakin menguat di tahun 2023 dengan peningkatan drastis hingga mencapai lebih dari 22 juta, menunjukkan upaya promosi yang semakin masif dan efektif. Peningkatan tetap berlanjut di tahun 2024 dengan total keterlibatan mencapai 32,5 juta, yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi dan informasi.

Peningkatan tersebut akibat dari berbagai kegiatan perpustakaan meliputi Promosi Perpustakaan, Program Pengembangan Budaya Baca dan Literasi, serta Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial dan Pendayagunaan Koleksi. Berbagai kegiatan perpustakaan tersebut menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perpustakaan.

7. Anggota Perpustakaan

Anggota perpustakaan merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan keterikatan (*engagement*) antara masyarakat dengan perpustakaan. Hingga tahun 2024 tercatat jumlah anggota perpustakaan secara nasional sebanyak 54.991.941 pemustaka.

Tabel 1.6 Jumlah Anggota Perpustakaan seluruh Indonesia

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Perpustakaan Umum	13.183.584
	Perpustakaan Umum Provinsi	1.570.411
	Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota	4.686.158
	Perpustakaan Umum Kecamatan	118.101
	Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan	6.808.914
2	Perpustakaan Sekolah	31.827.881
	Perpustakaan Sekolah SD/MI	15.444.086

No.	Jenis Perpustakaan	Jumlah
	Perpustakaan Sekolah SMP/MTs.	8.613.537
	Perpustakaan Sekolah SMA/K/MA	7.770.258
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	5.979.334
4	Perpustakaan Khusus	531.804
5	Perpustakaan Nasional	3.469.338
Total		54.991.941

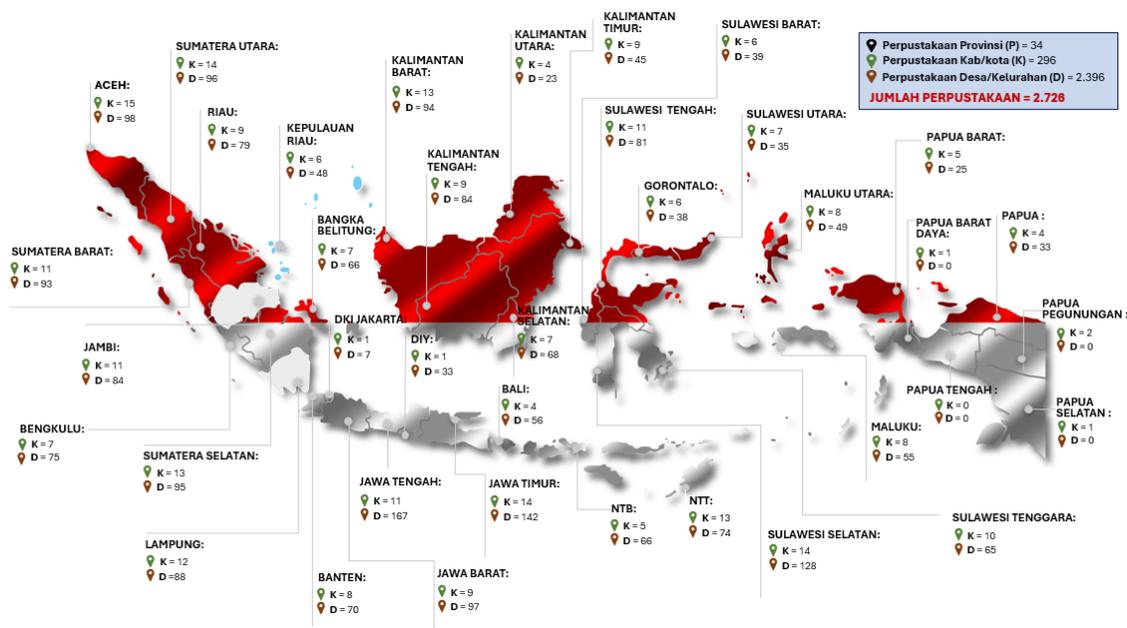
Sumber: Kajian IPLM Tahun 2024

Berbagai program pemanfaatan perpustakaan dan pembudayaan minat baca dilakukan untuk mendorong masyarakat lebih memanfaatkan perpustakaan. Selain itu, adanya program Kartu SAKTI (Satu Kartu Terintegrasi) serta kemudahan prosedur dalam pendaftaran anggota perpustakaan melalui layanan digital juga memberikan kontribusi bagi kenaikan jumlah anggota perpustakaan.

1.1.5 Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dalam upaya memperkuat budaya literasi nasional dan mendukung agenda pembangunan manusia, Perpustakaan Nasional telah menginisiasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sejak tahun 2018. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari prioritas nasional sejak tahun 2020 yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui literasi berbasis pemberdayaan. Transformasi yang dimaksud tidak sekadar melakukan modernisasi fasilitas dan peningkatan layanan perpustakaan, melainkan mengubah paradigma perpustakaan menjadi ruang terbuka yang inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan menjadi pusat pertumbuhan kreativitas, inovasi, serta pelestarian budaya lokal.

Gambar 1.4 Peta Sebaran Penerima Program TPBIS 2020-2024



Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, 2024

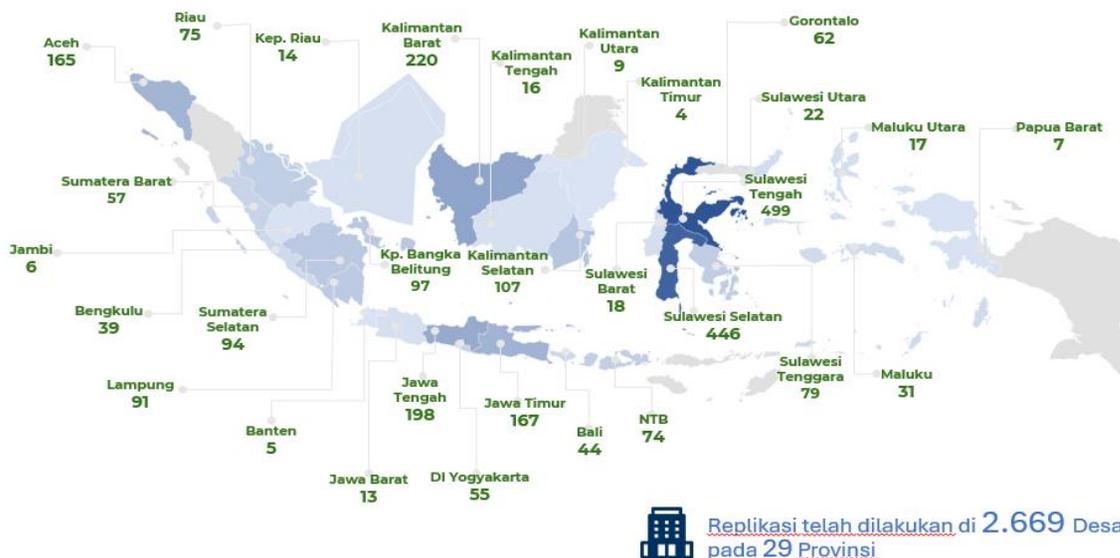
Pengembangan budaya literasi dalam program ini mencakup beberapa aspek strategis, yakni penguatan budaya gemar membaca, penyediaan dan pengayaan konten literasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, perluasan akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di samping itu, program ini

juga menekankan pentingnya penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, komunitas lokal, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil, guna menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan. Melalui pelatihan berbasis kebutuhan lokal, pengelola perpustakaan didorong untuk merancang program dan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, melainkan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang mampu mengidentifikasi potensi lokal, memperkuat keterampilan hidup, dan mendukung pengembangan usaha kecil berbasis komunitas.

Secara strategis, program ini juga mengedepankan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan manfaat perpustakaan. Keterlibatan aktif Pemerintah Daerah menjadi faktor krusial dalam replikasi dan skalabilitas program di berbagai wilayah, mengingat karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. Implementasi program di lapangan telah menunjukkan progres positif, antara lain peningkatan angka kunjungan ke perpustakaan, diversifikasi layanan perpustakaan, serta terbentuknya komunitas literasi yang aktif di tingkat lokal.

Gambar 1.5 Replikasi TPBIS Tahun 2018-2024



Sumber: Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, 2024

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional berbasis pengetahuan. Program ini tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, dan pembangunan komunitas berkelanjutan, tetapi juga memperkuat pondasi demokratisasi akses informasi dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi. Ke depan, kesinambungan dan penguatan program ini memerlukan komitmen multisektor dan inovasi berkelanjutan agar perpustakaan dapat terus bertransformasi menjadi katalis perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia.

1.1.6 Naskah Kuno Nusantara

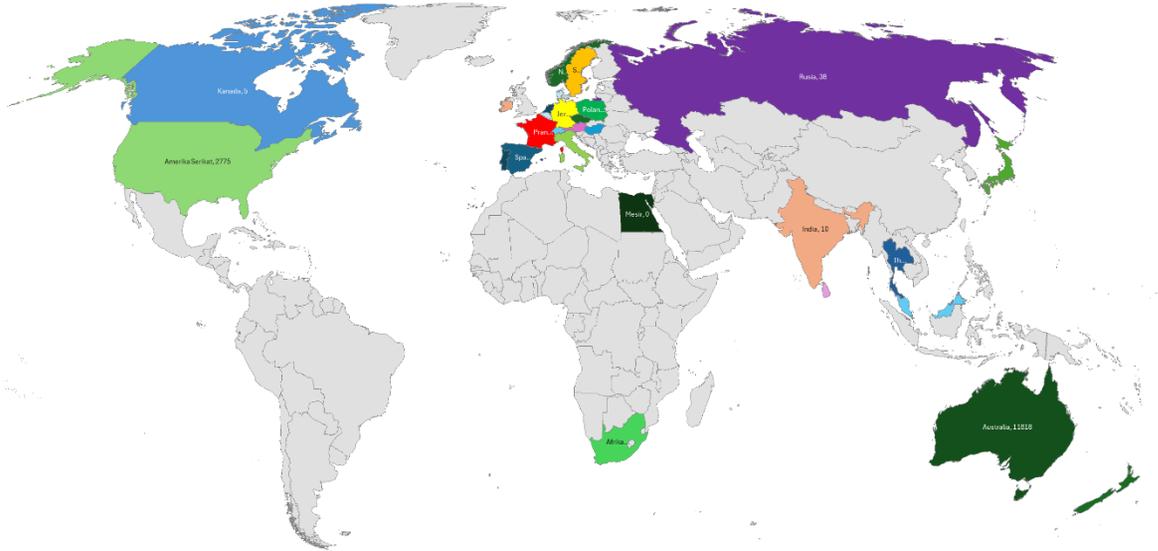
Naskah kuno Nusantara merupakan sumber daya strategis yang mencakup dokumentasi berbagai disiplin ilmu tradisional, mulai dari teknologi pertanian, kesehatan, arsitektur, hingga hukum adat dan spiritualitas. Saat ini, integrasi pengetahuan dari naskah kuno ke dalam kerangka riset dan pembuatan kebijakan publik masih belum maksimal. Selain fungsinya sebagai repositori ilmu, Naskah kuno Nusantara berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif melalui inovasi di sektor tekstil, literasi, kuliner, bahkan teknologi digital.

Dalam dunia digital, naskah berpeluang menjadi sumber inovasi. Misalnya, permainan edukatif berbasis nilai-nilai dalam naskah dapat dikembangkan untuk mengajarkan sejarah dan budaya lokal secara interaktif. Selain itu, platform pembelajaran daring berbasis naskah dapat memperkenalkan aksara dan bahasa tradisional Nusantara kepada *audience* global. Bahkan, kandungan naskah seperti resep kuliner tradisional juga dapat diadaptasi menjadi produk makanan dan minuman baru yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan memadukan kreativitas dan nilai sejarah yang terkandung dalam naskah, industri kreatif dapat bertransformasi menjadi sektor yang tidak hanya inovatif tetapi juga berakar kuat pada budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi nasional untuk konservasi, digitalisasi, dan revitalisasi Naskah kuno Nusantara guna mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis budaya.

Naskah kuno Nusantara berperan strategis sebagai simbol diplomasi budaya, memperkuat hubungan antarbangsa melalui pemberian replika, terjemahan, atau interpretasi seni yang merepresentasikan nilai persahabatan dan penghormatan. Pengakuan internasional melalui program seperti UNESCO *Memory of the World* menegaskan statusnya sebagai warisan dunia yang penting dalam diplomasi multilateral. Selain itu, pemberdayaan diaspora Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai dalam naskah kuno turut memperkuat identitas budaya di tingkat global. Sebagai sumber utama ingatan kolektif, naskah ini tidak hanya merekam sejarah sosial, budaya, dan politik masa lalu, tetapi juga membentuk kesadaran sejarah yang esensial bagi kontinuitas identitas nasional.

Berdasarkan data Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara, tercatat sebanyak 143.259 Naskah kuno Nusantara yang tersebar di dalam dan luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100.770 naskah berada di Indonesia, tersimpan di berbagai lembaga seperti museum, perpustakaan, kearsipan, komunitas adat, serta dalam kepemilikan masyarakat secara perorangan maupun lembaga lokal. Sementara itu, sebanyak 42.489 naskah tercatat berada di luar negeri, yang merupakan konsekuensi dari sejarah panjang interaksi Nusantara dengan bangsa-bangsa lain melalui jalur perdagangan, kolonialisme, dan pertukaran ilmu pengetahuan. Data yang dituangkan dalam Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Nusantara tersebut bersumber dari Henri Chambert-Loir & Oman Fathurahman (1999), Katalog-katalog tercetak yang terbit setelah tahun 1999, pengumpulan data melalui pendaftaran naskah kuno Perpustakaan Nasional, dan data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah per Provinsi (2018).

Gambar 1.6 Peta Persebaran Naskah Kuno Nusantara di Luar Negeri



Sumber: Rencana Induk Pengarusutamaan Naskah Nusantara, 2024

Tabel 1.7 Persebaran Naskah Kuno di Luar Negeri

No	Negara	Jumlah	No	Negara	Jumlah	No	Negara	Jumlah
1	Afrika Selatan	48	10	Hungaria	1	19	Prancis	578
2	Amerika Serikat	2.775	11	India	10	20	Rusia	38
3	Australia	11.818	12	Inggris	665	21	Selandia Baru	2
4	Austria	14	13	Irlandia	49	22	Singapura	27
5	Belanda	20.684	14	Italia	34	23	Sri Lanka	200
6	Belgia	18	15	Jerman	3.099	24	Swedia	4
7	Brunei	545	16	Kanada	5	25	Swiss	9
8	Ceko	2	17	Malaysia	1.714	26	Thailand	28
9	Denmark	112	18	Norwegia	3	27	Vatikan	7

Sumber: Rencana Induk Pengarusutamaan Naskah Nusantara, 2024

Gambar 1.6 dan Tabel 1.7 di atas menunjukkan bahwa khazanah naskah kuno Nusantara di luar negeri tersebar di berbagai negara dengan jumlah yang cukup signifikan, antara lain di Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Data ini menunjukkan pentingnya strategi nasional dalam pelestarian, pendokumentasian, dan pemanfaatan naskah kuno Nusantara, baik yang berada di dalam negeri maupun sebagai bagian dari diplomasi budaya untuk mengakses kembali warisan intelektual bangsa yang tersebar secara global.

Gambar 1.7 Peta Persebaran Naskah Kuno di Indonesia



Sumber: Perpustakaan Nasional, data per November 2024

Dari sebaran jumlah naskah kuno Nusantara yang berada di dalam negeri tercatat bahwa sebagian besar naskah berada dalam kondisi yang rentan karena pengaruh usia, media tulis yang beragam, serta kondisi iklim tropis yang dapat mempercepat kerusakan.

Grafik 1.11 Tingkat Kerusakan Naskah Kuno yang Ditangani

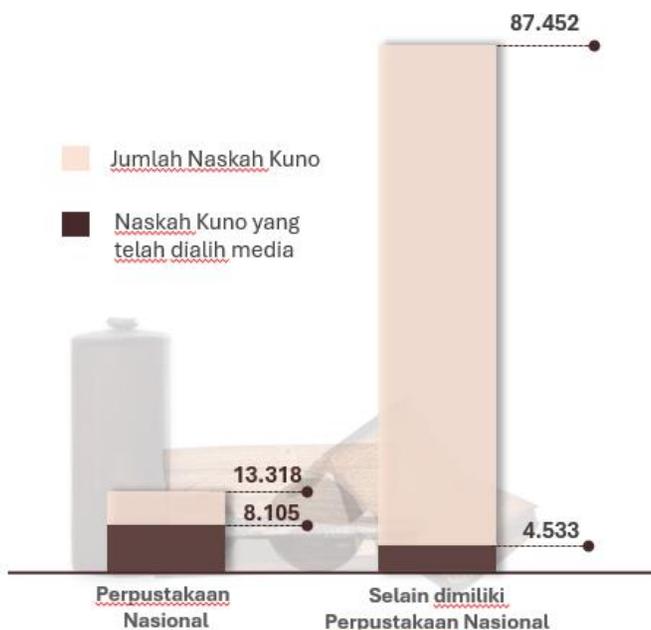


Sumber data: Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, 2024

Berdasarkan data Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan (2024) yang tersaji dalam grafik 1.11, identifikasi naskah kuno yang telah dilakukan penanganan di antaranya 53,61% mengalami kerusakan ringan, 40,56% rusak sedang, dan 5,83% rusak berat. Kondisi ini mencerminkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap warisan dokumenter bangsa. Proporsi terbesar berada pada kategori rusak ringan, yang masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan konservasi preventif agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih parah. Sementara itu, naskah dengan kerusakan sedang dan berat membutuhkan penanganan yang lebih intensif, baik melalui konservasi fisik maupun digitalisasi sebagai langkah penyelamatan isi informasi.

Sementara itu, Perpustakaan Nasional telah melakukan upaya alih media yang hingga tahun 2024 baru mencapai 12.638 eksemplar dari 100.770 naskah kuno yang ada di Indonesia atau baru mencapai sekitar 12,54% (grafik 1.12).

Grafik 1.12 Jumlah Naskah Kuno yang Telah Dialih Media



Sumber: Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan, 2024

Tidak adanya naskah dalam kondisi baik menunjukkan perlunya upaya strategis yang berkelanjutan dalam menjaga dan merawat koleksi naskah kuno, termasuk perbaikan sistem penyimpanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi pelestarian. Dengan demikian, data ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan prioritas pelestarian naskah kuno secara nasional. Lebih lanjut, naskah kuno yang berada pada kerusakan level 2 dan 3 memiliki potensi kenaikan tingkat kerusakan karena sebagian besar naskah berada dalam kondisi yang rentan yang diakibatkan oleh pengaruh usia, media tulis yang beragam, kondisi ruang penyimpanan yang tidak ideal serta kondisi iklim tropis yang dapat mempercepat kerusakan. Untuk itulah diperlukan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas tindakan pencegahan, konservasi, dan percepatan digitalisasi naskah kuno untuk melindungi dan merawat naskah kuno agar tetap terjaga keasliannya dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan yang dihadapi perpustakaan, khususnya Perpustakaan Nasional, dapat dipetakan secara komprehensif melalui analisis terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan tantangan). Hasil analisis ini tidak hanya memberikan gambaran kondisi terkini, tetapi juga menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan yang terarah. Kekuatan yang dimiliki dapat dioptimalkan sebagai motor penggerak inovasi dan perluasan layanan, sementara kelemahan harus diidentifikasi secara jelas untuk dirumuskan solusi perbaikan yang efektif. Di sisi lain, peluang yang ada perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat posisi perpustakaan di tingkat nasional maupun global, sedangkan tantangan harus diantisipasi dengan langkah adaptif dan responsif. Dengan pendekatan ini, hasil analisis SWOT yang tersaji pada tabel berikut tidak hanya menjadi potret situasi, tetapi juga peta jalan menuju transformasi perpustakaan yang lebih inklusif, modern, dan berdaya saing.

Tabel 1.8 Analisis SWOT Perpustakaan Nasional

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan koleksi Indonesiana; 2. Dukungan regulasi dan kelompok masyarakat terhadap pengelolaan naskah kuno Nusantara; 3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penguatan Literasi Masyarakat; 4. Kepercayaan masyarakat terhadap Perpustakaan Nasional cukup tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber pengetahuan berkualitas; 2. Kurang meratanya kuantitas dan kompetensi tenaga perpustakaan; 3. Keterbatasan wewenang dan minimnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap perpustakaan.
Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan teknologi dan kecerdasan artifisial; 2. Pertumbuhan komunitas dan pegiat literasi; 3. Transformasi perpustakaan sebagai pusat aktivitas belajar dan sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan ruang penyimpanan; 2. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan; 3. Infrastruktur perpustakaan masih belum memadai; 4. Masih kurangnya keamanan koleksi dan data.

Dari tabel di atas potensi yang dimiliki oleh perpustakaan didasarkan pada kekuatan dan peluang yang telah disusun, terdapat 7 potensi, yaitu:

1. Kekayaan koleksi Indonesiana.
2. Dukungan regulasi dan kelompok masyarakat terhadap pengelolaan naskah kuno Nusantara.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penguatan Literasi Masyarakat.
4. Kepercayaan masyarakat terhadap Perpustakaan Nasional yang cukup tinggi.
5. Kemajuan teknologi dan kecerdasan artifisial.
6. Pertumbuhan komunitas dan pegiat literasi.
7. Transformasi perpustakaan sebagai pusat aktivitas belajar dan sosial.

Sedangkan permasalahan yang harus dapat dicarikan jalan keluarnya oleh Perpustakaan Nasional didasarkan pada kelemahan dan tantangan yang dihadapi, yaitu:

1. Keterbatasan sumber pengetahuan berkualitas.
2. Pemerataan dan kompetensi tenaga perpustakaan.
3. Keterbatasan wewenang dan minimnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap perpustakaan.
4. Keterbatasan ruang penyimpanan.
5. Kondisi geografis dan infrastruktur.
6. Masih kurangnya keamanan koleksi dan data.

1.2.1 Potensi

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perpustakaan dan literasi, didukung oleh kemajuan teknologi, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta menguatnya gerakan literasi nasional. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan strategi terintegrasi yang mendorong

transformasi perpustakaan menjadi pusat inovasi, memperluas akses literasi digital, serta memperkuat keterlibatan komunitas. Dengan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia berpeluang mempercepat peningkatan budaya baca dan membangun ekosistem literasi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

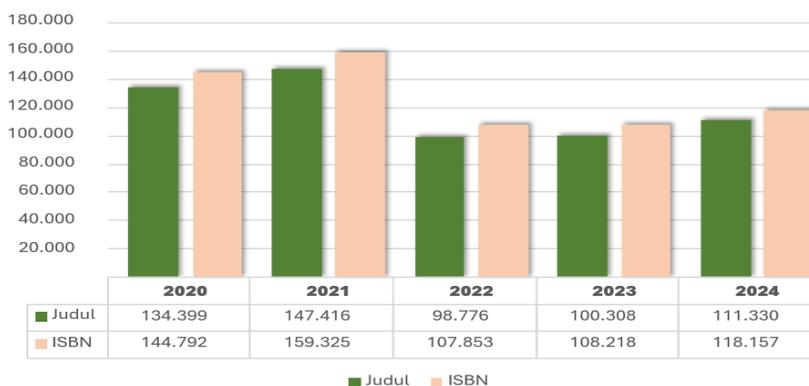
1. Kekayaan Koleksi Indonesiana

Bangsa Indonesia memiliki tradisi tulisan yang telah berkembang sejak ribuan tahun lalu, terlihat dari berbagai bentuk prasasti, naskah kuno, dan dokumen sejarah yang tersimpan di perpustakaan, arsip, dan museum. Prasasti serta dokumen sejarah memberikan gambaran kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masa lalu, termasuk interaksi kerajaan lokal dengan bangsa asing. Kekayaan Naskah Kuno Nusantara juga sangat besar, dengan 100.770 naskah tersimpan di Indonesia dan 42.489 naskah di luar negeri mencerminkan keberagaman aksara, bahasa, serta tema yang mencakup agama, sejarah, sastra, dan budaya.

Selain naskah kuno, perkembangan industri penerbitan di Indonesia semakin pesat dengan ribuan buku terbit setiap tahun. Kemajuan teknologi informasi menumbuhkan penerbit-penerbit digital sehingga memperluas format bahan bacaan, seperti *e-resources* dan materi audiovisual, memberikan alternatif bagi masyarakat. Di samping itu, materi efemera seperti brosur, pamflet, dan poster memiliki nilai historis dalam mendokumentasikan peristiwa penting, meskipun belum banyak dikembangkan. Koleksi Indonesiana menjadi bagian dari identitas nasional yang berharga untuk pendidikan dan penelitian, sehingga upaya pelestarian dan pengembangannya harus terus dilakukan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Koleksi Indonesiana merupakan kumpulan karya intelektual bangsa Indonesia yang mencakup berbagai jenis bahan pustaka baik tercetak maupun terekam yang merepresentasikan pengetahuan, budaya, sejarah, dan identitas bangsa Indonesia. ISBN (*International Standard Book Number*) di Indonesia berperan penting dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan koleksi Indonesiana, yaitu kumpulan karya intelektual bangsa dalam berbagai bentuk dan media yang menjadi warisan dokumenter. Sebagai sistem identifikasi unik bagi setiap terbitan buku, ISBN memudahkan pendataan, pelacakan, dan integrasi data bibliografi ke dalam platform digital yang dikelola oleh perpustakaan. Dengan meningkatnya jumlah penerbit dan penulis independen, ISBN menjadi alat strategis untuk memastikan setiap karya yang diterbitkan tercatat resmi dan dapat diakses sebagai bagian dari khazanah literasi. Melalui ISBN, koleksi Indonesiana dapat terus diperbarui dan diperluas secara sistematis, memperkuat upaya pelestarian dan diseminasi pengetahuan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Grafik 1.13 Pertumbuhan Jumlah ISBN yang Diterbitkan Tahun 2020-2024



Sumber: Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, 2024

2. Dukungan Regulasi dan Kelompok Masyarakat terhadap Pengelolaan Naskah Kuno Nusantara

Minat masyarakat Indonesia terhadap naskah kuno semakin meningkat seiring dengan keterbukaan akses informasi dan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Naskah Kuno Nusantara memiliki nilai historis dan ilmiah yang berharga, berfungsi sebagai sumber sejarah, referensi keilmuan, serta inspirasi bagi karya-karya baru. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Melalui kebijakan ini, Naskah kuno diakui sebagai warisan budaya takbenda yang harus dilindungi dan diakses oleh masyarakat luas.

Perpustakaan Nasional memainkan peran penting dalam pelestarian Naskah Kuno Nusantara, tidak hanya dalam menjaga kondisinya tetapi juga dalam memastikan aksesibilitasnya bagi generasi mendatang. Upaya konservasi mencakup pemeriksaan fisik, restorasi, dan penyimpanan yang sesuai agar naskah tetap terjaga. Selain itu, digitalisasi menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan naskah kuno tanpa merusak bentuk aslinya. Melalui digitalisasi, masyarakat dan peneliti dapat mengakses koleksi berharga ini dengan lebih mudah, memperkaya pemahaman mereka tentang sejarah dan budaya Indonesia.

Selain langkah teknis, pelestarian naskah kuno juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, komunitas, serta masyarakat umum. Kerja sama global memungkinkan pertukaran teknologi, akses file digital naskah kuno dan metode konservasi terbaik, sementara program edukasi dan advokasi dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga warisan budaya ini. Komunitas seperti, kelompok adat, pemerhati naskah kuno, pesantren, dan kelompok filolog independen telah menjadi pelaku utama dalam melestarikan naskah kuno, baik melalui penyimpanan koleksi pribadi, transliterasi, maupun digitalisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut kerap kali dilakukan dengan dukungan yang minim dari pemerintah. Beberapa komunitas bahkan menjalin kerja sama dengan akademisi dan lembaga internasional untuk mengadakan lokakarya, pameran, dan digitalisasi naskah kuno. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa pelestarian naskah kuno tidak hanya sebuah program kelembagaan,

melainkan juga gerakan akar rumput yang tumbuh dari kepedulian kolektif terhadap sejarah dan identitas bangsa.

Pelestarian naskah kuno, baik konservasi, digitalisasi maupun pemanfaatannya, memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit sehingga tantangan pendanaan juga menjadi perhatian. Perpustakaan Nasional aktif mencari dukungan dari berbagai sumber sebagai upaya menjawab tantangan tersebut. Dengan upaya yang berkelanjutan, pelestarian naskah kuno bukan hanya menjaga dokumen sejarah, tetapi juga memastikan bahwa nilai, pengetahuan, dan identitas budaya bangsa tetap hidup untuk generasi mendatang.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penguatan Literasi Masyarakat

Penguatan literasi masyarakat akan dapat berjalan ketika pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, ikut memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, jika bentuk dukungan langsung dari pemerintah salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan literasi sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan gerakan literasi tersebut dapat langsung dilaksanakan, maka salah satu bentuk dukungan tidak langsung yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah melalui penetapan kebijakan yang berpihak terhadap meningkatnya literasi di masyarakat dan tertuang ke dalam bentuk regulasi yang mengatur dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penguatan literasi di pusat maupun di daerah.

Pada tingkatan pemerintah pusat, ada beberapa aturan yang memberikan dukungannya terhadap pengembangan literasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan sudah menekankan pentingnya peningkatan budaya literasi yang dalam undang-undang tersebut fokusnya adalah melalui pengayaan bahan-bahan bacaan terutama buku. Pemerintah melalui Bappenas yang dibantu oleh beberapa Kementerian/Lembaga terkait sekarang juga tengah menggodok rancangan Peraturan Presiden tentang peta jalan literasi, sementara Perpustakaan Nasional malah sudah memberikan tindakan nyata dengan penyusunan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi.

Sementara itu pada tingkatan daerah, sudah banyak Pemerintah Daerah yang turut memberikan dukungannya terhadap penguatan literasi dengan menuangkannya ke dalam aturan yang disusun baik itu berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun berupa Peraturan Kepala Daerah (Pergub, Perbup/Perwali). Beberapa peraturan di daerah tersebut di antaranya adalah:

- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Budaya Literasi;
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penetapan Bulan Literasi Daerah;
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Gerakan Literasi Daerah;
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2019 tentang Literasi;
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi;

- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi Masyarakat;
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi;
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengembangan Budaya Literasi;
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gerakan Literasi;
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi;
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi;;
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi;
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi;
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2015 tentang Program Belajar Sepanjang Hayat Melalui Budaya Baca, Menulis Dan Belaja;
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah;
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 62 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Probolinggo;
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 53 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah Terpadu;
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Gerakan Sadar Baca Sejak Dini;
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi Satuan Pendidikan;
- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 55 Tahun 2021 tentang Gerakan literasi Daerah;
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi Daerah;
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Gerakan Literasi Sekolah;
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Gerakan Literasi Daerah.

Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas masih merupakan sebagian dari banyaknya peraturan yang berupa dukungan dari Pemerintah Daerah dalam penguatan literasi di daerah, sehingga keberadaan regulasi tersebut menunjukkan cukup tingginya perhatian Pemerintah terhadap kondisi literasi sehingga menjadi peluang yang cukup besar bagi perpustakaan untuk mengambil bagian dalam program penguatan literasi dan Perpustakaan Nasional dapat dengan mudah untuk melakukan sinkronisasi program penguatan literasinya dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yaitu dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan masuknya peran perpustakaan sebagai bagian dari program literasi tersebut tentunya akan memunculkan potensi yang besar bagi pengembangan perpustakaan di mana perpustakaan bisa menjadi pilar penting bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat sehingga keberadaan perpustakaan dapat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumberdaya manusia di daerah dan di Indonesia pada umumnya.

4. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Nasional Cukup Tinggi

Kiprah dan peran Perpustakaan Nasional telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepercayaan dan ekspektasi masyarakat terhadap Perpustakaan Nasional cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, di antaranya:

- a. Nilai kepatuhan standar pelayanan publik Perpustakaan Nasional selalu berada pada zona hijau pada 4 tahun terakhir dengan kualitas tinggi hingga tertinggi;
- b. Tingkat kepuasan pemustaka mencapai 90,96. Pengukuran terhadap kepuasan pemustaka dilakukan terhadap pengguna 26 (dua puluh enam) layanan Perpustakaan Nasional dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden, serta survei daring melalui pos-el dan *broadcast* WhatsApp dengan responden sebanyak 5.427 pemustaka. Selama 4 (tahun) tahun berturut-turut, tingkat kepuasan pemustaka selalu melebihi nilai 90 (sangat baik), dan ini merupakan pengakuan dari pemustaka bahwa layanan di Perpustakaan Nasional telah berjalan dengan baik.

Selain faktor-faktor tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan Perpustakaan Nasional, kepercayaan masyarakat juga dapat dilihat dari apresiasi pihak di luar Perpustakaan Nasional atas kinerjanya. Salah satu yang perlu dicatat adalah pencapaian Perpustakaan Nasional meraih Jikji Prize UNESCO 2024 atas upaya Perpustakaan Nasional dalam pelestarian dan perluasan akses naskah kuno Nusantara. Perpustakaan Nasional terpilih secara aklamasi, menyisihkan 48 nominasi lain dari berbagai negara, dan menjadi lembaga pertama dari Indonesia yang memperoleh penghargaan tersebut.

Selain itu, tingginya tingkat kepercayaan juga terlihat dari akuisisi 536 naskah Sunda dari Yayasan Budaya Ngariksa, penyerahan 8.500 salinan naskah kuno digital dari proyek digital *Repository of Endangered and Affected Manuscript of South East Asia* (DREAMSEA), serta penyerahan salinan Digital dari program *Endangered Archives Programme* (EAP), British Library.

5. Kemajuan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai segi kehidupan terutama dalam perubahan perilaku pencarian informasi masyarakat sehingga kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan untuk merubah pola penyajian informasi dan pola pelayanannya kepada masyarakat.

Digitalisasi koleksi di Perpustakaan membawa perubahan besar dalam aksesibilitas dan pelestarian pengetahuan. Dengan mengubah koleksi fisik menjadi format digital, masyarakat dari berbagai wilayah, bahkan di luar Indonesia, kini dapat mengakses sumber daya yang sebelumnya hanya tersedia di lokasi fisik. Selain memperluas jangkauan, digitalisasi juga menjadi solusi untuk melindungi naskah dan dokumen berharga dari risiko kerusakan akibat usia atau faktor lingkungan. Melalui teknologi pemindaian canggih dan pelatihan khusus bagi staf, Perpustakaan Nasional memastikan bahwa proses digitalisasi dilakukan dengan presisi tinggi tanpa mengurangi kualitas dan integritas materi aslinya. Selain sebagai upaya konservasi, digitalisasi juga memperkuat peran Perpustakaan dalam menyediakan layanan berbasis teknologi bagi masyarakat.

Pemanfaatan kemajuan teknologi juga dimanfaatkan oleh perpustakaan dalam berinovasi dalam mengembangkan layanan *online* dan digital untuk

meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman masyarakat. Dengan katalog *online* yang komprehensif, aplikasi seluler, serta platform *e-learning*, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses berbagai koleksi dan sumber daya pendidikan tanpa harus datang ke lokasi fisik. Layanan ini sangat bermanfaat bagi peneliti, pelajar, dan masyarakat umum, terutama di daerah terpencil. Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi semakin memperkuat peran perpustakaan dalam menyebarkan informasi dan memperluas jangkauan layanan.

Perpustakaan telah lama menjadi pusat penyimpanan pengetahuan dan sumber informasi bagi masyarakat. Namun, dengan perkembangan kecerdasan artifisial, perpustakaan berada di ambang transformasi besar. Meskipun bukan institusi pertama yang mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial, perpustakaan mulai memanfaatkannya untuk mengoptimalkan pekerjaan pustakawan, meningkatkan pengalaman pengunjung, dan memperluas peran pendidikan. Teknologi ini membantu dalam pengelolaan koleksi, seleksi buku, serta penyediaan layanan interaktif yang lebih personal.

Namun, tantangan seperti perlindungan hak cipta dan pemeliharaan data digital tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional terus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi serta menerapkan sistem keamanan data yang ketat. Dengan langkah ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan koleksi fisik, tetapi juga sebagai penghubung pengetahuan yang dinamis, mendukung kemajuan intelektual dan budaya di era digital.

Keamanan data dan privasi pengguna juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan layanan digital ini. Perpustakaan Nasional telah menerapkan protokol keamanan yang ketat dan terus mengeksplorasi teknologi baru seperti kecerdasan artifisial untuk personalisasi layanan. Selain memastikan aksesibilitas bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas, perpustakaan juga berkomitmen untuk menjaga relevansi koleksi digitalnya melalui pembaruan dan pelestarian berkelanjutan. Dengan strategi ini, Perpustakaan Nasional tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan pengetahuan, tetapi juga sebagai institusi modern yang mendukung literasi, penelitian, dan pendidikan di era digital.

Adopsi teknologi kecerdasan artifisial juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur digital, kesenjangan akses teknologi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya informasi. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan keterampilan digital yang lebih tinggi, mengingat munculnya fenomena seperti *deepfake* dan informasi manipulatif. Selain itu, ketimpangan akses terhadap teknologi membuat kelompok masyarakat tertentu lebih sulit mendapatkan manfaat dari perpustakaan berbasis digital. Untuk mengatasi hal ini, Perpustakaan Nasional perlu berperan sebagai pusat literasi digital dengan menyediakan akses teknologi yang inklusif serta program pelatihan yang komprehensif.

Di sisi lain, perpustakaan harus tetap menjaga prinsip inklusivitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Meskipun teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, perpustakaan tetap harus berperan dalam memastikan keakuratan informasi serta membimbing masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan strategi yang tepat, perpustakaan dapat tetap relevan sebagai pusat literasi, inovasi, dan teknologi di era digital, serta memastikan bahwa informasi yang

disediakan dapat diakses secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

6. Pertumbuhan Komunitas dan Pegiat Literasi

Perpustakaan Nasional berperan aktif dalam meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat dengan menggandeng berbagai komunitas literasi, seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pustaka Bergerak Indonesia (PBI). Komunitas ini mengalami perkembangan pesat berkat meningkatnya kesadaran literasi, dukungan pemerintah, dan peran media sosial. TBM yang awalnya berfokus pada pemberantasan buta huruf kini berkembang menjadi pusat kegiatan literasi yang mencakup diskusi buku, pelatihan menulis, keterampilan, jurnalistik, hingga kewirausahaan. Sementara itu, PBI berkontribusi dalam menjangkau wilayah terpencil dengan mendistribusikan buku menggunakan berbagai metode unik seperti sepeda motor, perahu, hingga gerobak.

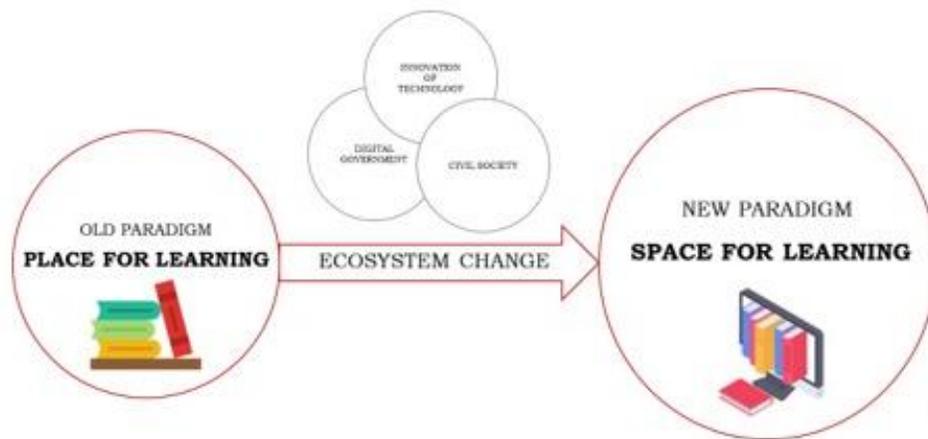
Komunitas literasi yang mengalami pertumbuhan cukup pesat adalah yang tergabung dalam Forum TBM dan PBI. Data yang dihimpun dari Pengurus Pusat Forum tahun 2024 jumlah TBM diperkirakan sekitar 5000-an. Sementara itu, yang terdaftar sebagai anggota Forum TBM sejumlah terdaftar sebagai anggota 3.153. Data komunitas literasi lainnya yang tergabung dalam PBI per tahun 2024 sekitar 2700an simpul pustaka. Yang terdaftar dalam keanggotaan PBI lebih dari 360.

Selain TBM dan PBI, banyak komunitas literasi lain yang tersebar di berbagai daerah, menyediakan ruang baca gratis dan kegiatan yang mendorong minat baca. Kolaborasi antara Perpustakaan Nasional dengan komunitas literasi menjadi strategi penting dalam mengukur perkembangan literasi masyarakat. Program seperti Fasilitasi Penggerak Literasi menjadi wadah berbagi praktik baik serta strategi pendampingan TBM. Dengan kerja sama yang erat, diharapkan literasi masyarakat semakin meningkat, memperkuat budaya membaca, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

7. Transformasi Perpustakaan Menjadi Pusat Aktivitas Belajar Dan Sosial

Perpustakaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kini dihadapkan pada kebutuhan untuk bertransformasi guna memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan teknologi memaksa perpustakaan untuk mengadopsi inovasi baru agar tetap relevan, sekaligus merangkul pendekatan yang lebih inklusif. Transformasi ini mencakup perubahan fungsi perpustakaan dari sekadar pusat penyimpanan informasi menjadi ruang untuk pemberdayaan literasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan keterlibatan sosial. Transformasi perpustakaan tersebut tergambar melalui paradigma baru perpustakaan seperti gambar berikut ini:

Gambar 1.8 Paradigma Baru Perpustakaan



Transformasi digital global tidak hanya memengaruhi cara individu mengakses informasi, tetapi juga mendefinisikan ulang peran lembaga informasi. Ekosistem baru yang terbentuk oleh tiga kekuatan utama—teknologi, pemerintahan digital, dan masyarakat sipil—menuntut perpustakaan untuk tidak lagi hanya menjadi tempat fisik, tetapi menjadi ruang layanan berbasis kebutuhan, kolaboratif, dan terdistribusi.

Inovasi teknologi telah memperluas jangkauan dan fleksibilitas layanan perpustakaan. Pemerintah digital mendorong penyediaan layanan publik yang efisien dan terbuka, termasuk dalam sektor informasi dan literasi. Di sisi lain, masyarakat sipil kini lebih aktif menuntut akses informasi yang cepat, relevan, dan mudah diakses melalui platform digital.

Paradigma "*space for learning*" menekankan transformasi dari struktur layanan berbasis lokasi menjadi layanan berbasis jaringan. Dalam paradigma ini, perpustakaan berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, serta menyediakan beragam sumber dan pengalaman belajar yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.

Hal ini tercermin dari meningkatnya angka kunjungan digital Perpustakaan Nasional, yang naik signifikan dari 7,1 juta pada 2019 menjadi hampir 30 juta pada 2024. Angka ini menunjukkan adopsi dan penerimaan masyarakat terhadap layanan perpustakaan berbasis daring, seperti Indonesia *One Search*, iPusnas, dan *e-Resources*.

Transformasi perpustakaan dari "*place for learning*" ke "*space for learning*" bukan sekadar adaptasi terhadap perubahan teknologi, tetapi sebuah reposisi strategis dalam ekosistem pembelajaran modern. Perpustakaan perlu merumuskan ulang pendekatan layanan, serta membangun kapasitas kelembagaan yang mendukung inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, perpustakaan akan tetap relevan dan menjadi aktor kunci dalam mendukung pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan di era digital.

Salah satu tren global yang menonjol adalah perpustakaan inklusif, yang berusaha melayani semua lapisan masyarakat. Inklusivitas ini penting di Indonesia, di mana kesenjangan akses terhadap informasi dan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih besar. Perpustakaan memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan akses ke buku, materi digital, dan lokakarya edukatif bagi semua kelompok

masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok terpinggirkan lainnya.

Perpustakaan modern juga menawarkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus, seperti buku audio dan platform digital yang lebih mudah diakses. Program-program untuk lansia, anak-anak, serta kelompok minoritas menjadi bagian dari upaya perpustakaan untuk menciptakan akses setara terhadap pengetahuan. Inisiatif ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan literasi, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, perpustakaan modern kini berfungsi sebagai *makerspace*, tempat di mana pengguna dapat terlibat dalam proyek-proyek kreatif. Dengan menyediakan akses ke teknologi dan alat-alat yang mungkin tidak dimiliki di rumah, seperti printer 3D dan perangkat lunak pengeditan multimedia, perpustakaan menjadi tempat untuk berinovasi dan berkolaborasi. Di Indonesia, tren ini relevan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sains, teknologi, dan industri kreatif. Perpustakaan yang menyediakan fasilitas *makerspace* mendorong pengguna untuk beralih dari konsumen informasi menjadi pencipta ide-ide baru. Hal ini berpotensi untuk membangun generasi yang lebih kreatif dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia.

Salah satu inisiatif penting di Indonesia adalah Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang bertujuan memosisikan perpustakaan sebagai ruang inklusif dan pusat pengembangan masyarakat. Melalui TPBIS, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan informasi, tetapi juga menjadi pusat peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini telah memberikan dampak positif di berbagai daerah, di mana perpustakaan kini berperan aktif dalam memberikan pelatihan wirausaha, pendidikan non-formal, serta kegiatan komunitas lainnya. Keberhasilan TPBIS terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung dan keterlibatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, dalam menggunakan layanan perpustakaan.

Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam hal meratakan pelaksanaan program di seluruh Indonesia. Beberapa perpustakaan di wilayah terpencil masih kesulitan mengadopsi TPBIS karena keterbatasan anggaran dan sumber daya. Keberlanjutan program ini memerlukan evaluasi berkelanjutan serta penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Secara keseluruhan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan berfungsi sebagai katalis bagi kemajuan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Tersedianya sistem informasi manajemen (SIM) transformasi dan SIM pendataan dapat membuat Pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan dapat memenuhi kebutuhan data sehingga kondisi ini memungkinkan untuk membantu dalam melakukan pemantauan dan pengembangan program yang sedang dijalankan oleh Perpustakaan Nasional tersebut.

1.2.2 Permasalahan

1. Keterbatasan Sumber Pengetahuan Berkualitas

Ketersediaan sumber pengetahuan berkualitas adalah aspek penting lainnya dalam upaya perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan di masyarakat. Hal ini menyangkut bagaimana perpustakaan mengelola, memperbarui, dan memperkaya koleksinya untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berkembang dari penggunaannya. Perpustakaan menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa koleksinya tidak hanya luas tetapi juga relevan dan terkini. Koleksi yang berkualitas tinggi mencakup berbagai genre dan subjek, serta sumber yang akurat dan terpercaya, yang penting untuk mendukung penelitian dan pembelajaran.

Untuk meningkatkan ketersediaan sumber pengetahuan berkualitas, perpustakaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan khusus berbagai kelompok pengguna, termasuk anak-anak, remaja, akademisi, dan peneliti. Mereka harus menyediakan materi yang sesuai dan bermanfaat untuk semua kelompok usia dan tingkat pendidikan. Selain itu, Perpustakaan Nasional dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan sumber daya interaktif dan multimedia, seperti video pendidikan, *audiobooks*, dan *e-learning modules*. Ini akan membantu dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan menarik bagi pengguna. Akhirnya, dengan terus memperbarui dan memperkaya koleksinya, Perpustakaan Nasional dapat memastikan bahwa mereka tetap menjadi sumber pengetahuan yang penting dan berharga, melayani kebutuhan informasi yang berkembang dari masyarakat Indonesia.

Perpustakaan harus berperan aktif dalam menyediakan sumber pengetahuan berkualitas dengan terus memperbarui dan memperkaya koleksinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggandeng penerbit, lembaga akademis, dan organisasi internasional, perpustakaan dapat mengakses publikasi terbaru yang mendukung penelitian dan pembelajaran. Selain itu, keseimbangan antara koleksi cetak dan digital tetap dijaga agar pengguna dapat memperoleh informasi dalam format yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Pemerataan dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan

Ketimpangan jumlah dan kompetensi tenaga perpustakaan di Indonesia menjadi tantangan serius dalam pengelolaan layanan perpustakaan yang optimal. Dengan jumlah perpustakaan yang sangat banyak dibandingkan dengan tenaga yang tersedia, banyak perpustakaan, terutama di daerah terpencil, tidak dapat beroperasi secara maksimal. Hal ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan, yang seharusnya menjadi kunci peningkatan literasi dan pendidikan di seluruh negeri.

Selain jumlah yang terbatas, tenaga perpustakaan juga menghadapi tantangan dalam menguasai teknologi informasi yang semakin penting dalam pengelolaan perpustakaan modern. Banyak perpustakaan masih dikelola secara manual karena kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem manajemen perpustakaan digital. Tanpa kompetensi yang memadai, perpustakaan sulit berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang semakin berorientasi pada akses digital.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan perekrutan tenaga perpustakaan, pelatihan berkala dalam teknologi informasi, serta optimalisasi perpustakaan digital dan keliling. Pemerintah, universitas, dan organisasi literasi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa tenaga perpustakaan tidak hanya mencukupi secara

kuantitas, tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjalankan perannya sebagai pusat literasi dan sumber pengetahuan yang efektif bagi masyarakat.

3. Keterbatasan Wewenang dan Minimnya Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melepaskan kewenangan pembangunan perpustakaan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Perpustakaan Nasional menjadi kewenangan daerah. Kondisi ini tentunya membatasi kewenangan Perpustakaan Nasional sekaligus membatasi intervensi untuk melakukan pembangunan perpustakaan langsung di daerah.

Keterbatasan wewenang tersebut tentunya berdampak langsung pada upaya Perpustakaan Nasional yang tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terhadap kebijakan daerah terhadap pembangunan perpustakaan. Perpustakaan Nasional hanya bisa melakukan pembinaan dan advokasi kepada daerah tanpa bisa menjadi pelaku langsung bagi upaya pembangunan perpustakaan di daerah, sehingga maju mundurnya pembangunan perpustakaan daerah akan sangat tergantung dari kebijakan masing-masing daerah yang akibatnya adalah keberhasilan pembangunan perpustakaan tidak bisa merata.

Masalah tersebut ditambah dengan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan perpustakaan di daerahnya masing-masing. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar namun pada realitasnya tidak semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan perpustakaan maupun yang telah turun kelembagaan perpustakaan.

Tabel 1.9 Kelembagaan Perpustakaan di Daerah

PERPUSTAKAAN YANG TURUN KELEMBAGAAN		DAERAH YANG BELUM MEMILIKI KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN	
1.	Provinsi Bali	1.	Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah
2.	Kabupaten Bangli, Bali	2.	Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
3.	Kabupaten Jembrana, Bali	3.	Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat
4.	Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	4.	Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya
5.	Kabupaten Samosir, Sumatera Utara	5.	Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara
6.	Kabupaten Pesisir Barat, Lampung	6.	Provinsi Papua Barat Daya
7.	Kabupaten Keerom, Papua	7.	Provinsi Papua Tengah
8.	Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	8.	Provinsi Papua Pegunungan
		9.	Provinsi Papua Selatan

PERPUSTAKAAN YANG TURUN KELEMBAGAAN	DAERAH YANG BELUM MEMILIKI KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN
	10. Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku
	11. Kabupaten Biak Numfor, Papua
	12. Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
	13. Kabupaten Asmat, Papua Selatan
	14. Kabupaten Nabire, Papua Tengah
	15. Kabupaten Puncak, Papua Tengah
	16. Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap sektor perpustakaan tercermin dari minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pengembangannya. Padahal, anggaran merupakan instrumen strategis yang sangat menentukan arah dan keberhasilan pengembangan perpustakaan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketersediaan anggaran yang memadai akan memberikan fleksibilitas bagi perpustakaan daerah dalam merancang dan melaksanakan program serta kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Sebaliknya, keterbatasan anggaran membuat perpustakaan daerah harus bersikap sangat selektif dalam menentukan program yang dapat dijalankan. Hal ini tidak hanya mempersempit ruang inovasi dan pelayanan publik yang optimal, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, terutama dalam aspek peningkatan literasi, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional tahun 2023, lebih dari 99% perpustakaan daerah hanya memperoleh alokasi anggaran di bawah 1% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja urusan perpustakaan. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pentingnya peran perpustakaan dalam pembangunan sumber daya manusia dan komitmen anggaran yang tersedia. Jika tidak segera direspons melalui kebijakan afirmatif dan peningkatan kesadaran di tingkat daerah, kondisi ini dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan literasi antarwilayah serta melemahkan kontribusi perpustakaan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

4. Keterbatasan Ruang Penyimpanan

Perpustakaan Nasional menghadapi tantangan dalam mengelola koleksi cetak dan rekam yang terus bertambah setiap tahun. Peningkatan jumlah koleksi ini membutuhkan ruang penyimpanan yang memadai serta pengelolaan lingkungan yang sesuai untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan. Suhu, kelembapan, pencahayaan dan kebersihan koleksi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan pada koleksi, seperti pertumbuhan jamur pada kertas dan pelapukan bahan rekam.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa beberapa ruang penyimpanan di Perpustakaan Nasional belum memenuhi standar konservasi yang ideal. Suhu yang terlalu tinggi dan kelembapan yang berlebihan meningkatkan risiko degradasi koleksi, terutama pada bahan cetak dan media audio-visual. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, koleksi berharga yang dimiliki perpustakaan dapat mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki.

Permasalahan serupa juga dialami oleh banyak perpustakaan di Indonesia yang belum memiliki ruang penyimpanan yang memenuhi standar nasional. Kurangnya fasilitas yang sesuai dapat mengancam keberlanjutan koleksi, sehingga perlu adanya strategi pengelolaan dan peningkatan infrastruktur untuk memastikan pelestarian koleksi dalam jangka panjang.

5. Kondisi Geografis dan Infrastruktur

Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur merupakan tantangan utama yang dihadapi Perpustakaan Nasional dalam menjalankan program-programnya. Di Indonesia, terdapat kesenjangan signifikan dalam akses terhadap bahan bacaan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Akses ke perpustakaan fisik di wilayah-wilayah tersebut sangat terbatas, sehingga masyarakat setempat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan pengembangan diri.

Kesenjangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kesenjangan digital. Data Survei Internet Indonesia 2024 dari APJII menunjukkan ketimpangan penetrasi dan kontribusi internet antarwilayah mencerminkan tantangan mendasar dalam pemerataan infrastruktur digital yang secara langsung berkorelasi dengan pengembangan literasi dan akses terhadap perpustakaan, baik fisik maupun digital. Wilayah-wilayah dengan penetrasi rendah seperti Maluku & Papua (69,91%), Bali & Nusa Tenggara (71,80%), dan daerah tertinggal (67,61%) juga merupakan wilayah yang kerap menghadapi hambatan dalam pembangunan fasilitas literasi yang memadai. Sementara itu, wilayah dengan penetrasi tinggi seperti Jawa (83,64%) menunjukkan hubungan yang kuat antara ketersediaan akses internet, infrastruktur perpustakaan digital, dan pencapaian literasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, strategi pembangunan literasi nasional perlu diintegrasikan dengan agenda transformasi digital, termasuk memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi berbasis teknologi. Pengembangan perpustakaan digital dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan pustaka harus menjadi prioritas di wilayah dengan akses internet rendah, dengan dukungan pelatihan literasi digital, distribusi konten edukatif, dan kolaborasi multipihak. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi katalisator inklusi digital dan literasi yang mendorong kesetaraan akses informasi serta pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara berkelanjutan.

Tidak hanya infrastruktur digital, infrastruktur fisik seperti transportasi dan jalan raya mempengaruhi kemampuan penduduk memanfaatkan perpustakaan. Di daerah-daerah terpencil, transportasi yang tidak memadai bisa menjadi hambatan serius.

Kondisi geografis dan infrastruktur di Indonesia juga berdampak pada program pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno. Kondisi iklim kerawanan bencana di Indonesia mempercepat proses kerusakan bahan pustaka dan naskah kuno. Indonesia juga belum memiliki *Disaster Risk*

Management (DRM) bagi penyelamatan dokumen sebagaimana yang direkomendasikan UNESCO untuk meminimalisir dampak bencana terhadap bahan pustaka. Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur di daerah menjadikan program pelestarian naskah memerlukan biaya yang mahal. Selain dukungan anggaran yang perlu diperhatikan, peningkatan kapasitas SDM di bidang konservasi bahan pustaka di daerah penting dilakukan.

Gambar 1.9 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia



Sumber: APJII, 2024

6. Masih Kurangnya Keamanan Koleksi dan Data

Perpustakaan merupakan salah satu institusi terpenting dalam menjaga dan melestarikan pengetahuan, warisan budaya, dan informasi. Selain sebagai pusat informasi yang menyediakan akses ke berbagai sumber daya, perpustakaan juga menjadi penjaga koleksi khusus, yang meliputi bahan-bahan langka dan bernilai tinggi seperti manuskrip, buku kuno, peta, dan artefak sejarah lainnya. Koleksi-koleksi ini memerlukan perlindungan yang lebih ketat dibandingkan dengan material umum, karena sifatnya yang rentan terhadap kerusakan dan pencurian.

American Library Association melalui ACRL/RBMS *Guidelines Regarding the Security of Special Collections Materials* memberikan pedoman yang sangat relevan bagi institusi yang menyimpan koleksi khusus. Pedoman ACRL/RBMS menekankan beberapa aspek penting dalam menjaga keamanan koleksi khusus, seperti pengelolaan akses, pengawasan ruang baca, pelatihan staf, dan pemanfaatan teknologi untuk perlindungan fisik.

Akses terbatas dan registrasi pengguna menjadi salah satu cara untuk melindungi koleksi khusus yang sering kali diakses oleh peneliti, sejarawan, atau akademisi yang memerlukan dokumen langka untuk penelitian. Oleh karena itu, registrasi pengguna dan akses terbatas sangat penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses bahan-bahan ini. Proses registrasi memungkinkan perpustakaan mendokumentasikan aktivitas siapa saja yang mengakses koleksi tersebut.

Pengawasan ruang baca oleh staf terlatih juga menjadi salah satu strategi kunci dalam menjaga keamanan koleksi. Staf perlu dibekali dengan kemampuan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan memahami cara menangani bahan langka dengan benar. Hal ini mencegah pencurian dan kerusakan yang tidak disengaja pada bahan koleksi. Terakhir, implementasi Teknologi Pengawasan dan Pengamanan melalui pemasangan kamera CCTV, sistem alarm, dan perangkat elektronik lainnya sering kali digunakan untuk memantau aktivitas di sekitar koleksi khusus. Teknologi ini berfungsi sebagai alat pencegah sekaligus pemantau yang dapat mengidentifikasi insiden pencurian atau penyalahgunaan.

Semua strategi tersebut dirancang untuk menjaga keamanan fisik koleksi yang rentan dan berharga. Namun, dengan perkembangan teknologi, perpustakaan saat ini juga dihadapkan pada tantangan yang sama seriusnya dalam hal menjaga keamanan data digital mereka. Seiring dengan meningkatnya peran perpustakaan sebagai penyedia layanan digital, data digital yang disimpan oleh perpustakaan menjadi sangat beragam, mulai dari metadata katalog hingga arsip digital dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video. Perlindungan terhadap data digital ini penting karena sifatnya yang rentan terhadap ancaman seperti pencurian data, peretasan, atau hilangnya informasi akibat kegagalan sistem. Keamanan data digital di perpustakaan berkaitan erat dengan keamanan koleksi khusus.

Saat ini Perpustakaan Nasional memiliki lebih 27.000 koleksi digital yang dipublikasikan pada situs <http://khastara.perpusnas.go.id>. Situs web tersebut merupakan hasil digitalisasi koleksi langka yang bertujuan untuk mempermudah akses bagi pengguna yang tidak bisa mengakses fisik koleksi tersebut. Dalam hal ini, menjaga keamanan data digital yang berasal dari koleksi khusus sama pentingnya dengan melindungi fisik koleksinya.

Kegagalan dalam melindungi data digital dapat menyebabkan kerugian yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kehilangan atau kerusakan koleksi fisik. Keamanan koleksi khusus dan data digital di Perpustakaan Nasional tidak dapat dipisahkan dari koleksi fisik yang juga memiliki versi digital atau sedang dalam proses digitalisasi, sehingga ancaman terhadap salah satunya dapat berimplikasi langsung pada yang lain.

Situs dan aplikasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional beberapa kali mendapatkan serangan siber dari pihak luar diantaranya adalah pada Februari tahun 2024 situs perpusnas.go.id pernah diserang oleh peretas bernama bjorka yang mengakibatkan perubahan pada tampilannya, lalu yang terbaru adalah serangan terhadap aplikasi Ipusnas yang diretas pada awal Mei tahun 2025, hal tersebut menjadi indikasi rentannya keamanan koleksi dan data yang berbasis siber terhadap serangan dari pihak luar.

Dalam upaya penanganan insiden tersebut diperlukan dukungan sistem teknologi yang memadai di perpustakaan, seperti menggunakan teknologi terbaru saat pengembangan sistem aplikasi (penerapan *secure code*, penggunaan bahasa pemrograman versi terbaru), penerapan keamanan jaringan dan infrastruktur (Menjalankan *firewall*, *antivirus*, dan *anti-malware* yang *up-to-date* untuk mencegah serangan, Melakukan pemantauan jaringan secara rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan), penerapan *back up* secara rutin dan melakukan rencana *disaster recovery* untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan siber atau bencana lainnya, serta memberikan pengelolaan terhadap hak akses pengguna secara ketat sesuai

kebutuhan. Kemudian perpustakaan perlu memiliki kebijakan keamanan informasi sebagai regulasi dalam penerapan keamanan informasi dan melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan sistem dan prosedur keamanan berjalan dengan baik, serta memberikan sosialisasi kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi didalam dunia digital.

Selain itu perpustakaan yang menyimpan data pengguna juga perlu memastikan bahwa informasi pribadi pengguna dilindungi dengan standar keamanan yang sama tingginya. Perlindungan data pribadi pengguna dan koleksi digital harus menjadi bagian dari strategi keamanan holistik yang diterapkan oleh institusi perpustakaan. Penerapan teknologi modern, seperti sistem keamanan siber yang lebih maju, enkripsi data, dan manajemen identitas digital, adalah langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman di dunia digital yang terus berkembang. Perpustakaan juga harus mempertimbangkan perlunya kolaborasi lintas disiplin untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya melindungi warisan fisik, tetapi juga warisan digital yang berharga. Sebagai institusi yang mengedepankan akses terhadap pengetahuan, perpustakaan harus dapat menyediakan layanan yang aman dan andal baik secara fisik maupun digital.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2025-2029

2.1 Visi

Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 mengusung visi strategis baru dalam mendorong kemajuan sistem Perpustakaan Nasional, yaitu:

“Menjadi perpustakaan yang transformatif dalam meningkatkan budaya baca dan literasi untuk mewujudkan bangsa bermartabat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini dirancang untuk menjadi landasan normatif dan arah kebijakan seluruh aktivitas Perpustakaan Nasional serta seluruh jaringan perpustakaan di Indonesia. Kehadiran visi ini merefleksikan komitmen kuat terhadap peran perpustakaan sebagai instrumen pembangunan dalam meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat untuk mendukung sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam meningkatkan martabat bangsa sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi sarana edukatif, tetapi juga ekosistem strategis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi

Dalam memperkuat dan mendukung visi 2025-2029 Perpustakaan Nasional di atas, maka ditetapkan beberapa misi yang dapat mendukung pencapaian visi tersebut yaitu:

2.2.1 Memperkuat Budaya Baca dan Meningkatkan Kecakapan Literasi Masyarakat

Masyarakat dengan budaya baca yang tinggi memiliki kecenderungan untuk terus memperluas wawasan melalui berbagai sumber bacaan, yang pada akhirnya akan memperkaya pengetahuan dan membentuk individu yang berpengetahuan. Dari proses ini, akan terbentuk masyarakat berpengetahuan (*knowledge-based society*) yang memiliki landasan kuat untuk tumbuh secara intelektual. Tingkatan selanjutnya dari masyarakat berpengetahuan adalah terwujudnya kecakapan literasi, yakni kemampuan untuk memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan produktif. Kecakapan literasi inilah yang menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya saing, dan membangun masyarakat yang adaptif terhadap perubahan.

Dalam rangka memperkuat budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, Perpustakaan Nasional secara konsisten melakukan berbagai upaya strategis, antara lain melalui pengadaan bahan bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun budaya baca, karena tanpa akses terhadap sumber informasi, masyarakat tidak memiliki sarana untuk memperoleh pengetahuan. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga secara aktif melaksanakan kampanye literasi dan promosi budaya baca melalui berbagai *platform* dan pendekatan, guna menumbuhkan minat baca sekaligus

mendorong pemanfaatan bahan bacaan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

2.2.2 Memperkuat Perpustakaan Digital dengan Memanfaatkan Teknologi Terkini

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, perpustakaan dituntut untuk bertransformasi agar tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Perpustakaan tidak lagi dapat sepenuhnya mengandalkan model layanan konvensional yang memiliki keterbatasan akses dan jangkauan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional perlu memperkuat layanan digital sebagai bagian dari strategi transformasi layanan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan ketersediaan koleksi digital, baik melalui pengadaan langsung maupun melalui proses alih media terhadap koleksi fisik yang telah dimiliki. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses, mempercepat diseminasi pengetahuan, serta menjawab tantangan era digital dalam mewujudkan masyarakat yang literat informasi.

Upaya memperkuat layanan perpustakaan digital dilakukan melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan yang tersedia secara daring. Hal ini mencakup pengembangan koleksi digital, peningkatan aksesibilitas, serta penyediaan layanan yang lebih interaktif dan personal. Dalam aspek pengembangan koleksi, Perpustakaan Nasional secara berkelanjutan memperkaya konten digital yang tersimpan dalam platform iPusnas dan Bintang Pusnas Edu. Untuk meningkatkan aksesibilitas, penguatan dilakukan melalui pengembangan pojok baca digital, titik baca digital, serta perluasan jaringan perpustakaan digital berbasis integrasi nasional melalui Indonesia *One Search* (IOS), yang memungkinkan akses masyarakat terhadap sumber informasi menjadi lebih merata dan inklusif. Sementara itu, penyediaan koleksi yang interaktif dan personal dilakukan antara lain melalui proses alih wahana Naskah Kuno Nusantara ke dalam format yang lebih menarik, seperti komik dan media digital lainnya, guna meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pengguna lintas generasi.

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan kecerdasan artifisial melalui penyediaan data dan konten berkualitas, digitalisasi dan akses terbuka, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Sebagai pusat sumber informasi, perpustakaan menyimpan berbagai koleksi digital dan metadata yang dapat dimanfaatkan sebagai data bagi pengembangan sistem kecerdasan artifisial, khususnya dalam pengolahan bahasa alami (*Natural Language Processing*) berbahasa Indonesia. Melalui digitalisasi naskah, katalogisasi otomatis, serta pengembangan sistem temu kembali informasi berbasis kecerdasan artifisial, perpustakaan menjadi penggerak inovasi teknologi informasi yang inklusif. Selain itu, perpustakaan turut berperan dalam meningkatkan kecakapan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan kecerdasan artifisial secara etis dan kritis melalui layanan literasi digital dan pelatihan berbasis teknologi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya sebagai penyimpan pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator transformasi digital dalam ekosistem kecerdasan artifisial.

2.2.3 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar

Standar Nasional Perpustakaan mencakup enam aspek utama, yaitu standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, serta pengelolaan. Perpustakaan Nasional telah menetapkan pedoman teknis untuk memastikan setiap perpustakaan memenuhi standar

tersebut sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya. Tujuan dari penetapan standar ini adalah untuk menjamin terselenggaranya layanan minimal yang berkualitas bagi masyarakat, sehingga kebutuhan informasi dapat terpenuhi dan tercipta pengalaman literasi yang nyaman serta bermakna.

Sejalan dengan hal tersebut, Perpustakaan Nasional bersama Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan meningkatkan standar perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi, dan intervensi strategis, serta evaluasi berkelanjutan melalui mekanisme akreditasi. Proses akreditasi menjadi instrumen penting untuk menilai tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan perpustakaan, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan mutu layanan perpustakaan nasional.

2.2.4 Memperkuat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Perpustakaan tidak hanya menyediakan sumber informasi tetapi juga berperan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pengembangan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sudah berjalan hampir 1 dekade dan menjadi program prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Melalui program ini, perpustakaan berupaya agar keberadaannya dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan bahan bacaan yang dimiliki yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan program ini adalah (1) meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan kualitas layanan perpustakaan; (3) meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (4) membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan; dan (5) meningkatkan kemampuan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Program ini akan dilanjutkan dalam periode Renstra 2025-2029 dalam upaya mewujudkan amanat dalam RPJMN 2025-2029 yang kembali menempatkan program ini ke dalam proyek prioritas nasional, namun pelaksanaannya perlu diperkuat lagi dengan lebih melibatkan pustakawan dan relawan literasi dalam prosesnya sehingga peran dan keberadaan pustakawan dan relawan literasi lebih dirasakan lagi oleh masyarakat. Program ini akan bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi, serta mendukung sumber daya manusia yang unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas 2025.

2.2.5 Memperkuat Peran Masyarakat dalam Gerakan Budaya Baca dan Peningkatan Kecakapan Literasi

Masyarakat merupakan ujung tombak dalam keberhasilan sebuah gerakan. Keterlibatan dan peran masyarakat sangatlah penting sehingga dampak dari kegiatan tersebut akan lebih luas dan tinggi Tingkat keberhasilannya. Hal tersebut jugalah yang mendasari Perpustakaan Nasional untuk memperkuat peran masyarakat dalam gerakan budaya baca dan kecakapan literasi, agar

masyarakat dapat lebih terlibat lagi dalam gerakan tersebut dengan menciptakan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masyarakat sebagai aktor utamanya.

Keberadaan relawan-relawan literasi atau para pegiat literasi menjadi sebuah keuntungan sendiri, sehingga Perpustakaan Nasional dapat memanfaatkan keberadaan mereka untuk ikut mengambil peran meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat yang tentunya berkolaborasi dengan sumber daya yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional.

2.2.6 Meningkatkan Kualitas Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan merupakan elemen penting dalam menggerakkan roda kegiatan perpustakaan untuk memastikan berjalannya sebuah perpustakaan. Untuk dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dibutuhkan tenaga yang berada di pelayanan maupun yang berada di belakang layar yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan, seperti tenaga pengolahan, tenaga konservasi bahkan tenaga administrasi pun ikut memengaruhi.

Kemampuan dan kompetensi mereka dalam mengelola perpustakaan akan berpengaruh terhadap tingkat layanan perpustakaan kepada masyarakat, untuk itulah Perpustakaan Nasional berupaya terus menerus meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan, sehingga tenaga perpustakaan dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan dan dapat melayani masyarakat dengan baik.

2.2.7 Meningkatkan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Pelestarian Koleksi secara Profesional

Meningkatkan pengelolaan karya cetak dan karya rekam serta pelestarian koleksi secara profesional merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan warisan intelektual bangsa. Upaya ini mencakup penghimpunan, pendataan, dan pengolahan karya cetak maupun karya rekam secara terstandar, pemanfaatan teknologi digital untuk didayagunakan secara luas dan optimal, untuk mendukung pembangunan literasi dan ilmu pengetahuan. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam dilakukan secara berkelanjutan yang merupakan upaya strategis untuk memastikan setiap karya intelektual bangsa terhimpun, terlestarikan, dan tetap dapat diakses lintas generasi.

Upaya pelestarian dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk alih media dan preservasi, disertai dengan penguatan sistem informasi yang andal. Penerapan metode konservasi dan alih media bertujuan melindungi koleksi dari risiko kerusakan fisik maupun kehilangan informasi. Profesionalisme pengelolaan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar nasional dan internasional, serta penguatan kerja sama lintas lembaga dan jejaring global. Dengan demikian, koleksi nasional tidak hanya terjaga keutuhan dan keasliannya, tetapi juga dapat diakses lebih luas serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, dan peningkatan literasi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

2.2.8 Memajukan Naskah Kuno Nusantara untuk Memperkokoh Jati Diri Bangsa

Indonesia memiliki kekayaan luar biasa dalam bentuk Naskah Kuno Nusantara yang tersebar di berbagai daerah, seperti naskah Sunda, Jawa, Melayu, Bali,

Batak, dan Bugis. Naskah-naskah ini merupakan warisan budaya tak ternilai dari para leluhur yang merekam peradaban masa lampau secara otentik. Di dalamnya terkandung berbagai informasi penting mengenai aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hingga ilmu pengetahuan yang berkembang di Nusantara pada zamannya. Sebagai sumber primer, naskah kuno tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat jati diri bangsa, membentuk kesadaran historis kolektif, serta mendorong pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi.

Naskah Kuno Nusantara ditemukan dalam beragam bentuk dan media tradisional, seperti kertas, lontar, gebang, bambu, rotan, kayu, hingga kulit kayu, yang menunjukkan kekayaan budaya dan teknologi tulis masyarakat masa lampau. Sebagai dokumen yang ditulis tangan, berusia minimal 50 tahun, dan memiliki nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, serta ilmu pengetahuan, naskah kuno dikategorikan sebagai warisan budaya yang wajib dilestarikan. Sesuai amanat undang-undang, pelestarian naskah kuno menjadi tanggung jawab negara, salah satunya melalui proses digitalisasi agar tetap lestari dan mudah diakses lintas generasi. Menyadari pentingnya nilai strategis naskah tersebut, Perpustakaan Nasional memiliki peran kunci dalam menghimpun, mengelola, melestarikan, serta memajukan pemanfaatan Naskah Kuno Nusantara. Kegiatan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam upaya pelestarian memori kolektif bangsa dan penguatan literasi berbasis budaya lokal yang mendukung proyek prioritas nasional Revitalisasi Manuskrip.

2.3 Tujuan

Dalam upaya mewujudkan visi serta melaksanakan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 adalah “Mengembangkan budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi melalui perpustakaan yang aktif dan adaptif di tengah masyarakat sebagai ruang publik yang inklusif”.

Tujuan ini menegaskan Perpustakaan Nasional terus berupaya meningkatkan budaya baca dan kecakapan literasi dengan mengoptimalkan peran perpustakaan sebagai ruang publik yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada pemerataan akses literasi yang inklusif. Perpustakaan dihadirkan bukan sekadar sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi sebagai pusat interaksi, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tujuan ini maka ditentukan indikator kinerja Nilai Budaya Literasi dengan target tahun 2025 adalah 63,24 dan target akhir pada tahun 2029 adalah 67,05. Nilai Budaya Literasi merupakan salah satu dimensi yang terdapat dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan merupakan salah satu indikator kinerja dalam RPJMN 2025-2029 dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program prioritas Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi.

2.4 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Perpustakaan Nasional, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu:

2.4.1 Terwujudnya Budaya Baca dan Kecakapan Literasi Masyarakat

Keberhasilan dari terwujudnya budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat, diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

Kajian Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Indonesia dirancang berdasarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek penting untuk memahami budaya membaca masyarakat di Indonesia. Tingkat Kegemaran Membaca diukur dengan beberapa dimensi antara lain frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Selain dimensi tersebut, terdapat aspek pendukung dalam kegiatan gemar membaca masyarakat, yaitu aspek perilaku membaca masyarakat. Aspek ini meliputi preferensi membaca, dampak kegiatan membaca, perilaku masyarakat terhadap perpustakaan, dan kepuasan masyarakat terhadap perpustakaan umum. Pada tahun 2025 ditargetkan nilai TKM dapat dicapai pada angka 71,50 sampai tahun 2029 diharapkan dapat mencapai nilai 75,50.

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan, yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya. Target indeks yang diharapkan tahun 2025 adalah sebesar 70,50 dan pada akhir periode Renstra dicapai indeks 72,50.

2.4.2 Terwujudnya Pemajuan Naskah Kuno Nusantara

Keberhasilan terwujudnya pemajuan naskah kuno Nusantara diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Tingkat Kemanfaatan Naskah Kuno Nusantara

Tingkat Kemanfaatan Naskah Kuno Nusantara merupakan instrumen pengukuran untuk mengevaluasi sejauh mana naskah kuno telah dimanfaatkan dalam berbagai aspek seperti aksesibilitas, diseminasi ilmiah, dan pengakuan nasional maupun internasional. Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh indikator utama dengan bobot tertentu, dan disusun untuk dapat menggambarkan kinerja strategis lembaga dalam pemanfaatan koleksi naskah kuno. Target yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 29,4 dan hingga tahun 2029 diharapkan pemanfaatan naskah kuno sampai pada indeks sebesar 54,3.

2. Tingkat Kelestarian Naskah Kuno Nusantara

Tingkat kelestarian naskah kuno Nusantara digunakan untuk mengukur dampak dari kegiatan pelestarian naskah kuno yang dilakukan tiap tahunnya. Indikator ini selaras dengan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pada Pasal 1 ayat (5) yang menegaskan pentingnya pelestarian bahan perpustakaan termasuk naskah kuno sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga memori kolektif bangsa. Target capaian indikator ini pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 18,2 persen dan pada tahun 2029 diharapkan tercapai sebesar 28,8 persen.

2.4.3 Terwujudnya Tata Kelola Perpustakaan Nasional yang Prima

Keberhasilan dari terwujudnya tata kelola Perpustakaan Nasional yang prima, diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan kata lain, merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Target yang ingin dicapai oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2025 adalah 85 dan pada tahun 2029 diharapkan nilainya meningkat menjadi 87.

2. Opini BPK

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian internal.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Targetnya sampai tahun 2029 adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi Kabinet Merah Putih	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045					
Visi Perpustakaan Nasional	Menjadi perpustakaan yang transformatif dalam meningkatkan budaya baca dan literasi untuk mewujudkan bangsa bermartabat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045					
Misi Perpustakaan Nasional	1. Memperkuat budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat; 2. Memperkuat perpustakaan digital dengan memanfaatkan teknologi terkini; 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sesuai standar; 4. Memperkuat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; 5. Memperkuat peran masyarakat dalam gerakan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi; 6. Meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan; 7. Meningkatkan pengelolaan karya cetak dan karya rekam serta pelestarian koleksi secara profesional; 8. Memajukan naskah kuno Nusantara untuk memperkokoh jati diri bangsa					
Tujuan	Mengembangkan budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi melalui perpustakaan yang aktif dan adaptif di tengah masyarakat sebagai ruang publik yang inklusif					
Indikator Tujuan	Nilai Budaya Literasi					
Sasaran	Terwujudnya budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat	Terwujudnya pemajuan naskah kuno Nusantara	Terwujudnya tata kelola Perpustakaan Nasional yang prima			
Indikator Sasaran	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Tingkat kemanfaatan naskah kuno Nusantara	Tingkat kelestarian naskah kuno Nusantara	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini BPK

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, identifikasi risiko menjadi langkah penting dan krusial untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Berbagai tantangan yang teridentifikasi, baik dari aspek internal maupun eksternal, mencerminkan potensi risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan dalam mengembangkan budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi melalui perpustakaan yang aktif dan adaptif di tengah masyarakat sebagai ruang publik yang inklusif. Dengan memahami risiko-risiko ini secara menyeluruh, Perpustakaan Nasional dapat menyusun langkah mitigasi yang tepat guna menjaga kesinambungan dan keberhasilan tujuan secara nasional.

Tabel 2 1 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Resiko	
1.	Terwujudnya budaya baca dan kecakapan literasi Masyarakat	1	Akses terbatas terhadap bahan bacaan bermutu	Peningkatan ketersediaan bahan bacaan bermutu melalui penyediaan koleksi yang relevan, mutakhir, dan sesuai kebutuhan masyarakat	1. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan; 2. Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus; 3. Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi
		2	Advokasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kegiatan literasi rendah	Penyelenggaraan forum-forum atau dialog penyusunan kebijakan yang melibatkan pembuat keputusan di tingkat pusat dan daerah untuk membahas dukungan program literasi.	1. Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus; 2. Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi
		3	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi rendah	Meningkatkan keterlibatan komunitas melalui pembentukan dan pembinaan kelompok baca, klub literasi, atau pegiat literasi.	Pusat Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi
		4	Kolaborasi antar pemangku kepentingan rendah	Membangun dan memperluas jejaring perpustakaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan	1. Pusat data dan Informasi; 2. Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
		5	Kompetensi tenaga perpustakaan dan petugas literasi di lapangan rendah	Meningkatkan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan serta petugas literasi melalui pelatihan, <i>workshop</i> , magang, dan pembelajaran daring yang berkelanjutan, disertai evaluasi kompetensi secara berkala.	1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; 2. Pusat Pembinaan Pustakawan

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Resiko
		6 Tidak teroptimasikannya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan literasi	Mengembangkan platform literasi digital terpadu yang memudahkan akses bahan bacaan, interaksi pembelajaran, dan kolaborasi daring, disertai pelatihan pemanfaatan teknologi bagi tenaga perpustakaan, relawan literasi, dan masyarakat pengguna.	Pusat Data dan Informasi
		7 Sebaran bahan bacaan yang tidak merata	Melakukan pemetaan kebutuhan wilayah dan mengoptimalkan pemanfaatan layanan perpustakaan keliling, pojok baca, dan titik baca serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis untuk memastikan pemerataan akses di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil.	Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
		8 Komitmen Pemerintah dalam peningkatan kecakapan literasi rendah	Melaksanakan advokasi kepada pengambil kebijakan di pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong prioritas program peningkatan kecakapan literasi dalam perencanaan dan penganggaran.	Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
		9 Keterbatasan dalam perolehan data	Mengembangkan sistem pendataan perpustakaan terintegrasi yang dilengkapi dengan mekanisme pelaporan daring, verifikasi data, dan pembaruan berkala, serta melakukan pelatihan bagi petugas terkait untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi, serta dipayungi oleh regulasi yang mengikat.	1. Pusat Data dan Informasi; 2. Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus; 3. Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi
2.	Terwujudnya Pemajuan Naskah Kuno Nusantara	1 Kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah naskah kuno yang kurang	Meningkatkan kegiatan sosialisasi berbasis komunitas melalui pameran, lokakarya, kampanye media, dan kegiatan interaktif di ruang publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai sejarah, budaya, dan pentingnya pelestarian naskah kuno.	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara
		2 Kesadaran Pemerintah Daerah terhadap nilai sejarah naskah kuno yang kurang	Melaksanakan advokasi dan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah melalui forum koordinasi, bimbingan teknis, dan penyusunan	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Resiko
			panduan kebijakan untuk mendorong integrasi pelestarian naskah kuno yang berkelanjutan.	
		3 Digitalisasi dan dokumentasi naskah kuno yang kurang	Memperluas program digitalisasi dan dokumentasi naskah kuno melalui penyediaan peralatan, pelatihan teknis, serta kemitraan dengan lembaga terkait, sehingga koleksi terdokumentasi secara lengkap, aman, dan mudah diakses secara digital.	Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan
		4 Minimnya kajian dan publikasi berbasis naskah kuno	Meningkatkan kegiatan penelitian, kajian, dan publikasi ilmiah berbasis naskah kuno melalui pemberian dukungan riset, fasilitasi, dan penyediaan wadah publikasi dan diseminasi hasil kajian kepada masyarakat luas.	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara
		5 Keterbatasan akses dan informasi terhadap keberadaan naskah kuno	Mengembangkan basis data naskah kuno yang terintegrasi dan mudah diakses.	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara
		6 Kerusakan fisik naskah kuno karena faktor budaya, usia, cuaca, dan lingkungan	Meningkatkan kegiatan konservasi preventif dan restorasi naskah kuno melalui pengendalian kondisi lingkungan penyimpanan, penggunaan bahan dan teknik perawatan yang sesuai standar pelestarian, serta pelatihan bagi pengelola koleksi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.	Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan
		7 Akses terhadap hasil digitalisasi naskah kuno terbatas karena regulasi pemilik koleksi	Melakukan pendekatan ke pemilik koleksi dan melakukan perjanjian yang mengatur hak akses dan pemanfaatan hasil digitalisasi dengan tetap menghormati hak kepemilikan dan melindungi nilai historis naskah.	Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan
		8 Terbatasnya jumlah tenaga di bidang filologi dan konservator	Pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan beasiswa di bidang filologi dan konservasi, serta membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas pelestari untuk memperbanyak	1. Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan; 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko		Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
				tenaga ahli yang kompeten.	
		9	Terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian naskah kuno Nusantara	Mengupayakan pemutakhiran dan melakukan pemeliharaan sarana-prasarana pelestarian naskah kuno sesuai standar, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung proses konservasi, penyimpanan, dan digitalisasi.	Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan
		10	Potensi kehilangan naskah karena disimpan di luar institusi resmi	Meningkatkan identifikasi, pendataan, inventarisasi, dan registrasi naskah yang dimiliki masyarakat, disertai advokasi untuk mendorong masyarakat melakukan penyimpanan, pelestarian, digital naskah tanpa menghilangkan hak.	1. Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara 2. Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan
		11	Potensi kehilangan naskah dan valuasi yang tidak bisa diprediksi sehingga kesulitan dalam mengakuisisi naskah kuno	Menyempurnakan mekanisme akuisisi naskah kuno yang adaptif dan berbasis kajian valuasi dengan melibatkan ahli, lembaga penilai, dan pemilik koleksi, serta mengembangkan skema hibah yang memungkinkan pengalihan kepemilikan atau hak kelola	Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
3.	Terwujudnya Tata Kelola Perpustakaan Nasional yang Prima	1	Komitmen pimpinan dan pegawai terhadap reformasi birokrasi yang rendah	Meningkatkan kegiatan internalisasi dan penguatan budaya kerja serta penerapan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang konsisten di seluruh jenjang organisasi.	Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
		2	Ketidakterpaduan pelaksanaan reformasi birokrasi antar unit kerja	Mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi melalui pembentukan tim pengendali lintas unit, penetapan rencana aksi terpadu, serta forum evaluasi berkala untuk memastikan keselarasan pelaksanaan di seluruh unit kerja.	Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
		3	Pelayanan publik belum berorientasi pada kebutuhan pemustaka	Meningkatkan pengembangan layanan berbasis kebutuhan pemustaka melalui survei kepuasan dan preferensi, analisis data penggunaan layanan, inovasi model pelayanan, serta	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggung Jawab Perlakuan Resiko
			peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan layanan yang cepat, ramah, inklusif, dan relevan.	
		4 Adanya perubahan regulasi dalam evaluasi Reformasi Birokrasi	Melakukan penyesuaian mengacu pada regulasi terbaru, melalui pembentukan tim adaptasi regulasi, penyusunan panduan internal, serta pelatihan berkelanjutan bagi semua anggota organisasi	Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
		5 Kurangnya pemahaman dalam pengelolaan anggaran dan aset	Peningkatan kapasitas dan melakukan pendampingan teknis bagi pegawai pengelolaan anggaran dan aset melalui pelatihan, bimbingan teknis, disertai monitoring dan evaluasi berkala.	1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		6 Proses bisnis belum terdigitalisasi atau tidak terdokumentasi dengan baik	Mengembangkan dan menerapkan proses bisnis berbasis digital yang dilengkapi dengan dokumentasi terstandar dan alur kerja terintegrasi.	Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
		7 Temuan berulang dalam audit keuangan	Melaksanakan tindak lanjut hasil audit yang tepat waktu dan menyeluruh serta monitoring secara berkala untuk memastikan permasalahan yang sama tidak terulang pada periode berikutnya.	Inspektorat

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dituangkan dalam 8 prioritas nasional pembangunan yang terdiri atas:

1. Prioritas Nasional 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4, Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari kedelapan prioritas RPJMN 2025-2029, pemerintah memberikan amanat kepada Perpustakaan Nasional untuk dapat mendukung pencapaian tujuan yang terdapat pada Prioritas Nasional ke-4 yaitu: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z).

Dukungan Perpustakaan Nasional pada Prioritas Nasional ke-4 dilakukan melalui Program Prioritas: Penguatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dengan 2 (dua) Kegiatan Prioritas yaitu: (1) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, dengan Proyek Prioritas (a) Peningkatan layanan literasi yang berkualitas dan merata; dan (b) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; (2) Peningkatan budaya kegemaran membaca, dengan Proyek Prioritas: (a) Pembiasaan kegemaran membaca; dan (b) Penguatan komunitas dan penggerak literasi.

Selain diamanatkan untuk mendukung Prioritas Nasional ke-4, Perpustakaan Nasional juga mendapatkan amanat untuk mendukung Prioritas Nasional ke-8 yaitu: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan Program Prioritas Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa dan

diturunkan pada Kegiatan Prioritas: Perlindungan dan pelestarian warisan budaya. Pada prioritas ini, peran Perpustakaan Nasional akan dikhususkan untuk mendukung Proyek Prioritas Revitalisasi Manuskrip di mana proyek ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai pelestari naskah Nusantara.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat-amanat tersebut, maka Perpustakaan Nasional menyusun arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan tujuan nasional, serta menetapkan strategi yang tepat untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif. Untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi tersebut, disusun pula program dan sasaran program yang terukur dan terintegrasi. Rincian keterkaitan antara arah kebijakan, strategi, program, dan sasaran program sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini menjadi acuan pelaksanaan peran Perpustakaan Nasional dalam mendukung pencapaian prioritas nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2025-2029.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Sasaran Program Perpustakaan Nasional tahun 2025-2029

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	Penguatan kelembagaan Perpustakaan Nasional dan daerah	Perpustakaan dan Literasi	1. Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan; 2. Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan; 3. Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno Nusantara.
		Peningkatan Perpustakaan terakreditasi		
		Penyediaan bahan bacaan bermutu secara merata		
		Peningkatan akses perpustakaan digital dan perpustakaan keliling		
		Revitalisasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan meningkatkan peran pustakawan		
2	Peningkatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi	Pengembangan perpustakaan sebagai ruang kreatif dan destinasi wisata edukatif berbasis literasi	Perpustakaan dan Literasi	1. Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno Nusantara.
		Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan yang berkelanjutan		

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
		Peningkatan peran relawan dan mahasiswa untuk meningkatkan kecakapan literasi		
3	Pemajuan Naskah Kuno Nusantara	Penyusunan, penyediaan, pengkajian, dan pemanfaatan bahan pengayaan literasi berbasis naskah kuno Nusantara		
		Pengajuan naskah kuno Nusantara sebagai Warisan Dokumenter Ingatan Koleksi Nasional (IKON) dan <i>Memory of the World/MoW</i>)		
		Pemanfaatan naskah kuno Nusantara untuk Internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan sejarah bangsa		
		Pelestarian naskah kuno Nusantara		
4	Penguatan kemitraan strategis dan integrasi sistem informasi manajemen Perpustakaan	Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan	Dukungan Manajemen	Terwujudnya peningkatan kinerja Perpustakaan Nasional yang akuntabel
		Integrasi sistem informasi perpustakaan		
		Pengembangan kerja sama perpustakaan		
		Peningkatan inovasi tata kelola Perpustakaan Nasional		

Dalam tabel yang disajikan di atas, terdapat empat arah kebijakan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Dari keempat arah kebijakan tersebut, tiga di antaranya ditetapkan sebagai arah kebijakan utama karena secara langsung mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029, yaitu: (1) Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan; (2) Peningkatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi; dan (3) Pemajuan Naskah Kuno Nusantara.

Ketiga arah kebijakan utama dan strategi Perpustakaan Nasional yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional tersebut diwujudkan melalui program Perpustakaan dan Literasi dengan sasaran program, yaitu (1) Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan, (2) Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai SNP, dan (3) Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno Nusantara

Sementara itu, satu arah kebijakan lainnya dikategorikan sebagai arah kebijakan pendukung. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan target RPJMN, kebijakan ini dipandang penting karena menjadi fondasi bagi keberhasilan implementasi ketiga arah kebijakan utama. Arah kebijakan tersebut adalah Penguatan Kemitraan Strategis dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Nasional yang diwujudkan melalui program Dukungan Manajemen dengan sasaran program yaitu terwujudnya peningkatan kinerja Perpustakaan Nasional yang akuntabel.

3.2.1 Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Strategi pada arah kebijakan ini mencakup penguatan kelembagaan baik di tingkat Perpustakaan Nasional maupun daerah, serta mendorong peningkatan jumlah perpustakaan yang terakreditasi. Selain itu, fokus juga diberikan pada penyediaan bahan bacaan bermutu secara merata. Layanan berbasis teknologi seperti akses perpustakaan digital dan perpustakaan keliling juga diperluas untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh perpustakaan menetap. Revitalisasi program TPBIS menjadi bagian integral untuk memastikan perpustakaan memberikan layanan yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Nasional dan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan kepada pemerintah untuk dapat menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat, sedangkan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerahnya. Untuk itu maka diperlukan kelembagaan yang dapat menaungi dan memastikan bahwa tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang perpustakaan tentunya juga berkewajiban untuk dapat memperkuat keberadaan perpustakaan, baik itu di internal Perpustakaan Nasional sendiri maupun kelembagaan perpustakaan yang ada di daerah. Perpustakaan Nasional harus dapat memperkuat organisasinya agar dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan kebijakan dan perkembangan yang terjadi sekaligus harus dapat memastikan bahwa kelembagaan perpustakaan di daerah dapat terus berdiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menempatkan perpustakaan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga harus dapat meningkatkan perpustakaan-perpustakaan yang ada agar dapat terselenggara sesuai dengan SNP.

2. Peningkatan Perpustakaan Terakreditasi

Perpustakaan Nasional berupaya untuk meningkatkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat melalui penyusunan dan perumusan standar nasional Indonesia (SNI) bidang perpustakaan, SNP, serta melakukan penilaian dan pengukuran tata kelola perpustakaan yang baik pada semua komponen standar. Dengan demikian akreditasi perpustakaan harus dilakukan pada semua perpustakaan di Indonesia guna mewujudkan pengelolaan perpustakaan sesuai SNP yang memenuhi

karakteristik penyelenggaraan perpustakaan yang baik, disertai rencana tindak yang jelas serta implementasinya secara konkret dan konsekuen. Dengan demikian, upaya tersebut dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan perpustakaan dalam peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi di Indonesia.

3. Penyediaan Bahan Bacaan Bermutu secara Merata

Strategi penyediaan bahan bacaan bermutu secara merata merupakan bagian penting dari upaya Perpustakaan Nasional untuk mendukung peningkatan literasi dan pemerataan akses informasi di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis, antara lain pengadaan bahan bacaan bermutu buku setiap tahunnya untuk 10 ribu desa yang masing-masing desa memperoleh 1.000 eksemplar. Program ini memastikan distribusi koleksi buku-buku bermutu ke perpustakaan daerah, lingkungan sekolah, komunitas literasi, dan taman bacaan masyarakat. Selain itu, program bantuan koleksi buku untuk komunitas secara khusus ditujukan untuk memperkuat ketersediaan bahan bacaan di daerah termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dalam ekosistem digital, Perpustakaan Nasional menyediakan akses terhadap ribuan koleksi digital melalui iPusnas, Bintang Pusnas Edu, dan Indonesia *OneSearch* (IOS), yang memungkinkan masyarakat di seluruh penjuru negeri untuk membaca secara daring tanpa batasan ruang dan waktu. Melalui pendekatan ini, Perpustakaan Nasional memastikan bahwa bahan bacaan yang bermutu tidak hanya tersedia di kota-kota besar, tetapi juga dapat dinikmati secara adil dan setara oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri.

4. Peningkatan Akses Perpustakaan Digital dan Perpustakaan Keliling

Strategi peningkatan akses perpustakaan digital dan perpustakaan keliling diimplementasikan oleh Perpustakaan Nasional melalui berbagai program nyata yang menjangkau masyarakat secara lebih luas dan inklusif. Salah satu inisiatif kunci adalah pengembangan Pojok Baca Digital (POCADI) dan Titik Baca, yang menghadirkan akses bahan bacaan digital secara gratis dan mudah diakses di ruang-ruang publik seperti terminal, stasiun, bandara, dan fasilitas pelayanan umum lainnya. POCADI dan Titik Baca menjadi simbol transformasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat urban dan semi-urban.

Di sisi lain, untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, Perpustakaan Nasional memberikan bantuan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan Motor Perpustakaan Keliling kepada perpustakaan daerah, lembaga yang bergerak di bidang literasi, dan komunitas literasi. Bantuan ini memungkinkan layanan perpustakaan hadir langsung di tengah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap fasilitas perpustakaan menetap. Melalui integrasi layanan digital dan layanan bergerak, strategi ini memperkuat misi Perpustakaan Nasional dalam memastikan setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengakses informasi, meningkatkan literasi, dan membangun budaya baca di seluruh Indonesia.

5. Revitalisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan Meningkatkan Peran Pustakawan

Pelaksanaan program TPBIS Perpustakaan Nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan menjadi Prioritas Nasional pada periode RPJMN 2020-2024 serta menjadi program prioritas perpustakaan dalam Renstra

Perpustakaan Nasional 2020-2024. Program TPBIS juga menjadi model percontohan pengelolaan perpustakaan bagi negara-negara *Colombo Plan*, dan masuk ke dalam asosiasi perpustakaan sedunia. Hal tersebut menunjukkan pengelolaan perpustakaan yang inklusif ini tidak hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat negara Indonesia, tetapi juga masyarakat negara lain.

Dalam RPJMN 2025-2029, TPBIS kembali ditetapkan sebagai salah satu proyek prioritas nasional, sekaligus menjadi program prioritas dalam Renstra Perpustakaan Nasional 2025-2029. Sejalan dengan penetapan tersebut, Perpustakaan Nasional berupaya melakukan revitalisasi program TPBIS dengan memperkuat peran pustakawan dan relawan literasi sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan. Jika pada periode sebelumnya fokus TPBIS lebih banyak pada infrastruktur dan pelatihan berbasis komunitas, maka pada periode Renstra mendatang, penguatan akan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan peran aktif pustakawan baik di pusat maupun di daerah dan relawan literasi. Pustakawan diharapkan tidak hanya menjadi penyedia layanan informasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam proses pemberdayaan berbasis literasi. Melalui pendekatan ini, TPBIS diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih konkret terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan potensi lokal, serta penguatan literasi fungsional yang relevan dengan kebutuhan komunitas secara berkelanjutan.

3.2.2 Peningkatan Budaya Baca dan Kecakapan Literasi

Peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi merupakan agenda strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing di era global. Budaya baca tidak hanya mencerminkan tingkat minat terhadap bahan bacaan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat pembelajar yang kritis dan adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks ini, kecakapan literasi tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis secara teknis, melainkan mencakup literasi informasi, digital, dan budaya, yang kesemuanya diperlukan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, melalui penguatan ekosistem literasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, penyediaan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, serta integrasi program literasi dalam kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian, upaya ini akan mendorong transformasi kognitif dan karakter bangsa menuju masyarakat yang inklusif, inovatif, dan berpengetahuan.

Strategi pada arah kebijakan ini mencakup pengembangan perpustakaan sebagai ruang kreatif dan destinasi wisata edukatif berbasis, pembinaan kompetensi tenaga perpustakaan secara berkelanjutan agar memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan peran relawan dan mahasiswa untuk meningkatkan kecakapan literasi

1. Pengembangan Perpustakaan sebagai Ruang Kreatif dan Destinasi Wisata Edukatif Berbasis Literasi

Strategi pengembangan perpustakaan sebagai ruang kreatif dan destinasi wisata edukatif berbasis literasi merupakan upaya transformasi fungsi perpustakaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Perpustakaan tidak lagi dipandang semata sebagai tempat peminjaman dan penyimpanan buku, melainkan sebagai ruang publik yang mampu

menginspirasi, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan kreatif dan rekreatif. Melalui strategi ini, perpustakaan diarahkan untuk menjadi ruang yang inklusif, interaktif, dan atraktif yang dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pembelajaran kolaboratif, ekspresi seni dan budaya, serta eksplorasi pengetahuan secara menyenangkan. Pengembangan ruang kreatif seperti *makerspace*, studio multimedia, ruang budaya lokal, serta pelaksanaan program *edutourism* seperti tur literasi, pameran budaya, dan pelatihan keterampilan menjadi bagian integral dari pelaksanaan strategi ini.

Kolaborasi lintas sektor dengan komunitas literasi, pelaku seni dan budaya, pelaku pariwisata, dan UMKM juga dioptimalkan guna memperkuat posisi perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital seperti *augmented reality* (AR), tur virtual, dan aplikasi perpustakaan interaktif akan meningkatkan daya tarik serta memperluas jangkauan layanan. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat, tetapi juga mendorong kontribusi perpustakaan dalam pengembangan ekonomi kreatif, promosi budaya lokal, dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perpustakaan menjadi ruang yang relevan, hidup, dan berdampak luas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.

2. Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Perpustakaan yang Berkelanjutan

Pustakawan merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan perpustakaan. Ibarat rumah sakit, pustakawan berperan seperti dokter yang menjadi kunci pelayanan, sehingga kehadiran pustakawan sangat penting dan dibutuhkan oleh para pemustaka—baik yang bekerja di balik layar, seperti pustakawan pengolahan, maupun yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Tenaga perpustakaan merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan layanan informasi. Tenaga perpustakaan ini terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis di bidang perpustakaan. Pustakawan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya, guna merespons secara adaptif berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya perubahan perilaku dalam mencari, mengakses, dan memanfaatkan informasi.

Untuk itu, Perpustakaan Nasional perlu melakukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan guna memastikan kompetensi tenaga perpustakaan senantiasa berkembang dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada. Bentuk pembinaan ini dapat mencakup pendampingan atau advokasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, magang, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, sosialisasi, serta sertifikasi pustakawan.

Pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan ini dikembangkan menggunakan sistem pembelajaran secara terpadu dan berkelanjutan yang disebut Wiyata Kinarya Pusat Unggulan Kepustakaan Indonesia. Wiyata Kinarya (WK) Pusat Unggulan Kepustakaan Indonesia membentuk budaya belajar yang berkesinambungan di lingkungan kerja dan sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan WK, transformasi pengembangan kompetensi diarahkan melalui kolaborasi lintas unit yang sinergis, serta penerapan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran terstruktur, interaksi sosial, dan praktik nyata guna memperkuat pemahaman dan kapabilitas secara menyeluruh.

3. Peningkatan Peran Relawan dan Mahasiswa untuk Meningkatkan Kecakapan Literasi

Strategi peningkatan peran relawan dan mahasiswa dalam mendukung kecakapan literasi masyarakat merupakan langkah penting dalam memperkuat jejaring pelibatan publik guna memperluas dampak program literasi secara nyata di masyarakat. Relawan, baik secara individu maupun dalam bentuk komunitas merupakan mitra strategis Perpustakaan Nasional, karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta mampu menjalankan fungsi edukatif secara partisipatif. Perpustakaan Nasional memfasilitasi kontribusi ini melalui program Relawan Literasi Masyarakat (Relima), yakni sebuah inisiatif yang melibatkan relawan secara terorganisir dan terkoordinasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi di lapangan. Perpustakaan Nasional memberikan dukungan pembiayaan dan sumber daya sebagai sarana bagi relawan untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membudayakan literasi secara inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, mahasiswa dipandang sebagai agen transformasi sosial yang memiliki potensi besar untuk mentransfer pengetahuan dan mendorong peningkatan kecakapan literasi masyarakat melalui pendekatan ilmiah dan kontekstual. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional menjalin kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam pelaksanaan program kuliah kerja nyata (KKN), yang mewajibkan mahasiswa yang diikutkan dalam kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan literasi di lokasi penugasan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa memanfaatkan bahan bacaan yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional dan merancang berbagai aktivitas yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pelatihan literasi dasar, pelatihan penggunaan informasi digital, atau pembentukan kelompok baca masyarakat. Kolaborasi ini bukan hanya memperluas cakupan program literasi nasional, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa peningkatan kecakapan literasi adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk relawan dan dunia akademik

3.2.3 Pemajuan Naskah Kuno Nusantara

Naskah kuno Nusantara merupakan warisan budaya tak ternilai yang merefleksikan tingkat intelektual dan kompleksitas peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Kandungan naskah-naskah tersebut tidak hanya mencatat peristiwa penting dalam sejarah, tetapi juga menyimpan nilai-nilai spiritualitas, etika, kearifan lokal, serta pengetahuan praktis dalam berbagai bidang seperti pengobatan, pertanian, perbintangan, dan teknologi. Sebagai contoh, semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi fondasi ideologis persatuan dalam keberagaman, bersumber dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 sebuah karya sastra agung yang ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa Kuno.

Perpustakaan Nasional memiliki mandat strategis dalam pelestarian dan pendayagunaan naskah kuno ini. Hingga saat ini, Perpustakaan Nasional telah menghimpun lebih dari 13.318 naskah kuno dalam berbagai aksara seperti Arab, Jawa, Pegon, Batak, Bugis, Bali, hingga Sunda Kuno dan aksara lainnya, serta dalam beragam bahasa lokal. Kekayaan ini mencerminkan keberagaman identitas dan pengetahuan lokal yang menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa.

Sebagai bagian dari strategi pemajuan naskah kuno, Perpustakaan Nasional berkomitmen pada tiga tujuan utama. Pertama, membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya naskah kuno sebagai sumber pengetahuan dan identitas budaya. Kedua, melakukan perlindungan dan pelestarian naskah-naskah tersebut agar tetap terjaga untuk generasi mendatang melalui konservasi fisik maupun digitalisasi. Ketiga, mendorong aksesibilitas dan pendayagunaan naskah kuno, termasuk kandungan isinya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Dengan demikian, pemajuan Naskah Kuno Nusantara tidak hanya menjadi upaya pelestarian, tetapi juga strategi kebudayaan untuk memperkuat jati diri bangsa dan menginspirasi pembangunan Indonesia di masa depan.

1. Penyusunan, Penyediaan, Pengkajian dan Pemanfaatan Bahan Pengayaan Literasi Berbasis Naskah Kuno Nusantara

Strategi penyusunan, penyediaan, dan pemanfaatan bahan pengayaan literasi berbasis Naskah Kuno Nusantara merupakan upaya sistematis untuk mengangkat kembali kekayaan intelektual lokal sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran lintas generasi. Perpustakaan Nasional memandang bahwa naskah kuno bukan hanya artefak sejarah, tetapi juga sumber nilai, ilmu, dan identitas budaya yang dapat diadaptasi dalam bentuk-bentuk literasi kontemporer. Dalam hal ini, penyusunan bahan pengayaan dilakukan melalui proses kurasi, transliterasi, alih wahana, alih aksara dan alih bahasa agar isi naskah kuno dapat dipahami oleh masyarakat luas, termasuk generasi muda.

Selanjutnya, Perpustakaan Nasional mendorong penyediaan bahan pengayaan ini dalam berbagai format, baik cetak maupun digital, yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen pembaca yang berbeda, mulai dari pelajar hingga komunitas ilmiah. Program ini diperkuat melalui sinergi dengan lembaga pendidikan, komunitas budaya, dan penerbitan nasional.

Dalam aspek pemanfaatan, bahan pengayaan berbasis naskah kuno digunakan sebagai media edukatif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal, dan penguatan karakter. Materi ini dapat dimasukkan dalam kegiatan belajar di sekolah, pelatihan literasi masyarakat, hingga kampanye literasi budaya. Dengan strategi ini, Naskah Kuno Nusantara tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dihidupkan kembali dalam kehidupan masyarakat modern, menjadikannya relevan dan bermakna bagi pembangunan budaya dan kecakapan literasi bangsa.

2. Pengajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai Warisan Dokumenter Ingatan Koleksi Nasional (IKON) dan *Memory of the World/MoW*

Strategi pengajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai bagian dari Ingatan Koleksi Nasional (IKON) dan program *Memory of the World (MoW)* UNESCO merupakan upaya strategis untuk memperkuat posisi naskah-naskah kuno sebagai warisan dokumenter yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan pengetahuan tinggi. IKON adalah program nasional yang dikembangkan untuk mengidentifikasi, mengakui, dan memelihara koleksi dokumenter yang mencerminkan ingatan kolektif bangsa Indonesia. Melalui pengakuan sebagai IKON, naskah kuno mendapatkan legitimasi sebagai sumber pengetahuan penting yang harus dilindungi, dilestarikan, dan didayagunakan untuk mendukung pembangunan literasi, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

Sementara itu, pengajuan ke dalam program MoW UNESCO merupakan langkah lanjutan untuk membawa Naskah Kuno Nusantara ke pengakuan

internasional. Program ini mendorong perlindungan warisan dokumenter dunia yang memiliki nilai universal dan signifikan. Pengakuan dalam MoW tidak hanya meningkatkan visibilitas naskah-naskah Indonesia di dunia, tetapi juga memperkuat kerja sama internasional dalam konservasi, digitalisasi, dan pemanfaatan warisan dokumenter.

Melalui strategi ini, Perpustakaan Nasional ingin memastikan bahwa Naskah Kuno Nusantara tidak hanya menjadi artefak yang tersimpan, tetapi menjadi sumber pengetahuan hidup yang diakui secara nasional dan global. Penguatan melalui IKON dan MoW juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya merawat dan menghargai warisan dokumenter sebagai bagian dari jati diri dan kebanggaan bangsa

3. Pemanfaatan Naskah Kuno Nusantara untuk Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan dan Sejarah Bangsa

Strategi internalisasi sejarah bangsa melalui pemanfaatan naskah kuno bertujuan untuk menanamkan kesadaran historis dan identitas kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui pendekatan yang berbasis pada sumber asli warisan intelektual bangsa. Naskah Kuno Nusantara merupakan rekaman autentik dari perjalanan sejarah, sistem pengetahuan, nilai budaya, serta praktik kehidupan masyarakat masa lampau yang mencerminkan kekayaan dan kebhinekaan peradaban Indonesia. Dengan memanfaatkan naskah-naskah ini dalam berbagai bentuk kegiatan edukatif, seperti pengajaran sejarah di sekolah, pelatihan literasi budaya, pameran tematik, dan penerbitan ulang dalam bahasa yang mudah dipahami. Perpustakaan Nasional mendorong pemaknaan kembali terhadap sejarah bangsa yang berakar dari sumber asli agar lebih mudah dalam proses internalisasi.

Internalisasi ini juga menciptakan ruang refleksi dan apresiasi terhadap kontribusi para leluhur bangsa dalam membangun tatanan sosial dan sistem nilai yang relevan hingga kini. Selain itu, melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya belajar sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga memahami nilai, kearifan lokal, dan semangat kebangsaan yang terkandung dalam teks-teks kuno tersebut. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya memperkuat literasi sejarah, tetapi juga memperkuat identitas nasional, memperluas pemahaman lintas budaya, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan dokumenter bangsa Indonesia.

4. Pelestarian Naskah Kuno Nusantara

Upaya pelestarian naskah kuno Nusantara memerlukan strategi terpadu yang mencakup inventarisasi dan digitalisasi naskah, konservasi fisik, alih aksara, alih wahana dan alih bahasa, serta pemanfaatan dalam pendidikan dan kebudayaan. Pendekatan ini harus didukung oleh kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan mitra internasional, disertai dengan kebijakan perlindungan hukum yang kuat dan pendanaan berkelanjutan. Melalui strategi ini, naskah kuno tidak hanya dapat diselamatkan dari kerusakan dan kepunahan, tetapi juga diaktualisasikan sebagai sumber pengetahuan dan identitas budaya yang relevan bagi generasi masa kini dan mendatang.

3.2.4 Penguatan Kemitraan Strategis dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Nasional

Arah kebijakan penguatan kemitraan strategis dan integrasi sistem informasi manajemen Perpustakaan Nasional difokuskan pada upaya membangun sinergi

yang kuat antar pemangku kepentingan serta mewujudkan sistem layanan perpustakaan yang terintegrasi secara nasional. Melalui kemitraan strategis dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas literasi, Perpustakaan Nasional memperluas jangkauan program dan memperkuat dukungan sumber daya untuk peningkatan layanan. Di sisi lain, integrasi sistem informasi manajemen dilakukan melalui pengembangan platform digital terpadu, harmonisasi kebijakan dan data, serta penguatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan. Kebijakan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan ketiga arah kebijakan utama Perpustakaan Nasional dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan dukungan ekosistem informasi yang solid dan kolaboratif.

1. Peningkatan Kapasitas SDM Perpustakaan Nasional

Strategi peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Nasional diarahkan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan profesional dalam mendukung transformasi layanan Perpustakaan Nasional. Fokus utama dari strategi ini adalah penguatan kompetensi teknis dan manajerial pustakawan serta tenaga pendukung melalui program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, dan pengembangan karier berbasis kinerja. Perpustakaan Nasional mendorong peningkatan literasi digital, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemahaman terhadap kebijakan nasional dan global terkait perpustakaan dan literasi informasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan mitra internasional untuk memperluas wawasan dan membangun jejaring kerja yang produktif. Strategi ini menempatkan SDM sebagai elemen kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan dan program-program prioritas, sekaligus menjadikan Perpustakaan Nasional sebagai organisasi pembelajar yang responsif terhadap dinamika perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

SDM Perpustakaan Nasional harus mampu meningkatkan kompetensinya agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan maupun pendidikan-pendidikan, sehingga ilmunya dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perpustakaan Nasional juga harus memperhatikan terkait peningkatan kompetensinya dengan mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan dan pendidikan, hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelatihan (jamlat) setiap tahun.

2. Integrasi Sistem Informasi Perpustakaan

Integrasi Sistem Informasi Perpustakaan Nasional bertujuan untuk menciptakan ekosistem perpustakaan yang terhubung secara nasional melalui pengembangan dan implementasi sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan pengelolaan koleksi, layanan, dan data perpustakaan dari seluruh Indonesia. Kebijakan ini mencakup standarisasi proses dan data, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM di seluruh jaringan perpustakaan. Dengan demikian, Perpustakaan Nasional akan memastikan layanan perpustakaan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus mendukung transformasi digital dan memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam penyediaan layanan informasi yang berkualitas.

3. Pengembangan Kerja Sama Perpustakaan

Tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional mengharuskan untuk dapat menjangkau semua jenis perpustakaan disemua wilayah Indonesia. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut tentunya diperlukan sumber daya yang cukup baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Namun pada kenyataan sumber daya yang dimiliki sangatlah tidak memadai bila dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi, jumlah dan kondisi perpustakaan, dan kondisi geografis.

Jika mengandalkan kekuatan sumber daya yang dimiliki tentunya hal tersebut akan sangat sulit terwujud dalam meningkatkan kualitas layanan yang merata, sehingga diperlukan strategi yang dapat meminimalisir atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Untuk itu, melalui pengembangan kerja sama yang dilakukan tentunya akan sangat membantu terhadap pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional.

Penguatan dan perluasan kerja sama merupakan strategi yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya. Kerja sama dilakukan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik antar instansi pemerintah di pusat, dengan Pemerintah Daerah, badan usaha seperti dengan BUMN, Badan Layanan Umum, maupun dengan badan hukum. Kerja sama juga dapat dilakukan dengan pihak swasta seperti dengan perusahaan-perusahaan yang salah satunya dengan mengoptimalkan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4. Peningkatkan Inovasi Tata Kelola Perpustakaan Nasional

Dalam menghadapi tantangan era digital dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks, Perpustakaan Nasional dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam tata kelola kelembagaan perpustakaan. Peningkatan inovasi tata kelola menjadi pilar penting dalam menciptakan organisasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan layanan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional yang menempatkan pelayanan publik sebagai fokus utama.

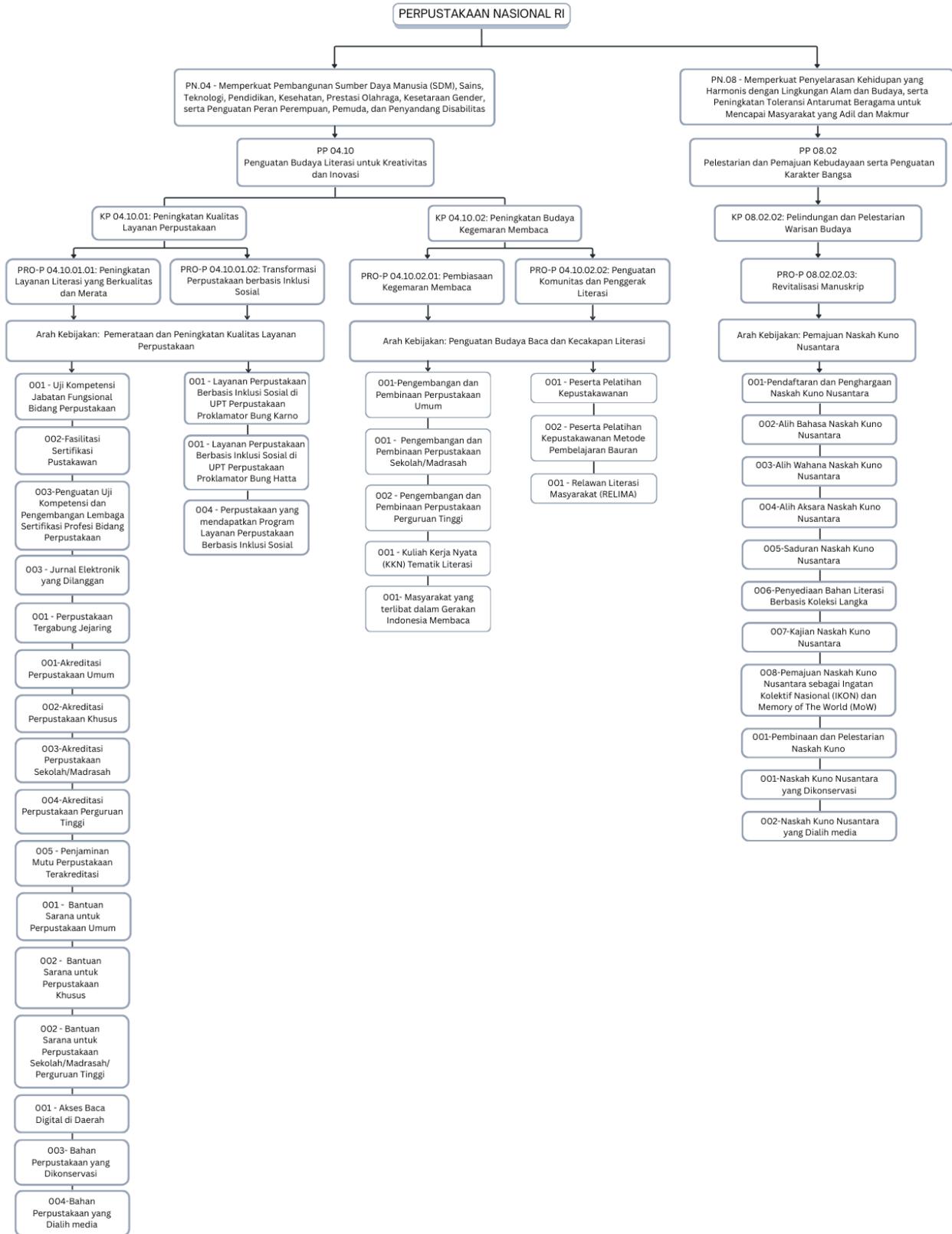
Salah satu bentuk inovasi tata kelola yang dilakukan adalah penguatan sistem manajemen perpustakaan berbasis data dan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koleksi, layanan digital, serta integrasi data lintas sektor melalui platform digital seperti iPusnas, Bintang Pusnas, Kastara, dan *e-Resource* menjadi bagian dari upaya efisiensi dan perluasan jangkauan layanan. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga mendorong pengembangan ekosistem literasi yang kolaboratif dengan melibatkan Pemerintah Daerah, komunitas, dan mitra strategis dalam proses perencanaan program dan anggaran dalam mendorong inovasi tata kelola.

Peningkatan kapasitas SDM dan reformulasi struktur organisasi juga menjadi fokus dalam mendukung tata kelola yang inovatif. Dengan penyusunan standar layanan berbasis inklusi sosial dan penguatan regulasi internal, Perpustakaan Nasional diarahkan untuk menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam pengelolaan pengetahuan dan literasi masyarakat. Inovasi tata kelola ini diharapkan mampu memperkuat posisi perpustakaan sebagai lembaga strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, Untuk melihat bagaimana keterkaitan antara prioritas nasional yang terdapat dalam RPJMN 2025-2029 dengan arah kebijakan Perpustakaan Nasional serta untuk dapat mengetahui sejauh mana arah kebijakan tersebut mendukung terhadap pencapaian tujuan prioritas nasional. Dari *cascading* dapat tergambar keterkaitan prioritas nasional 4 (empat) yang diantaranya didukung oleh program prioritas Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi, dengan kegiatan prioritas diantaranya: (1) Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dengan proyek prioritas; (a) Peningkatan Layanan Literasi yang Berkualitas dan Merata, sampai dengan rincian output prioritasnya; dan (b) Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial, sampai dengan rincian output prioritasnya. (2) Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca dengan proyek prioritas (a) Pembiasaan Kegemaran Membaca, sampai dengan rincian output prioritasnya; (b) Penguatan Komunitas dan Penggerak Literasi, sampai dengan rincian output prioritasnya. Sedangkan keterkaitan prioritas 8 (delapan) diantaranya didukung oleh program prioritas Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa, dengan salah satu kegiatan prioritasnya adalah Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya, yang salah satunya melalui proyek prioritasnya Revitalisasi Manuskrip. Rincian output untuk proyek revitalisasi manuskrip akan difokuskan pada identifikasi, pendaftaran, preservasi dan alih media, alih wahana, alih bahasa, alih aksara, dan pengajuan Naskah Kuno Nusantara Sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON)

Keterkaitan tersebut akan menjadi acuan bagi Perpustakaan Nasional dan pemangku kepentingan dalam penyusunan program, kegiatan maupun kebutuhan anggarannya. *cascading* yang telah disusun dapat dilihat lengkap sebagaimana di bawah ini:

Gambar 3.1 *Cascading* Integrasi RPJMN 2025-2029 dan Renstra Perpustakaan Nasional 2025-2029



3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam penyusunan Renstra Perpustakaan Nasional untuk periode 2025-2029. Regulasi yang kuat dan adaptif berperan penting dalam menetapkan dan mempertegas fungsi serta peran Perpustakaan Nasional. Dengan regulasi yang jelas, perpustakaan dapat efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya pengetahuan, tetapi juga termasuk menyediakan akses informasi yang merata dan mendukung inisiatif pendidikan serta penelitian. Regulasi yang baik juga memastikan bahwa layanan yang disediakan oleh perpustakaan, baik secara fisik maupun digital, dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan kualitas yang tinggi. Di era digital, regulasi juga memainkan peran krusial dalam mengatasi isu-isu terkait dengan hak intelektual dan privasi data. Hal ini menjadi semakin penting mengingat perpustakaan kini tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan buku fisik, tetapi juga sebagai penyedia konten digital. Regulasi harus mampu mengatur tentang hak cipta, penggunaan data pengguna, dan aspek keamanan digital, sehingga dapat melindungi hak pengarang dan mencegah penyalahgunaan bahan perpustakaan.

Regulasi di bidang perpustakaan ke depan harus fleksibel dan mampu beradaptasi namun memiliki kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perpustakaan tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dinamis. Regulasi juga harus beradaptasi untuk mencakup pengelolaan sumber daya digital serta integrasi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan *big data*.

Dengan demikian, perpustakaan dapat terus menjadi sumber informasi yang berharga dan terkini bagi masyarakat. Aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Regulasi harus mendukung inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para profesional perpustakaan. Hal ini mencakup pelatihan, pengembangan karir, serta strategi rekrutmen dan retensi tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan luas adalah kunci dalam menyediakan layanan perpustakaan yang berkualitas.

Kerja sama dan jaringan juga menjadi bagian penting yang harus didukung oleh regulasi yang kuat. Pembentukan jaringan dan kerja sama, baik di tingkat nasional maupun internasional, memungkinkan perpustakaan untuk bertukar pengetahuan, praktek terbaik, dan sumber daya. Hal ini sangat penting di era globalisasi saat ini, di mana akses informasi dan pengetahuan tidak lagi terbatas oleh batas geografis.

Terakhir, regulasi harus memperhatikan kebutuhan spesifik berbagai komunitas, termasuk kelompok minoritas dan daerah terpencil. Hal ini agar dapat memastikan bahwa layanan perpustakaan dapat dinikmati oleh semua segmen masyarakat, termasuk mereka yang mungkin memiliki kebutuhan khusus. Selain itu, regulasi yang efisien juga penting untuk pengelolaan anggaran dan dana perpustakaan, memastikan alokasi sumber daya yang efisien, efektif, dan transparan. Dengan demikian, kerangka regulasi yang kuat dan inklusif akan memastikan bahwa Perpustakaan Nasional siap menghadapi tantangan masa depan dan memaksimalkan potensinya sebagai pusat pengetahuan dan sumber daya informasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun regulasi yang relevan dengan tugas Perpustakaan Nasional atau yang berkaitan dengan tugas

tersebut. Selain itu, guna menguatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional, diperlukan pengaturan yang memadai yang dapat diterapkan hingga ke perpustakaan-perpustakaan terkecil di tingkat masyarakat. Langkah awal dengan dimasukkan usulan perundang-undangan dalam Program Legislasi Nasional untuk periode 2025-2029.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Kerangka kelembagaan yang disusun oleh Perpustakaan Nasional dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN, sesuai dengan fungsi, serta Visi dan Misi Perpustakaan Nasional;
2. Mempertajam Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan Nasional sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara;
3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan Program pembangunan nasional;
4. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Berpedoman kepada hal tersebut maka, Perpustakaan Nasional menyusun rumusan terkait kerangka kelembagaan dengan membagi kepada 3 fungsi peran-peran yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, ketiga fungsi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Peran dan Fungsi Perpustakaan Nasional

Fungsi Manajemen	Fungsi Teknis	Fungsi Pengendalian
Perencanaan	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Pengawasan
Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Data	Evaluasi
Pengelolaan SDM	Pembinaan Tenaga Perpustakaan	Pelaporan
Pengelolaan Regulasi dan hukum	Pengembangan dan Pengelolaan Koleksi	
Pengelolaan Rumah Tangga	Layanan Perpustakaan	
Kehumasan dan kerja sama	Pengelolaan Naskah Kuno Nusantara	

Kerangka kelembagaan yang disusun akan dituangkan dalam struktur organisasi Perpustakaan Nasional. Dengan mengacu pada rumusan kerangka

kelembagaan di atas, struktur organisasi Perpustakaan Nasional ke depan yang harus memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen melaksanakan tugas-tugas manajerial yang diberikan oleh lembaga. Fungsi ini mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas teknis utama Perpustakaan Nasional, antara lain perencanaan, pengelolaan kerumahtanggaan, serta penyusunan dan penetapan regulasi. Dengan demikian, unit kerja yang harus dapat menjalankan fungsi manajemen meliputi:

a. Unit kerja perencanaan

Unit kerja perencanaan bertugas untuk menyusun perencanaan baik itu perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan memastikan bahwa anggaran dapat teralokasikan.

b. Unit kerja keuangan

Unit kerja keuangan bertugas untuk mengelola anggaran dan keuangan yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, memastikan bahwa anggaran yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional dapat digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

c. Unit kerja pengelolaan SDM

Unit kerja pengelolaan SDM harus dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM di tiap unit kerja sehingga bertanggungjawab dalam proses rekrutmen, penempatan pegawai, sampai peningkatan kompetensi pegawai.

d. Unit kerja pengelolaan regulasi dan hukum

Unit kerja ini bersama unit kerja lain bersama-sama menyusun regulasi yang dibutuhkan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia baik internal maupun aturan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai lembaga pembina perpustakaan, selain itu unit kerja ini juga harus bisa menjamin kepastian hukum bagi instansi dan pegawainya.

e. Unit kerja pengelolaan rumah tangga

Unit kerja ini harus bisa melakukan pengelolaan terhadap kebutuhan rumah tangga Perpustakaan Nasional seperti penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan aset, dan pemenuhan kebutuhan kerja pegawai.

f. Kehumasan dan kerja sama

Kehumasan dan kerja sama bertugas untuk menjadi penghubung antara Perpustakaan Nasional dengan *stakeholder* dan masyarakat lainnya. Kehumasan juga harus bisa membangun citra Perpustakaan Nasional sedangkan kerja sama harus bisa menyusun kebutuhan kerja sama Perpustakaan Nasional dengan pihak lain.

2. Fungsi Teknis

a. Unit kerja pembinaan dan pengembangan perpustakaan

Unit kerja ini mempunyai kewajiban untuk dapat memastikan terselenggaranya perpustakaan di Indonesia, dan bertanggungjawab memastikan penyelenggaraan perpustakaan memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Pembinaan dan pengembangan dilakukan terhadap semua jenis perpustakaan baik itu perpustakaan umum, khusus,

sekolah/madrasah, dan perguruan tinggi termasuk perpustakaan-perpustakaan komunitas.

- b. Unit kerja pembinaan tenaga perpustakaan
Unit kerja ini memastikan kebutuhan tenaga perpustakaan dapat terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Di samping itu bertanggungjawab terhadap peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan baik di pusat maupun di daerah.
- c. Unit kerja pengelolaan data
Ketersediaan data perpustakaan merupakan kewajiban utama unit kerja ini. Data yang akurat sangat penting untuk penetapan kebijakan, tidak hanya bagi Perpustakaan Nasional, tetapi juga bagi pemangku kepentingan lain, seperti perpustakaan daerah, serta kementerian atau lembaga terkait. Oleh karena itu, unit kerja ini harus mampu mengolah data menjadi informasi yang relevan dan mudah digunakan.
- d. Unit kerja pengembangan dan pengelolaan koleksi
Pengadaan koleksi menjadi tanggungjawab unit kerja ini pengadaan baik pengadaan yang berasal dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam atau pengadaan koleksi yang bersumber dari pengadaan. Pengadaan koleksi tersebut harus dapat dikelola sehingga menjadi koleksi yang siap untuk dilayankan kepada masyarakat dan terjaga kelestariannya.
- e. Unit kerja layanan perpustakaan.
Unit kerja layanan perpustakaan mengemban tugas untuk menyelenggarakan layanan Perpustakaan Nasional, menyajikan koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan menyediakan fasilitas-fasilitas layanan perpustakaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Unit ini harus mampu menyediakan koleksi yang lengkap, relevan, dan mutakhir dengan ruangan yang nyaman, memanfaatkan teknologi terkini, ruang layanan yang nyaman dan multiguna, yang didukung oleh tenaga yang ramah, kompeten, terlatih dalam penelusuran informasi dan literasi digital. Secara terus menerus menyajikan program literasi berbasis komunitas dan terus memperkuat layanan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial seperti pelatihan literasi informasi, kelas menulis, klub buku, untuk kalangan berbagai usia dan latar belakang. Perpustakaan masa kini berkembang tidak hanya sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai ruang rekreasi edukatif yang menyenangkan dan inklusif. Melalui penyediaan layanan yang interaktif seperti ruang baca tematik, sudut kreatif (*creative corner*), ruang audiovisual, serta program literasi berbasis permainan dan kegiatan budaya, perpustakaan menciptakan pengalaman belajar yang sekaligus menghibur. Fungsi rekreasi edukatif ini menjadikan perpustakaan sebagai destinasi keluarga dan komunitas, tempat masyarakat dapat mengembangkan wawasan, meningkatkan literasi, dan menikmati waktu luang secara produktif dalam suasana yang ramah dan inspiratif.
- f. Unit kerja pengelolaan naskah kuno Nusantara
Naskah kuno Nusantara memerlukan perhatian dan pengelolaan lebih lanjut dan merupakan arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional ke depan. Pengelolaan naskah kuno Nusantara sangatlah krusial karena bukan saja menjadi warisan identitas bangsa yang menyimpan sejarah, kearifan lokal, ilmu

pengobatan, sastra, serta nilai budaya, tetapi juga menyediakan sumber riset orisinal tak tergantikan bagi filologi, linguistik, antropologi, dan sains. Naskah kuno Nusantara juga dijadikan dokumen dalam memperkuat diplomasi serta *soft power* Indonesia lewat naskah tersebut. Melihat pentingnya naskah kuno Nusantara, diperlukan unit kerja tersendiri yang menangani terkait pengelolaan naskah kuno yang melaksanakan kegiatan identifikasi, pengolahan sampai pada pemanfaatan naskah kuno oleh masyarakat luas.

g. Unit Pelayanan Teknis

Perpustakaan Proklamator terdiri dari Perpustakaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Proklamator mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan koleksi literatur mengenai tokoh Proklamator Indonesia yang tidak bisa dipisahkan. Struktur kelembagaan kedua UPT tersebut berbeda dengan tugas pokok dan fungsi yang memiliki kesamaan, dan kedepannya perlu penguatan kelembagaan agar layanan kedua UPT tersebut dapat berjalan optimal.

3. Fungsi Pengendalian

a. Unit kerja pengawasan

Unit kerja ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

b. Unit kerja evaluasi

Unit kerja evaluasi mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan maupun perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

c. Unit kerja pelaporan

Unit kerja pelaporan bertugas untuk menyusun laporan kinerja yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan kemudian menyerahkan hasil laporan tersebut kepada pihak yang berkepentingan yaitu pimpinan Perpustakaan Nasional dan para pemangku kepentingan.

Dari penjelasan terkait peran dan fungsi di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Perpustakaan Nasional melalui diagram di bawah ini:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional



Gambar tersebut menunjukkan struktur organisasi strategis di lingkungan Perpustakaan Nasional. Kepala Perpustakaan Nasional sebagai titik pusat pengambil keputusan dan pengarah strategi berada di puncak. Di bawahnya, terdapat tiga unit kerja utama yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan nasional, yaitu unit kerja manajemen (Sekretariat Utama), unit kerja pengendalian (Inspektorat), dan unit kerja teknis (Deputi). Ketiga unit ini memiliki peran yang saling terkait dan berfungsi secara sinergis untuk memastikan tercapainya tujuan strategis organisasi. Unit Manajemen bertanggung jawab terhadap pengelolaan administratif dan kebijakan. Unit pengendalian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Sementara unit teknis fokus pada aspek teknis dan operasional di lapangan. Dengan struktur ini, perpustakaan nasional dapat menjalankan fungsi secara efektif dan efisien sesuai strategi yang telah ditetapkan.

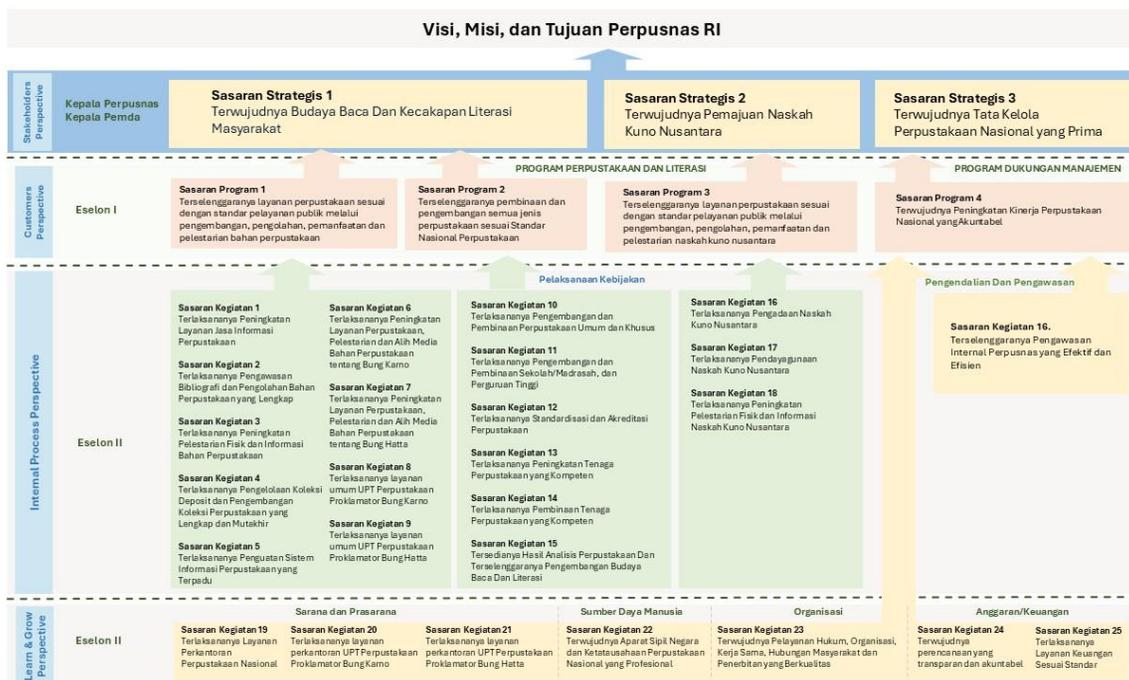
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan serta mendukung Asta Cita Kabinet Merah Putih dan kebijakan nasional, Perpustakaan Nasional menetapkan tiga sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun 2025-2029 sekaligus mencerminkan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Target kinerja dan kerangka pendanaan 2025-2029 harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja, mulai dari level dampak, hasil, hingga keluaran yang menjadi tanggung jawab lembaga pada setiap tingkatan. Gambaran keterkaitan antarlevel tersebut dapat dilihat pada pohon kinerja berikut.

Gambar 4.1 Pohon Kinerja Perpustakaan Nasional tahun 2025-2029



4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja Perpustakaan Nasional pada tahun 2025-2029, dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta agenda pembangunan nasional, diwujudkan dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target dan Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Strategis/ Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 1	Terwujudnya budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat						
IKSS 1.1	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50
IKSS 1.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50

Kode	Sasaran Strategis/ Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Terwujudnya pemajuan naskah kuno Nusantara						
IKSS 2.1	Tingkat kemanfaatan naskah kuno Nusantara	Indeks	29,4	34,5	40,2	47,0	54,3
IKSS 2.2	Tingkat kelestarian naskah kuno Nusantara	Persen	18,2	20,7	23,3	26,0	28,8
SS 3	Terwujudnya tata kelola Perpustakaan Nasional yang prima						
IKSS 3.1	01-Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,0	85,5	86,0	86,5	87,0
IKSS 3.2	02-Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program

Perwujudan target kinerja sasaran strategis Perpustakaan Nasional 2025-2029 dicapai melalui 1 (satu) program teknis yaitu Program Perpustakaan dan Literasi serta 1 (satu) program Dukungan Manajemen. Sasaran dan target dari masing-masing program tersebut dirinci dalam tabel berikut, yang menggambarkan keterkaitan antara program, indikator kinerja utama, serta capaian yang ingin diraih dalam mendukung visi pembangunan nasional dan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

Tabel 4.2 Target dan Sasaran Program Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029

Kode	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN LITERASI							
SP 1	Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan						
IKSP 1.1	Tingkat kemanfaatan koleksi Perpustakaan Nasional	Persen	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39
IKSP 1.2	Tingkat keterolahan koleksi Perpustakaan Nasional	Persen	100	100	100	100	100
IKSP 1.3	Tingkat kelestarian bahan perpustakaan	Persen	46,2	47,3	48,5	49,8	51,3
IKSP 1.4	Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam	Persen	51	53	55	57	59
IKSP 1.5	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0
IKSP 1.6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55
SP 2	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan						
IKSP 2.1	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan umum	Rasio	1:6	1:5	1:4	1:3	1:2
IKSP 2.2	Peningkatan tenaga perpustakaan yang kompeten	Persen	18,82	19,85	21,57	23,60	25,79
IKSP 2.3	Tingkat kemanfaatan perpustakaan	Persen	2,31	2,39	2,44	2,48	2,51

Kode	Sasaran Program /Indikator	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKSP 2.4	Peningkatan perpustakaan sesuai dengan standar nasional	Persen	2,00	2,2	2,4	2,6	2,8
SP 3	Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno Nusantara						
IKSP 3.1	Persentase peningkatan naskah kuno Nusantara yang dimanfaatkan	Persen	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8
IKSP 3.2	Persentase peningkatan naskah kuno Nusantara yang dilestarikan	Persen	18,2	18,9	19,6	21,3	22,0
IKSP 3.3	Naskah kuno Nusantara yang diajukan sebagai <i>Memory of the World</i>	Naskah	2	2	2	2	2
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP 4	Terwujudnya peningkatan kinerja Perpustakaan Nasional yang akuntabel						
IKSP 4.1	Nilai SAKIP PERPUSNAS	Nilai	73,54	75,00	76,50	78,00	80,00
IKSP 4.2	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	95,5	95,6	95,7	95,8	95,9
IKSP 4.3	Survey Penilaian Integritas	Nilai	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0
IKSP 4.4	Nilai Sistem Merit	Nilai	280	282	284	286	288
IKSP 4.5	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71
IKSP 4.6	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5
IKSP 4.7	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	*)	1,80	2,00	2,30	2,60
IKSP 4.8	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9

Keterangan : *) belum ada pengukuran

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan, Perpustakaan Nasional membutuhkan alokasi anggaran sampai dengan tahun 2029 diproyeksikan sebesar Rp5.045.339.022.000,00 (Lima triliun empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh dua ribu rupiah). Proyeksi kebutuhan anggaran ini mencakup pelaksanaan 2 program yang telah ditetapkan yaitu Program Perpustakaan dan Literasi sebesar Rp3.178.391.409.000,00 (Tiga triliun seratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.866.947.613.000,00 (Satu triliun delapan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah). Pendanaan direncanakan bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam upaya peningkatan kecakapan literasi masyarakat, Perpustakaan Nasional akan mengupayakan optimalisasi pendanaan non-APBN sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program dan perluasan jangkauan layanan. Upaya ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui pemanfaatan dana hibah, kemitraan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta alternatif sumber pendanaan lain yang sah dan relevan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perpustakaan, tetapi juga untuk mendorong partisipasi multipihak dalam mendukung agenda literasi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan tersedianya dukungan pendanaan tersebut, diharapkan implementasi arah kebijakan, strategi program, dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Selain belanja pemerintah pusat, Perpustakaan Nasional sejak tahun 2019 memperoleh sumber pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah yaitu berupa Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun nonfisik. Skema ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan layanan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia serta mendukung peningkatan literasi masyarakat melalui pembangunan sarana dan penguatan kapasitas layanan perpustakaan di daerah. Diharapkan pada periode Renstra tahun 2025-2029 ini, DAK Fisik Subbidang Perpustakaan dan DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan berkelanjutan guna memperkuat layanan perpustakaan di daerah serta mendukung pencapaian tujuan meningkatkan nilai budaya literasi.

BAB V PENUTUP

Renstra Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pembangunan bidang perpustakaan yang sejalan dengan arah RPJMN 2025-2029 dan merupakan bagian dari tahap awal RPJPN 2025-2045. Dalam kerangka tersebut, Perpustakaan Nasional menempatkan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi sebagai fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga, masukan dari para pemangku kepentingan, serta mengikuti regulasi perencanaan nasional untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis yang dirumuskan mampu menjawab tantangan zaman dan mendorong kemajuan bangsa.

Melalui visi *“Menjadi perpustakaan yang transformatif dalam meningkatkan budaya baca dan literasi untuk mewujudkan bangsa bermartabat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*, seluruh program dan kegiatan Perpustakaan Nasional difokuskan pada peningkatan akses, pemerataan layanan, serta penguatan fungsi perpustakaan sebagai ruang publik yang edukatif, kreatif, dan inklusif. Program Perpustakaan dan Literasi dirancang untuk memperluas ketersediaan bahan bacaan bermutu, memperkuat literasi dasar hingga literasi digital, serta menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kelompok rentan dan daerah tertinggal. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan relawan dan komunitas literasi menjadi strategi utama dalam menciptakan ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan.

Renstra ini menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan program, pengukuran kinerja, serta pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan di seluruh satuan kerja Perpustakaan Nasional. Melalui pelaksanaan yang konsisten, terukur, dan berbasis teknologi, Renstra ini diharapkan mendorong terbangunnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang berpengetahuan, kritis, dan adaptif terhadap perubahan global. Apabila terdapat dinamika kebijakan dan isu strategis nasional di masa mendatang, penyesuaian terhadap Renstra akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Renstra Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 menjadi instrumen kunci dalam mendukung pembangunan SDM unggul melalui penguatan budaya baca dan peningkatan kecakapan literasi masyarakat Indonesia.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA									721.684	993.343	1.035.910	1.109.092	1.185.310	
SASARAN STRATEGIS 1	Terwujudnya budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat								444.045	594.215	624.480	663.842	703.444	Kepala Perpustakaan Nasional
	01-Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai		71,50	72,50	73,50	74,50	75,50						
	02-Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks		70,50	71,00	71,50	72,00	72,50						
SASARAN STRATEGIS 2	Terwujudnya pemajuan naskah kuno nusantara								15.550	29.583	31.857	34.336	37.040	Kepala Perpustakaan Nasional
	01-Tingkat kemanfaatan naskah kuno Nusantara	Indeks		29,4	34,5	40,2	47,0	54,3						
	02-Tingkat kelestarian naskah kuno Nusantara	Persen		18,2	20,7	23,3	26,0	28,8						
SASARAN STRATEGIS 3	Terwujudnya Tata Kelola Perpustakaan Nasional yang Prima								262.090	369.545	379.573	410.914	444.826	Kepala Perpustakaan Nasional
	01-Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		85,0	85,5	86,0	86,5	87,0						
	02-Opini BPK	Opini		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
PROGRAM PERPUSTAKAAN DAN LITERASI									459.595	623.798	656.336	698.178	740.484	
Sasaran Program 1	Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan								147.716	159.066	164.420	177.426	190.913	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
	01-Tingkat kemanfaatan koleksi Perpustakaan Nasional	Persen		1,35	1,36	1,37	1,38	1,39						
	02-Tingkat keterolahan koleksi Perpustakaan Nasional	Persen		100	100	100	100	100						
	03-Tingkat kelestarian bahan perpustakaan	Persen		46,2	47,3	48,5	49,8	51,3						
	04-Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam	Persen		51	53	55	57	59						
	05-Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai		90,0	90,5	91,0	91,5	92,0						
	06-Indeks Pelayanan Publik	Indeks		4,51	4,52	4,53	4,54	4,55						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Sasaran Program 2	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan									296.330	435.150	460.060	486.416	512.531	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
	01-Rasio kecukupan koleksi perpustakaan umum	Rasio		1:6	1:5	1:4	1:3	1:2							
	02- Peningkatan tenaga perpustakaan yang kompeten	Persen		18,82	19,85	21,57	23,60	25,79							
	03-Tingkat kemanfaatan perpustakaan	Persen		2,31	2,39	2,44	2,48	2,51							
	04-Peningkatan perpustakaan sesuai dengan standar nasional	Persen		2,00	2,2	2,4	2,6	2,8							
Sasaran Program 3	Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno Nusantara									15.550	29.583	31.857	34.336	37.040	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi
	01-Persentase peningkatan naskah kuno Nusantara yang dimanfaatkan	Persen		16,4	16,5	16,6	16,7	16,8							
	02-Persentase peningkatan naskah nuno Nusantara yang dilestarikan	Persen		18,2	18,9	19,6	21,3	22,0							
	03- Naskah Kuno Nusantara yang diajukan sebagai Memory Of the World	Naskah		2	2	2	2	2							
3004 - Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara										21.046	26.660	22.495	24.800	27.343	Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Peningkatan Layanan Jasa Informasi Perpustakaan									12.047	14.783	9.382	10.321	11.353	
	01-Tingkat kepuasan pemustaka pada layanan jasa perpustakaan dan informasi	Nilai		90,0	90,5	91,0	91,5	92,0							
	02-Persentase Peningkatan Kunjungan Pemustaka di Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara	Persen		5	5	5	5	5							
	03-Persentase Peningkatan Anggota Perpustakaan Nasional	Persen		1,0	1,1	1,2	1,3	1,4							
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi									2.675	2.943	3.237	3.561	3.917	
01.AEF.001	Sosialisasi, Pameran, dan Pemasarakatan		Pusat	39.900	41.843	43.935	46.131	48.437		2.675	2.943	3.237	3.561	3.917	
01.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat									9.372	11.840	6.146	6.760	7.436	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.BAA.001	Pemustaka Yang Memanfaatkan Layanan		Pusat	30.651.717	32.184.303	33.793.518	35.483.194	37.257.354	9.372	11.840	6.146	6.760	7.436	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pendayagunaan naskah kuno Nusantara								8.999	11.877	13.113	14.479	15.991	
	01-Persentase Peningkatan Alih Aksara, Alih Bahasa, Kajian dan Karya Tulis Kreatif berbasis Naskah Kuno Nusantara	Persen		6,9	7,1	7,4	7,8	8,2						
	02-Persentase peningkatan pendaftaran naskah kuno Nusantara	Persen		20,4	24,9	29,9	35,2	41,2						
01.RAA	Sarana Bidang Pendidikan								8.999	11.877	13.113	14.479	15.991	
01.RAA.001	Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno Nusantara	Naskah	Pusat	4.200	4.600	5.000	5.400	6.000	833	958	1.102	1.267	1.457	
01.RAA.002	Alih Bahasa Naskah Kuno Nusantara	Naskah	Pusat	80	90	100	110	120	1.537	2.705	2.976	3.274	3.601	
01.RAA.003	Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara	Naskah	Pusat	50	60	70	80	100	902	1.511	1.662	1.828	2.011	
01.RAA.004	Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara	Naskah	Pusat	80	90	100	110	120	1.028	1.195	1.315	1.446	1.591	
01.RAA.005	Saduran Naskah Kuno Nusantara	Naskah	Pusat	10	12	14	16	20	183	220	242	266	292	
01.RAA.006	Penyediaan Bahan Literasi Berbasis Koleksi Langka	Naskah	Pusat	47	48	49	50	50	415	1.476	1.623	1.786	1.964	
01.RAA.007	Kajian Naskah Kuno Nusantara	Naskah	Pusat	20	22	24	26	30	365	403	443	487	536	
01.RAA.008	Pemajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of The World (MoW)	Naskah	Pusat	9	9	9	9	9	3.737	3.410	3.751	4.126	4.539	
3005 - Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan									14.530	70.512	77.456	85.079	91.445	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten								14.530	70.512	77.456	85.079	91.445	
	01-Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan	Nilai		86,0	86,5	87,0	87,5	88,0						
	02-Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Memperoleh Pelatihan Kepustakawanan	Orang		15.715	16.711	18.403	20.261	22.302						
01.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								0	52.965	55.613	58.394	61.314	
01.BDC.001	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan dan Kepustakawanan	Orang	Pusat	-	15.000	15.000	15.000	15.000	0	52.965	55.613	58.394	61.314	
01.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan								4.695	5.634	6.761	8.113	9.736	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.DCI.001	ASN Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	Pusat	655	721	793	872	959	4.695	5.634	6.761	8.113	9.736	
01.SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan								9.835	11.913	15.082	18.572	20.396	
01.SCI.001	Peserta Pelatihan Kepustakawanan	Orang	Pusat	15.000	15.900	17.490	19.239	21.163	9.468	11.361	14.346	17.652	19.292	
01.SCI.002	Peserta Pelatihan Kepustakawanan Metode Pembelajaran Bauran	Orang	Pusat	60	90	120	150	180	368	552	736	920	1.104	
3008 - Pembinaan Pustakawan									6.240	9.332	10.708	11.919	13.364	Pusat Pembinaan Pustakawan
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Pembinaan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten								6.240	9.332	10.708	11.919	13.364	
	01-Persentase Peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Dibina dan Ditingkatkan Kompetensinya	Persen		19,94	20,12	20,33	20,55	20,81						
	02-Tingkat Kelulusan Peserta Uji Kompetensi	Persen		60	61	62	63	64						
	03-Tingkat Kepuasan Pembinaan Tenaga Perpustakaan	Nilai		70,0	72,5	75,0	78,0	80,0						
01.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM								3.709	6.237	7.087	7.795	8.575	
01.ADG.001	Tenaga Perpustakaan Yang Memperoleh Pembinaan	Orang	Pusat	860	1.300	1.500	1.700	1.900	3.148	5.721	6.520	7.172	7.889	
01.ADG.002	Tenaga Perpustakaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	Pusat	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	562	516	567	624	686	
01.PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM								2.530	3.095	3.621	4.124	4.789	
01.PDI.001	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perpustakaan	Orang	Pusat	450	450	450	450	450	130	298	328	360	396	
01.PDI.002	Fasilitasi Sertifikasi Pustakawan	Orang	Pusat	400	400	400	400	400	1.234	1.716	1.888	2.077	2.284	
01.PDI.003	Penguatan Uji Kompetensi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Perpustakaan	Orang	Pusat	432	430	500	550	600	1.167	1.081	1.406	1.687	2.108	
3009 - Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan									17.538	18.457	19.195	19.963	20.761	Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Peningkatan Pelestarian Fisik dan Informasi Bahan Perpustakaan								15.985	6.249	6.499	6.759	7.029	
	01-Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Persen		17,4	18,6	20,0	21,8	22,2						
01.RAA	Sarana Bidang Pendidikan								15.985	6.249	6.499	6.759	7.029	
01.RAA.003	Bahan Perpustakaan yang Dikonservasi	Eksemplar		119.550	96.150	99.996	103.996	108.156	7.172	4.744	4.934	5.131	5.337	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.RAA.004	Bahan Perpustakaan yang Dialih media	Eksemplar		10.300	38.000	39.520	41.101	42.745	8.813	1.505	1.565	1.628	1.693	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Peningkatan Pelestarian Fisik dan Informasi Naskah Kuno Nusantara								1.553	12.208	12.696	13.204	13.732	
	01-Persentase peningkatan Alih Media Naskah Kuno Nusantara	Persen	Pusat	15,23	21,68	28,38	35,28	42,48						
	02-Persentase Penurunan Tingkat Kerusakan Naskah Kuno Nusantara	Persen	Pusat	0	0,4	0,5	0,6	0,7						
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								1.257	8.463	8.802	9.154	9.520	
01.QDB.001	Pembinaan dan Pelestarian Naskah Kuno	Lembaga	Pusat	11	31	31	32	32	1.257	8.463	8.802	9.154	9.520	
01.RAA	Sarana Bidang Pendidikan								296	3.745	3.894	4.050	4.212	
01.RAA.001	Naskah Kuno Nusantara yang Dikonservasi	Eksemplar	Pusat	2.300	7.350	7.644	7.950	8.268	235	2.410	2.507	2.607	2.711	PNBP
01.RAA.002	Naskah Kuno Nusantara yang Dialih media	Eksemplar	Pusat	650	6.500	6.760	7.030	7.312	61	1.334	1.388	1.443	1.501	
3010 - Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno									6.344	7.171	8.239	9.027	9.889	UPT Proklamator Bung Karno
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Peningkatan Layanan Perpustakaan, Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan tentang Bung Karno								4.085	4.798	5.272	5.790	6.355	
	01-Jumlah Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Orang		1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000						
	02-Tingkat Kepuasan Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Nilai		85	86	87	88	89						
	03-Jumlah Dokumen Kajian dan Kebijakan Pengembangan Layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Rekomendasi Kebijakan		3	3	3	3	3						
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi								824	1.113	1.224	1.347	1.481	
01.AEF.001	Sosialisasi, Pameran, dan Pemasarakatan Pemikiran Bung Karno	Orang	Kota Blitar	8.437	11.000	12.000	13.000	14.000	824	1.113	1.224	1.347	1.481	
01.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat								459	505	555	611	672	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.BAA.001	Pemustaka yang memanfaatkan layanan UPT Perpustakaan Proklamator	Orang	Kota Blitar	1.090.063	1.187.400	1.286.300	1.385.200	1.484.100	459	505	555	611	672	
01.CAA	Sarana Bidang Pendidikan								291	420	456	492	527	
01.CAA.001	Bahan Perpustakaan yang Diadakan, Diolah, Dianalisis, dan Dilestarikan	Eksemplar	Kota Blitar	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	291	420	456	492	527	
01.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat								2.510	2.761	3.037	3.341	3.675	
01.QAA.001	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Orang	Kota Blitar	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.510	2.761	3.037	3.341	3.675	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan umum UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno								2.260	2.373	2.966	3.237	3.534	
	01-Pengelolaan Layanan Administrasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Layanan		1	1	1	1	1						
	02-Persentase penyelesaian pencatatan dan pembukuan BMN	Persen		100	100	100	100	100						
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								469	492	517	543	570	
02.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	Kota Blitar	1	1	1	1	1	469	492	517	543	570	
02.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								1.791	1.881	2.450	2.695	2.964	
02.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	Kota Blitar	198	199	200	201	202	1.791	1.881	2.450	2.695	2.964	
4380 - Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan									80.373	84.764	89.412	94.333	99.544	Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir								75.376	79.266	83.364	87.680	92.227	
	01-Persentase karya cetak dan karya rekam yang terkelola	Persen		80,0	82,5	85,0	87,5	90,0						
	02-Persentase Peningkatan Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak dan Terekam	Persen		2	3	4	5	6						
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								2.445	2.688	2.957	3.253	3.578	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.BDB.001	Pembinaan dan Penghargaan SSKCKR	Lembaga	Pusat	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	2.445	2.688	2.957	3.253	3.578	
01.CAA	Sarana Bidang Pendidikan								36.879	38.723	40.659	42.692	44.827	
01.CAA.002	Koleksi KCKR yang Terhimpun	Eksemplar	Pusat	315.000	331.000	347.000	365.000	383.000	3.119	3.275	3.439	3.611	3.792	
01.CAA.003	Bahan Perpustakaan yang Diadakan	Eksemplar	Pusat	335.852	352.645	370.277	388.791	408.230	33.760	35.448	37.220	39.081	41.035	
01.RAA	Sarana Bidang Pendidikan								36.052	37.855	39.748	41.735	43.822	
01.RAA.001	Jurnal Elektronik yang Dilanggan	Paket	Pusat	10	10	10	10	10	36.052	37.855	39.748	41.735	43.822	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Pengadaan Naskah Kuno Nusantara			2,0	2,5	5,0	7,5	10,0	4.997	5.498	6.048	6.652	7.318	
	01-Persentase peningkatan pengadaan naskah kuno Nusantara	Persen		2,0	2,5	5,0	7,5	10,0						
01.CAA	Sarana Bidang Pendidikan								4.997	5.498	6.048	6.652	7.318	
01.CAA.001	Naskah Kuno Nusantara yang Diadakan	Eksemplar	Pusat	200	205	210	215	220	4.997	5.498	6.048	6.652	7.318	
4381 - Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan									8.050	9.632	10.039	10.467	10.916	Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Pengawasan Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap								8.050	9.632	10.039	10.467	10.916	
	01-Tingkat Kepuasan Layanan ISBN	Nilai		86	87	88	89	90						
	02-Persentase Peningkatan Pengawasan Bibliografi	Persen		10	10	10	10	10						
	03-Persentase Penyelesaian Koleksi Perpustakaan Nasional Hasil Pengadaan dan KCKR yang Diolah	Persen		100	100	100	100	100						
	04-Persentase Penyelesaian Koleksi Restrospektif Perpustakaan Nasional yang Diolah	Persen		20	20	20	20	20						
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya								1.058	1.333	1.400	1.470	1.543	
01.BAH.001	Pengajuan ISBN yang Diproses	Judul	Pusat	87.870	92.264	96.877	101.721	106.807	585	837	878	922	968	
01.BAH.002	Pengajuan ISMN yang Diproses	Judul	Pusat	250	263	276	290	304	473	496	521	547	575	
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								689	698	733	769	808	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4383 - Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan									7.846	8.319	8.804	9.282	9.756	Direktorat Standardisasi dan Akreditasi
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan								7.846	8.319	8.804	9.282	9.756	
	01-Persentase peningkatan perpustakaan yang memenuhi standar	Persen		6,84	9,04	11,44	14,04	16,84						
	02-Persentase perpustakaan yang diakreditasi	Persen		2,2	2,4	2,6	2,8	3,0						
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria								750	750	750	750	750	
01.AFA.001	NSPK Standar Nasional Bidang Perpustakaan yang Disusun	NSPK	Pusat	4	4	4	4	4	750	750	750	750	750	
01.PDE	Akreditasi Lembaga								7.096	7.570	8.054	8.532	9.006	
01.PDE.001	Akreditasi Perpustakaan Umum	Perpusta-kaan	Pusat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	
01.PDE.002	Akreditasi Perpustakaan Khusus	Perpusta-kaan	Pusat	50	50	50	50	50	325	325	325	325	325	
01.PDE.003	Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Perpusta-kaan	Pusat	3.400	3.835	4.280	4.720	5.155	3.699	4.172	4.657	5.135	5.609	
01.PDE.004	Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi	Perpusta-kaan	Pusat	100	100	100	100	100	651	651	651	651	651	
01.PDE.005	Penjaminan Mutu Perpustakaan Terakreditasi	Perpusta-kaan	Pusat	140	140	140	140	140	995	995	995	995	995	
4384 - Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus									186.396	240.102	247.744	255.515	264.286	Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus								186.396	240.102	247.744	255.515	264.286	
	01-Tingkat kemanfaatan perpustakaan umum oleh masyarakat	Persen		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00						
	02-Tingkat kemanfaatan perpustakaan khusus oleh kalangan	Persen		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00						
	03- Peningkatan perpustakaan umum dan khusus sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen		4,65	4,65	4,65	4,65	4,65						
	04-Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Persen		0,7	0,74	0,78	0,81	0,85						
	05-Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan Umum	Persen		31,2	31,4	31,6	31,8	32,0						
01.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								516	520	532	553	574	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.BDB.001	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus	Lembaga	Pusat	156	200	250	300	350	516	520	532	553	574	
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga								23.143	23.947	24.723	25.273	25.823	
01.QDB.001	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Umum	Perpustakaan	Pusat	10,067	10,167	10,267	10,367	10,467	23.143	23.947	24.723	25.273	25.823	
01.QEI	Bantuan Lembaga								135.833	186.717	191.981	197.181	203.381	
01.QEI.001	Bantuan Sarana untuk Perpustakaan Umum	Lembaga	Pusat	10.048	10.148	10.198	10.248	10.298	75.049	100.470	103.178	105.178	108.178	
01.QEI.002	Bantuan Sarana untuk Perpustakaan Khusus	Lembaga	Pusat	110	120	130	140	150	3.304	3.304	3.504	3.704	3.904	
01.QEI.003	Perpustakaan yang mendapatkan Program Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Lembaga	Pusat	1.450	1.550	1.650	1.750	1.850	57.480	82.943	85.299	88.299	91.299	
01.QEO	Bantuan Produk dan Peralatan								26.904	28.918	30.508	32.508	34.508	
01.QEO.001	Akses Baca Digital di Daerah	Paket	Pusat	140	170	190	210	230	26.904	28.918	30.508	32.508	34.508	
4385 - Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi									56.146	73.087	77.873	82.690	87.507	Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Sekolah/Madrasah, dan Perguruan Tinggi								56.146	73.087	77.873	82.690	87.507	
	01-Tingkat kemanfaatan perpustakaan Sekolah/Madrasah oleh warga sekolah/madrasah	Persen		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00						
	02-Tingkat kemanfaatan perpustakaan Perguruan Tinggi oleh civitas akademika	Persen		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00						
	03- Peningkatan perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persen		2,0	2,5	3,0	3,5	4,0						
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga							4.617	14.997	15.416	15.866	16.316	
01.QDB.001	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Perpustakaan	Pusat	2.000	2.200	2.500	3.000	3.500	3.352	9.330	9.565	9.815	10.065	
01.QDB.002	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Perguruan Tinggi	Perpustakaan	Pusat	900	910	920	930	940	1.266	5.667	5.851	6.051	6.251	
01.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat							10.000	10.125	10.131	10.138	10.144	
01.QDD.001	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi	Kelompok Masyarakat	Pusat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.125	10.131	10.138	10.144	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.QEI	Bantuan Lembaga								41.528	47.965	52.326	56.686	61.047	
01.QEI.001	Bantuan Sarana untuk Perpustakaan Sekolah/ Madrasah/Perguruan Tinggi	Lembaga	Pusat	100	110	120	130	140	41.528	47.965	52.326	56.686	61.047	
4386 - Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi									25.171	33.797	37.475	41.931	46.174	Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya hasil analisis perpustakaan dan terselenggaranya pengembangan budaya baca dan literasi								25.171	33.797	37.475	41.931	46.174	
	01-Dokumen analisis perpustakaan, budaya baca, dan literasi	Kajian		6	6	6	6	6						
	02-Tingkat efektifitas kegiatan penguatan budaya baca dan kecakapan literasi	Nilai		2,6	2,7	2,8	2,9	3,0						
01.ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan								3.687	3.872	4.143	4.343	4.543	
01.ABH.001	Dokumen Hasil Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca, dan Literasi	Kajian	Pusat	6	6	6	6	6	3.687	3.872	4.143	4.343	4.543	
01.PEF	Sosialisasi dan Diseminasi								18.482	21.458	24.440	28.252	31.826	
01.PEF.001	Masyarakat yang terlibat dalam Gerakan Indonesia Membaca	Orang	Pusat	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	18.482	21.458	24.440	28.252	31.826	
01.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat								3.002	8.468	8.892	9.337	9.805	
01.QDC.001	Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA)	Orang	Pusat	180	500	500	500	500	3.002	8.468	8.892	9.337	9.805	
5272 - Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta									4.223	4.862	5.365	5.873	6.507	UPT Proklamator Bung Hatta
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya Peningkatan Layanan Perpustakaan, Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan tentang Bung Hatta								3.249	3.708	4.146	4.586	5.148	
	01-Jumlah Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Pemustaka		135.359	155.375	175.400	195.425	215.540						
	02-Tingkat Kepuasan Pemustaka UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Nilai		95	95	95	95	95						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	03-Jumlah Dokumen Kajian dan Kebijakan Pengembangan Layanan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Rekomendasi Kebijakan		3	3	3	3	3						
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi								382	413	421	430	438	
01.AEF.001	Sosialisasi, Pameran dan Pemasyarakatan Pemikiran Bung Hatta	Orang	Kota Bukit Tinggi	1.700	1.850	1.900	1.950	2.000	382	413	421	430	438	
01.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat								425	489	553	618	683	
01.BAA.001	Pemustaka yang memanfaatkan layanan UPT Perpustakaan Proklamator	Orang	Kota Bukit Tinggi	135.359	155.375	175.400	195.425	215.540	425	489	553	618	683	
01.CAA	Sarana Bidang Pendidikan								442	447	452	457	462	
01.CAA.001	Bahan Perpustakaan Yang Diadakan, Diolah, Dan Dilestarikan	Eksemplar	Kota Bukit Tinggi	2.850	2.875	2.900	2.925	2.950	442	447	452	457	462	
01.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat								2.000	2.359	2.719	3.082	3.565	
01.QAA.001	Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Orang	Kota Bukit Tinggi	850	1.000	1.150	1.300	1.500	2.000	2.359	2.719	3.082	3.565	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan umum UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta								974	1.155	1.219	1.287	1.359	
	01-Pengelolaan Layanan Administrasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	Layanan	Kota Bukit Tinggi	1	1	1	1	1						
	02-Persentase penyelesaian pencatatan dan pembukuan BMN	Persen	Kota Bukit Tinggi	100	100	100	100	100						
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								608	658	698	740	784	
02.EBA.001	Layanan Umum	Layanan		1	1	1	1	1	608	658	698	740	784	
02.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								366	496	521	547	575	
02.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit		35	57	59	61	63	366	496	521	547	575	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									262.090	369.545	379.573	410.914	444.826	
Sasaran Program 4	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perpustakaan Nasional yang Akuntabel								262.090	369.545	379.573	410.914	444.826	Sekretaris Utama

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Nilai SAKIP PERPUSNAS	Nilai		73,54	75,00	76,50	78,00	80,00						
	02-Nilai Kinerja Anggaran	Nilai		95,50	95,60	95,70	95,80	95,90						
	03-Survey Penilaian Integritas	Nilai		83,0	83,5	84,0	84,5	85,0						
	04-Nilai Sistem Merit	Nilai		280	282	284	286	288						
	05-Indeks Pengelolaan Aset	Indeks		3,67	3,68	3,69	3,70	3,71						
	06-Indeks Reformasi Hukum	Nilai		97,10	97,20	97,30	97,40	97,50						
	07-Indeks Pemerintah Digital	Indeks			1,80	2,00	2,30	2,60						
	08-Tingkat Maturitas SPIP	Nilai		3,5	3,6	3,7	3,8	3,9						
3067 - Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno									12.504	13.430	13.918	14.423	14.947	UPT Proklamator Bung Karno
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno								12.504	13.430	13.918	14.423	14.947	
	01-Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Persen		99	99	99	99	99						
	02-Persentase Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persen		98	98	98	98	98						
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								12.504	13.430	13.918	14.423	14.947	
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	Kota Blitar	2	2	2	2	2	12.504	13.430	13.918	14.423	14.947	
3069 - Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta									7.320	8.052	8.858	9.743	10.718	UPT Proklamator Bung Hatta
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta								7.320	8.052	8.858	9.743	10.718	
	01-Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Persen		99	99	99	99	99						
	02-Persentase Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persen		98	98	98	98	98						
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								7.320	8.052	8.858	9.743	10.718	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	Kota Bukit Tinggi	2	2	2	2	2	7.320	8.052	8.858	9.743	10.718	
4377 - Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional									155.113	213.077	214.204	234.842	257.512	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya perencanaan yang transparan dan akuntabel								9.209	9.669	10.152	10.660	11.193	
	01-Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks		97,1	97,2	97,3	97,4	97,5						
	02-Persentase Penyelesaian Revisi Anggaran	Persen		100	100	100	100	100						
	03-Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Perpustakaan	Persen		100	100	100	100	100						
	04-Nilai Rata-Rata Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	Nilai		80	81	82	83	84						
	05-Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP	Persen		100	100	100	100	100						
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								3.995	4.195	4.404	4.625	4.856	
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	Pusat	41	41	41	41	41	3.995	4.195	4.404	4.625	4.856	
01.FAD	Perencanaan dan Penganggaran								5.214	5.474	5.748	6.035	6.337	
01.FAD.001	Layanan perencanaan dan penganggaran	Dokumen	Pusat	14	14	14	14	14	5.214	5.474	5.748	6.035	6.337	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Keuangan Sesuai Standar								145.904	203.408	204.051	224.182	246.319	
	01-Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai		92,0	92,5	93,0	93,5	94,0						
	02-Persentase Realisasi Anggaran	Persen		97,0	97,2	97,4	97,6	97,8						
02.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								144.354	201.296	201.834	221.853	243.874	
02.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	2	2	2	2	2	144.354	201.296	201.834	221.853	243.874	
02.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								1.550	2.112	2.218	2.329	2.445	
02.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	Pusat	4	4	4	4	4	1.550	2.112	2.218	2.329	2.445	
4378 - Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional									10.470	11.245	12.139	13.174	14.265	Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Pelayanan Hukum, Organisasi, Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Penerbitan yang Berkualitas									10.470	11.245	12.139	13.174	14.265	
	01-Indeks BerAKHLAK	Indeks		70	71	72	73	74							
	02-Tingkat Implementasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persen		30	35	40	45	50							
	03-Tingkat Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	Persen		20	25	30	35	40							
	04-Tingkat Opini Publik Positif dan Netral	Persen		90	90	90	90	90							
	05-Persentase Penyelesaian Terbitan yang Diajukan	Persen		100	100	100	100	100							
	06-Persentase terselesaikannya Peraturan	Persen		100	100	100	100	100							
	07-Nilai Penilaian Mandiri SPIP Perpusnas	Nilai		4,0	4,1	4,2	4,3	4,4							
	08-Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai		76	77	78	79	80							
01.AAG	Peraturan Menteri									1.000	1.076	1.184	1.302	1.433	
01.AAG.001	Penyusunan Peraturan Perpustakaan Nasional	Peraturan	Pusat	10	10	10	10	10		1.000	1.076	1.184	1.302	1.433	
01.AEC	Kerja sama									2.058	2.264	2.490	2.739	3.013	
01.AEC.001	Layanan Kerja Sama	Kegiatan	Pusat	2	2	2	2	2		2.058	2.264	2.490	2.739	3.013	
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria									313	315	347	381	381	
01.AFA.001	Penetapan NSPK bidang perpustakaan	NSPK	Pusat	8	8	8	8	8		313	315	347	381	381	
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal									6.576	7.014	7.486	8.055	8.672	
01.EBA.001	Penguatan Layanan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	Pusat	3	3	3	3	3		935	1.028	1.131	1.244	1.368	
01.EBA.002	Layanan Pengelolaan Penerbitan	Judul	Pusat	1	1	1	1	1		1.125	1.181	1.240	1.364	1.500	
01.EBA.957	Layanan Hukum	Layanan	Pusat	2	2	2	2	2		1.263	1.389	1.528	1.681	1.849	
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	Laporan	Pusat	2	2	2	2	2		3.253	3.416	3.587	3.766	3.954	
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal									523	575	633	696	766	
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1		523	575	633	696	766	
4379 - Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional										64.197	101.353	106.160	112.016	118.004	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/ Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan Ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang Profesional									64.197	101.353	106.160	112.016	118.004	
	01-Indeks Profesionalitas ASN	Indeks		82,0	82,5	83,0	83,5	84,0							
	02-Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai		50	52	54	56	58							
	03-Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai		88	89	89	90	90							
	04-Persentase Penyelesaian Pencatatan dan Pembukuan BMN	Persen		100	100	100	100	100							
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								49.341	77.173	82.453	87.821	93.294		
01.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	Pusat	4	4	4	4	4	4.018	4.500	4.780	5.148	5.622		
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	45.323	72.673	77.673	82.673	87.673		
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								10.267	19.500	18.850	19.200	19.550		
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	Pusat	288	288	288	288	288	10.267	19.500	18.850	19.200	19.550		
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal								4.223	4.260	4.377	4.505	4.660		
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Orang	Pusat	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	4.223	4.260	4.377	4.505	4.660		
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								366	420	480	490	500		
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	Pusat	1	1	1	1	1	366	420	480	490	500		
	5204 - Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional								4.608	6.634	6.966	7.654	8.410	Inspektorat	
	Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Pengawasan Internal Perpusnas yang Efektif dan Efisien								4.608	6.634	6.966	7.654	8.410		
	01-Kapabilitas APIP Perpusnas	Level		3	3	3	3	4							
	02-Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Persen		91,00	91,25	91,50	91,75	92,00							
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								4.608	6.634	6.966	7.654	8.410		
01.EBD.965	Laporan Hasil Pengawasan	Laporan	Pusat	1	1	1	1	1	4.608	6.634	6.966	7.654	8.410		
	6873 - Pengelolaan Data dan Informasi								7.877	15.754	17.329	19.062	20.969	Pusat Data dan Informasi	

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno Nusantara		Naskah	4.200	4.600	5.000	5.400	6.000	833	958	1.102	1.267	1.457	-	-	-	-	-	833	958	1.102	1.267	1.457
Alih Bahasa Naskah Kuno Nusantara		Naskah	80	90	100	110	120	1.537	2.705	2.976	3.274	3.601	-	-	-	-	-	1.537	2.705	2.976	3.274	3.601
Alih Wahana Naskah Kuno Nusantara		Naskah	50	60	70	80	100	902	1.511	1.662	1.828	2.011	-	-	-	-	-	902	1.511	1.662	1.828	2.011
Alih Aksara Naskah Kuno Nusantara		Naskah	80	90	100	110	120	1.028	1.195	1.315	1.446	1.591	-	-	-	-	-	1.028	1.195	1.315	1.446	1.591
Saduran Naskah Kuno Nusantara		Naskah	10	12	14	16	20	183	220	242	266	292	-	-	-	-	-	183	220	242	266	292
Penyediaan Bahan Literasi Berbasis Koleksi Langka		Naskah	47	48	49	50	50	415	1.476	1.623	1.786	1.964	-	-	-	-	-	415	1.476	1.623	1.786	1.964
Kajian Naskah Kuno Nusantara		Naskah	20	22	24	26	30	365	403	443	487	536	-	-	-	-	-	365	403	443	487	536
Pemajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of The World (MoW)		Naskah	9	9	9	9	9	3.737	3.410	3.751	4.126	4.539	-	-	-	-	-	3.737	3.410	3.751	4.126	4.539
Pembinaan dan Pelestarian Naskah Kuno		Lembaga	11	31	31	32	32	1.257	8.463	8.802	9.154	9.520	-	-	-	-	-	1.257	8.463	8.802	9.154	9.520
Naskah Kuno Nusantara yang Dikonservasi		Eksemplar	2.300	7.350	7.644	7.950	8.268	235	2.410	2.507	2.607	2.711	-	-	-	-	-	235	2.410	2.507	2.607	2.711
Naskah Kuno Nusantara yang Dialih media		Eksemplar	650	6.500	6.760	7.030	7.312	61	1.334	1.388	1.443	1.501	-	-	-	-	-	61	1.334	1.388	1.443	1.501

Matriks Kerangka Regulasi Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Urgensi revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, karena banyak pengaturan yang tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini di mana kemajuan teknologi dan informasi sudah berkembang sangat pesat. Begitu juga kebutuhan masyarakat akan informasi sudah jauh berkembang terutama untuk pemanfaatan layanan digital. Banyaknya informasi hoax atau berita palsu yang menjadi masalah serius dan berdampak luas, mempengaruhi persepsi masyarakat dan bahkan menimbulkan kerugian nyata. Begitu juga dengan perkembangan kecerdasan artifisial perpustakaan berperan penting dan juga memiliki kepentingan dalam proses digitalisasi dan pelestarian koleksi perpustakaan, termasuk dokumen bersejarah dan manuskrip langka, serta pemanfaatannya. Peran yang sangat besar terkait proses penghimpunan, digitalisasi, dan pemanfaatan termasuk kaitannya dengan perkembangan kecerdasan buatan perlu pengaturan	Perpustakaan Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		untuk menjamin kepastian hukum.			
2	Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan atas Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan diperlukan bila diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan yang telah direvisi yang berfungsi untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam Peraturan Pemerintah akan dijelaskan lebih mendalam dan lebih rinci terkait ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan sehingga dalam penerapannya dapat lebih efektif dan lengkap.	Perpustakaan Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2025-2029
3	Revisi Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang	Revisi Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terletak pada perlunya menyempurnakan pengaturan terkait kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta terus meningkatkan kolaborasi dengan	Perpustakaan Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian	berbagai pihak untuk mewujudkan visi dan misinya. Sesuai perkembangan terkini dan kebutuhan administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan efektif Perpustakaan Nasional harus menjadi pusat pengetahuan dan budaya yang inovatif dan inklusif, serta dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung Asta Cita ke-delapan Kabinet Merah Putih.			
4	Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional	Penyusunan Rancangan Perpres ini menjadi sangat mendesak mengingat belum adanya regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur pengelolaan dan pelestarian warisan dokumenter sebagai bagian dari ingatan kolektif bangsa. Padahal, warisan dokumenter Indonesia memiliki nilai penting bagi sejarah, budaya, dan identitas nasional serta sangat rentan terhadap kerusakan, bencana, dan pengabaian. Selama ini pengaturannya tersebar secara parsial di berbagai kementerian/lembaga tanpa koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, rekomendasi	Perpustakaan Nasional	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		UNESCO melalui program <i>Memory of the World</i> menekankan pentingnya dukungan hukum dan kelembagaan dalam pelestarian dokumenter, yang hingga kini belum terwadahi secara memadai di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah regulasi setingkat Peraturan Presiden yang mengintegrasikan upaya registrasi, pelestarian, serta promosi warisan dokumenter nasional secara sistematis dan berkelanjutan.			

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E. AMINUDIN AZIZ